

ANALISIS KONSTRUKSI REALITAS MEDIA

**(Studi Kasus Pemberitaan oleh Jawapos.com Mengenai Konflik Gubernur
Jawa Timur dan Walikota Surabaya dalam Penanganan Covid-19)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Demokrasi dan Politik
Elektoral**

Oleh:

Aprillia Eka Ayu Savitri

NIM 175120507111020



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KONSTRUKSI REALITAS MEDIA

(Studi Kasus Pemberitaan oleh Jawapos.com Mengenai Konflik Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya dalam Penanganan Covid-19)

Oleh:

Aprillia Eka Ayu Savitri

NIM 175120507111020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA


Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP

NIP. 2016078311181001

NIP 2016078204211001

Tanggal: 25 Mei 2021

Tanggal: 25 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan FFI FISIP UB


Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.

NIP 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS KONSTRUKSI REALITAS MEDIA

(Studi Kasus Pemberitaan oleh Jawapos.com Mengenai Konflik Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya dalam Penanganan Covid-19)

Disusun Oleh:

Aprillia Eka Ayu Savitri

NIM. 175120507111020

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana Ilmu Politik pada tanggal
5 Juli 2021

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. Drs. M. Fauzie Said

NIP. 198306172018031001

Dosen Pembimbing 1,



Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA

NIP. 2016078311181001



Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP

NIP. 2018079111191001

Dosen Pembimbing 2,



Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP

NIP 2016078204211001

Malang, 5 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan PPHI FISIP UB



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.

NIP 197802202010121001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Aprillia Eka Ayu Savitri

NIM : 175120507111020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS KONSTRUKSI REALITAS MEDIA

(Studi Kasus Pemberitaan oleh Jawapos.com Mengenai Konflik Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya dalam Penanganan Covid-19)

adalah benar-benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya sendiri, dalam skripsi ini telah diberi catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut

Malang, 20 Mei 2021

Menyatakan,

Aprillia Eka Ayu Savitri
NIM. 175120507111020

MOTTO

RULE 1: in this world a happily ever after doesn't mean a perfection.

It's okay, everyone have their own track. Never comparing.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul

“Analisis Konstruksi Realitas Media (Studi Kasus Pemberitaan oleh Jawapos.com Mengenai Konflik Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya dalam Penanganan Covid-19)” sebagai salah satu syarat utama dalam

meraih gelar Strata 1 (satu) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) Malang. Dalam proses kegiatan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian laporan ini.

1. Hengky Setyawan dan Juliati selaku Orang tua, Uti Elik Endang, Adik Aurrel Ayu, Adik Al Xena Evan dan seluruh keluarga besar penulis yang mana telah memberikan dukungan materiil maupun non-materiil sebagai penunjang penulis selama menempuh proses perkuliahan, termasuk dalam pembuatan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Sholih Mu’adi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt. sebagai Ketua Jurusan Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional (PPHI).
4. Ibu Juwita Hayyuning Prastiwi selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

5. Bapak Ibnu Asgori Pohan, S.Sos., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan penulis kesempatan untuk belajar hal baru.
6. Bapak Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ilham Safutra dan Ibu Nurul Adriyana Salbiah selaku redaksi Jawapos.com yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penulis dalam mendapatkan data sebagai penunjang utama pembahasan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu memberikan masukan dan dukungan selama penulis berada di bangku perkuliahan.
9. Diva Hestya, Intan Kharisah dan Amalia Putri Ariva, bertahan hingga akhir bukanlah perkara mudah. Tapi, terimakasih kalian yang sudah selalu menjadi garda terdepan dalam mengupayakan *support* untuk penulis.
10. Yoan Sere Monica Sihombing dan Rizma Salsabila Mubaroq yang selalu bersedia menjadi teman *ngobrol ngalor-ngidul*, terimakasih kalian! Suatu kebahagiaan mengenal sejak hari pertama menjadi Maba! Ah, *time flies so fast*.
11. Kak Talitha yang selalu siap sedia dan senang hati ketika diajak berdiskusi.
12. Teman-teman Politik Sehat '17 menjadi teman seperjuangan selama menempuh proses perkuliahan.

13. *The last but not least, for my self. Congrats, you did it!*

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih memerlukan perbaikan, baik secara materi maupun cara penulis menyajikan tidak lain karena keterbatasan penulis, sehingga demi penyempurnaannya penulis mohon adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Malang, 20 Mei 2021

Aprillia Eka Ayu Savitri



ABSTRAK

Aprillia Eka Ayu Savitri, 2021, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, Analisis Konstruksi Realitas Media (Studi Kasus Pemberitaan oleh Jawapos.com Mengenai Konflik Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya dalam Penanganan Covid-19)

Berangkat dari fenomena peralihan mobil PCR yang mengakibatkan tingginya sorotan publik terhadap nama Khofifah dan Risma, penelitian ini ditujukan untuk melihat secara spesifik bagaimana Jawapos.com dalam memperlakukan topik hangat untuk diangkat sebagai berita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan gender. Dengan dilakukannya analisis framing dari Robert Entman dan juga wawancara mendalam dengan redaksi Jawapos.com, penelitian ini menemukan bahwa isu sensitivitas gender yang rendah dalam diri perusahaan media tidak ditemukan di Jawapos.com. Keyakinan Widaningsih (1999) akan 'jumlah pekerja laki-laki di perusahaan media yang mempengaruhi bagaimana patriarkhi-nya pemberitaan yang dipublikasikan' tidak terbukti. Jawapos.com berpegang teguh terhadap salah fungsi media yakni *problem solving*. Kemudian, dalam proses produksi, ditemukan tidak adanya unsur alasan gender dalam mempengaruhi keputusan baik secara teknis maupun substansi dalam publikasi berita. Dengan begitu, penelitian ini telah memperluas kajian politik kontemporer dengan perpaduan kajian *feminist standpoint* dan konstruksi realitas media.

Kata kunci: Media Online, Framing Berita, Khofifah, Risma, Mobil PCR, Covid-19, Pemimpin Perempuan

ABSTRACT

Aprillia Eka Ayu Savitri, 2021, Political Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University Malang, Analysis of Media Reality Construction (Case Study of News by Jawapos.com Regarding the Conflict of the Governor of East Java and the Mayor of Surabaya in Handling Covid-19)

From the phenomenon of the PCR car switching which resulted in high public attention to the names of Khofifah and Risma, this research is aimed at seeing specifically how Jawapos.com treats hot topics to be raised as news. This study uses a qualitative method with a constructivism paradigm and a gender approach. By conducting a framing analysis by Robert Entman and also in-depth interviews with the editors of Jawapos.com, this study finds that the issue of low gender sensitivity in media companies is not found in Jawapos.com. Widaningsih's (1999) belief in 'the number of male workers in media companies influences how patriarchal the news is published' is not proven. Jawapos.com clings to one of the media's functions, namely problem solving. Then, in the production process, it was found that there was no element of gender reasoning in influencing decisions both technically and substantively in news publications. Thus, this research has expanded the study of contemporary politics by combining feminist standpoint studies and the construction of media reality.

Keywords: Online Media, News Framing, Khofifah, Risma, PCR Car, Covid-19, Women Leaders



DAFTAR ISI

ANALISIS KONSTRUKSI REALITAS MEDIA.....	1
---	---

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
-------------------------	----

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
------------------------	-----

HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
-------------------------	----

MOTTO.....	v
------------	---

KATA PENGANTAR.....	vi
---------------------	----

ABSTRAK.....	ix
--------------	----

ABSTRACT.....	x
---------------	---

DAFTAR ISI.....	xi
-----------------	----

DAFTAR TABEL.....	xv
-------------------	----

DAFTAR GAMBAR.....	xvi
--------------------	-----

DAFTAR BAGAN.....	xvii
-------------------	------

BAB I PENDAHULUAN.....	1
------------------------	---

1.1 Latar Belakang.....	1
-------------------------	---

1.2 Rumusan Masalah.....	14
--------------------------	----

1.3 Tujuan Penelitian.....	14
----------------------------	----

1.4 Manfaat.....	15
------------------	----

1.4.1 Manfaat Teoritis.....	15
-----------------------------	----

1.4.2 Manfaat Praktis.....	15
----------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Dasar Teoritis	19
2.1.1 Konstruksi Realitas Media Massa.....	19
2.1.2 Feminist Standpoint Theory.....	25
2.1.3 Definisi Konseptual.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Alur Kerangka berpikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Paradigma Penelitian.....	43
3.1.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Metode Penelitian.....	46
3.3 Fokus Penelitian	48
3.4 Sumber Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5.1 Dokumentasi	51
3.5.2 Wawancara Mendalam (<i>In-depth Interview</i>)	51
3.6 Teknik Perekrutan Informan.....	53
3.7 Teknis Analisis Data.....	54
3.8 Waktu Penelitian	56
3.9 Pemilihan Media.....	56

BAB IV ANALISIS DATA.....	58
4.1 Temuan Penelitian.....	58
4.1.1 Pemberitaan Konflik Khofifah dan Risma.....	58
4.1.2 Pemberitaan Konflik Ridwan Kamil dan Mahfud MD.....	65
4.2 Pembahasan Temuan.....	70
4.2.1 Elemen Framing Berita Khofifah-Risma.....	70
4.2.2 Elemen Framing Ridwan Kamil dan Mahfud MD.....	71
4.2.3 Dimensi Framing Berita Khofifah-Risma.....	73
4.2.4 Dimensi Framing Berita Ridwan Kamil-Mahfud MD.....	77
BAB V ANALISIS KONSTRUKSI REALITAS MEDIA JAWAPOS.COM.....	81
5.1 Pembahasan Hasil Framing Pemberitaan Khofifah-Risma.....	81
5.1.1 Komparasi Pembahasan Hasil Framing Pemberitaan Khofifah-Risma dan Ridwal Kamil-Mahfud MD.....	87
5.2 Tahapan Media Jawapos.com dalam Memproduksi Berita.....	93
5.3 <i>Feminist Standpoint</i> Jawapos.com.....	102
BAB VI PENUTUP.....	108
6.1 Kesimpulan.....	108
6.2 Keterbatasan Penelitian.....	111
6.3 Rekomendasi.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

LAMPIRAN I CURICULUM VITAE NARASUMBER.....118

LAMPIRAN II TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PAK ILHAM

SAFUTRA.....123

LAMPIRAN III BUKTI KONFIRMASI JAWAPOS.COM.....126

LAMPIRAN IV KUMPULAN BERITA YANG MENJADI BAHAN ANALISIS
FRAMING.....131



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Intisari Pemikiran Logika Positivistik, Fenomologi dan Konstruksi Realitas Sosial.....	20
Tabel 2.2 Tabel Hubungan antara framing dan Realitas.....	33
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Tabel Fokus Penelitian, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	49
Tabel 3.2 Tabel Panduan Wawancara.....	53
Tabel 3.3 Tabel Penjelasan Dimensi Framing Robert N. Entman.....	54
Tabel 3.4 Tabel Pertanyaan yang Terkandung dalam Framing Robert N. Entman.....	56
Tabel 5.1 Data Karyawan Jawapos.com.....	90
Tabel 5.2 Pengalaman Kerja Narasumber.....	105
Tabel 5.3 Penghargaan yang Didapat oleh Narasumber.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tangkapan Layar Reaksi Risma dalam Video yang Beredar..... 85



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Tahun Pemilihan Umum	3
Bagan 1.2 Keterwakilan Perempuan di Asia Tenggara	4
Bagan 2.1 Silsilah Lahirnya Teori Feminist Standpoint	26
Bagan 2.2 Cakupan Klasifikasi Kelompok Teori Standpoint	27
Bagan 2.3 Bagan Alur Kerangka Pemikiran	41
Bagan 5.1 Alur Tahapan Produksi Berita Media Jawa Pos	95
Bagan 5.2 Mind-map Tahapan Konstruksi Realitas Jawapos.com	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menilik siaran pers yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) Nomor: B-239/Set/Rokum/MP 01/11/2018 yang menyatakan bahwasanya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 menjadi suatu kesempatan atas terbukanya peluang yang cukup signifikan bagi perempuan untuk turut terjun dalam dunia politik.¹ Hal ini ditenggarai dengan meningkatnya keterpilihan perempuan yang semula hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang atau 2,5% dari jumlah seluruh kursi pada saat sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak menjadi 87 (delapan puluh tujuh) wakil perempuan terpilih dari jumlah seluruh kursi yang mencapai 1096 atau sebanyak 8%. Dengan adanya peningkatan ini dari pihak KemenPPPA menaruh harap bahwa peluang ini memang menjadi sebuah kesempatan bagi perempuan untuk semakin mendapat ruang di publik. Terutama, dalam pembangunan di segala bidang, agar kesetaraan gender semakin terwujud. Hal ini berlandaskan terkait KemenPPPA yang meyakini bahwa

¹ KemenPPPA, “Pilkada Serentak 2018 Perempuan Terpilih menjadi Kepala Wakil Kepala Daerah Meningkat”, diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1977/pilkada-serentak-2018-perempuan-terpilih-menjadi-kepala-wakil-kepala-daerah-meningkat/>, pada tanggal 5 Oktober 2020

perempuan memiliki banyak potensi terlebih ketika perempuan telah mendapatkan posisi yang strategis.²

Selaras dengan mulai terbukanya peluang perempuan dalam menempati posisi strategis sebagai kepala daerah, tak tertinggal perempuan dalam kursi legislatif pun semakin meningkat. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2008 menjadi landasan semakin menguatnya pengakuan akan eksistensi perempuan. Hal ini ditenggarai bahwa di dalam undang-undang ini mengharuskan suatu partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% baik dalam proses pendirian hingga kepengurusan di tingkat pusat.³ Semakin diperkuat lagi dengan adanya UU Nomor 10 tahun 2008 terkait salah satu syarat partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum ialah dengan memiliki kuota 30% untuk perempuan.⁴ Sejatinya, angka 30% ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana menerangkan bahwa angka 30% ini memuat sebuah kemungkinan akan terjadinya perubahan dan dampak terhadap kualitas pengambilan suatu keputusan oleh lembaga publik.⁵

² Dengan begitu, KemenPPPA melakukan upaya guna mewujudkan hal tersebut terwujud. *Pertama*, menetapkan 3 (tiga) program prioritas yakni three ends + politik yang meliputi: (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Akhiri perdagangan manusia; (3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan; dan (4) Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. *Kedua*, mengeluarkan Permen PPPA No. 10 Tahun 2015 tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Permen PPPA tersebut telah disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia untuk dilaksanakan guna mendukung agenda Planet 50:50 gender equality pada 2030 (tidak lagi berpikir quota 30% perempuan dan 70% laki-laki, melainkan menuju paradigma kesetaraan gender dalam menerima dan meraih manfaat serta kesempatan di berbagai bidang pembangunan). *Ketiga*, melakukan MoU dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu guna mengawal kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di parlemen. *Ibid*.

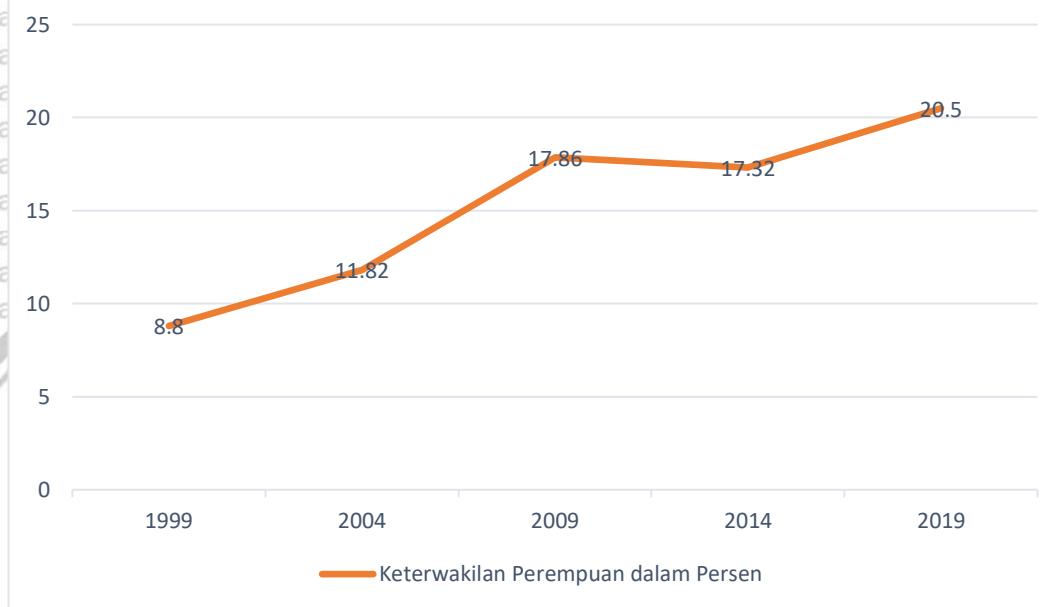
³ Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁴ Diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/countuu-6a4a545652544e45>, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁵ Scholastica Gerinty, "Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai", diakses dari <https://tirto.id/cv8q>, pada tanggal 5 Oktober 2020.

Berikut data terkait bagaimana presentase keterwakilan perempuan di parlemen dari tahun ke tahun.

Bagan 1.1
Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Tahun Pemilihan Umum

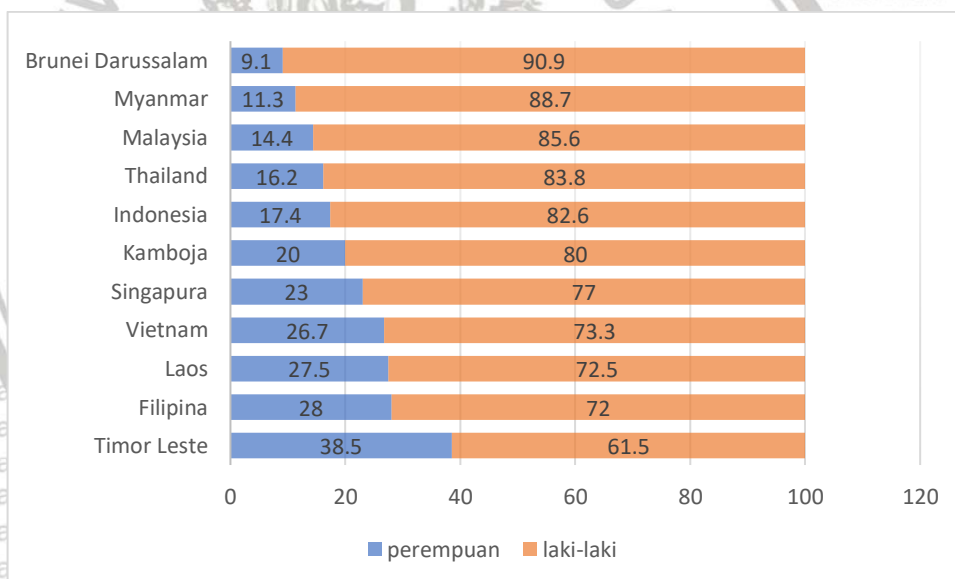


Sumber: KPU, diolah. (2020)

Dari bagan di atas dapat terlihat bahwa perempuan ditenggarai sudah memiliki tempat untuk diakui secara legal sejak diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1999. Seperti yang diketahui bahwa Pemilu 1999 ini merupakan Pemilu yang diselenggarakan pertama kali pasca terjadinya reformasi. Dengan mendapat kursi sebanyak 8,8% dari jumlah keseluruhan kursi, keterwakilan perempuan mendapat tempat sebanyak 44 orang. Pada Pemilu selanjutnya, yakni Pemilu 2004, keterwakilan perempuan mendapatkan sebanyak 65 kursi di parlemen atau sekitar 11,82%. Proporsi ini mulai melonjak ketika memasuki Pemilu tahun 2009 yang berada pada angka 17,86%. Menurun pada Pemilu 2014 dengan

memperoleh 17,32% kursi di Parlemen. Tertinggi ditenggarai pada pelaksanaan Pemilu 2019 yakni mencapai proporsi 20,5% dari seluruh kursi di Parlemen. Pencapaian ini pun ternyata bukan merupakan sebuah prestasi yang membanggakan dalam perkembangan keterwakilan perempuan di Parlemen. Hal ini kuat didasari oleh data terkait perbandingan keterwakilan di Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara yang akan disajikan dalam sebuah bagan berikut yang menyatakan bahwa posisi Indonesia masih berada di 5 (lima) besar keterwakilan perempuan paling rendah di Asia Tenggara.

Bagan 1.2
Keterwakilan Perempuan di Asia Tenggara



Sumber: World Bank, diolah. (2020)

Walaupun telah mengantongi sebuah kepastian akan ditetapkan regulasi terkait terbukanya peluang peran perempuan di ranah publik, ternyata hal ini tidak menjadi jaminan perempuan untuk diakui seutuhnya. Sepak terjang perjuangan perempuan untuk diakui secara legalitas oleh publik tidak berhenti begitu saja. Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengabulan uji materi pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e pada UU No. 10 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan mengganti yang semula menggunakan sistem nomor urut dengan sistem suara terbanyak ini menjadikan sebuah titik temu tentang bagaimana pemberitaan isu gender mulai masif dikonstruksikan oleh media.⁶ Kemudian, dapat ditenggarai bahwa salah satu polemik yang akan dirasakan oleh perempuan ialah terkait dengan isu sensitivitas gender oleh media.⁷

Seperti yang diketahui bahwa media berperan sebagai mediator dalam sarana sosialisasi juga sarana penyampaian pesan.⁸ Lebih jauh, media juga dianggap memiliki peran yang lebih signifikan berupa penanaman sebuah ideologi, dalam konteks ini tentunya terkait dengan gender. Media dianggap mampu untuk menyalurkan ideologi gender tersebut di tengah perkembangan stereotipe yang berlaku di tengah masyarakat.⁹ Krusialnya peran media ini dapat dikaitkan dengan Indonesia yang memang sangat membutuhkan peran media sebagai salah satu pilar tonggaknya demokrasi.

Dalam perkembangannya, pengaksesan media oleh masyarakat pun semakin hari semakin beragam. Salah satu produk media yang memang erat kaitannya dengan mekanisme kehidupan politik adalah berita. Merujuk pada data yang dipaparkan oleh Aliansi Jurnalis Independen yang menyatakan bahwa tahun 2014

⁶ Diah Wulandari, "Konstruksi Pemberitaan Politik Ber-Isu Gender" dalam Tesis Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 9-10

⁷ Iwan Awaluddin Yusuf, "Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 7 Nomor 3*, 2004, hlm. 351

⁸ *Ibid*, hlm. 352

⁹ Diah Wulandari, *Op.cit*, hlm. 1

menjadi puncak perubahan tren pada masyarakat dalam mengakses produk media berupa berita dari metode konvensional seperti koran, televisi dan radio menjadi metode digital yang dapat diakses melalui situs berita daring.¹⁰ Data pendukung yang dapat disajikan ialah pengguna internet per tahun 2020 telah mencapai angka 17,54 juta dengan tingkat penetrasi mencapai angka 64%.¹¹

Dengan mengalami peningkatan dalam angka pencapaian penetrasi internet ini dapat menjadi salah satu faktor atas pergeseran pola pengaksesan berita oleh masyarakat. Adanya perubahan ini juga sebagai faktor pendorong beberapa perusahaan media mulai mencoba infiltrasi situs berita agar dapat tetap menjaga eksistensi yang telah dimiliki dalam persaingan industri media.¹² Hal ini juga yang menjadi landasan mengapa media masih memiliki kompleksitas dalam isu sensitivitas gender.¹³ Mengutip dari argumentasi milik Dr. Daniel Dhakidae yang menyatakan bahwa pers, media, terutama surat kabar harian memiliki peranan sebagai *male industry*.¹⁴ Dengan begitu, wajar ketika apa yang terjadi di dalam industri tersebut identik dengan ideologi patriarki yang erat di dalam diri laki-laki.

Media memiliki kemandirian dalam menyajikan segala bentuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Peran redaktur media memiliki kuasa melalui proses

¹⁰ J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah “*Media Online: Pembaca, Laba dan Etika; Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*”, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2011, hlm. 38-39

¹¹ Wahyunanda Kusuma, “*Penetrasi Internet di Indonesia Capai 64 Persen*”, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/02/20/14090017/penetrasi-internet-di-indonesia-capai-64-persen>, pada tanggal 7 Oktober 2020

¹² Daniel Susilo dan Eben Haezer, “Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Berita Pemberkasaan di Teks Media Daring”, dalam *Kawistara Volume 7 No. 1*, 2017, hlm. 42

¹³ Diah Wulandari, *Loc.cit*

¹⁴ Suatu industri yang didominasi oleh kaum laki-laki dari segi kuantitas (personalia) maupun kualitas (struktur organisasi dan manajemen kerja). *Ibid.*

*gatekeeping*¹⁵ guna memilah dan mengklasifikasikan informasi yang akan disampaikan apa adanya, diberikan ruang yang lebih besar atau bahkan yang disembunyikan. Pembahasan ini pun merujuk pada konsep *Agenda Setting*.

Gagasan yang disampaikan oleh Lippmann menjadi penyokong terhadap konsep tersebut dalam sebuah karyanya dengan judul "*The World Outside and The Picture in Our Heads*". Lippmann mencoba untuk menghadirkan terkait dengan perbandingan antara *the real world indicators* dengan bagaimana persepsi yang berkembang di masyarakat terhadap suatu isu. Merujuk pemikiran ini, dapat dikaitkan dengan berita, bahwa terdapat dua syarat yang harus dimiliki yakni; pertama, kualitas baik dalam segi teknis ataupun etis; kedua, keselarasan dengan apa yang dikehendaki oleh publik.¹⁶ Dengan begitu, dalam perkembangan arus pemberitaan di media tak mengherankan jika banyak media yang memanfaatkan poin kedua dari syarat berita sebagai dalih yang mendasari fokus pertahanan eksistensinya dan disinilah isu gender menjadi suatu komoditas yang diperjualbelikan untuk menempatkan perempuan dalam koridor pemberitaan tertentu yang mengundang minat khalayak.

Surabaya dan Jawa Timur merupakan wilayah dalam lingkup yang sama dengan memiliki kepala daerah perempuan. Merujuk fakta tersebut, menjadikan hal menarik untuk melihat bagaimana dinamika yang dialami oleh kepala daerah yang diperankan oleh perempuan yang memiliki banyak tekanan dari sisi stigma yang

¹⁵ Gatekeeping secara harfiah berarti penjagaan gerbang yang berarti bahwa redaktur media memiliki fungsi untuk menyaring, menyeleksi dan menentukan kelayakan berita. Iwan Awaluddin Yusuf, "Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 7 Nomor 3, 2004, hlm. 353

¹⁶ Lippmann Walter, "*Public Opinion*", diakses dari <http://www.gutenberg.org/etext/6456>, pada tanggal 8 Oktober 2020.

berkembang di masyarakat. Khofifah Indar Parawansa (yang selanjutnya akan disebut Khofifah) menjadi Gubernur Jawa Timur terpilih pada periode 2018-2023 dengan Tri Rismaharini (yang selanjutnya akan disebut Risma) merupakan Walikota Surabaya periode 2016-2021 menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Hal ini dikarenakan bahwa kedua sosok tersebut menjadi sorotan publik selama ini. Terlebih pada hari Jum'at, 29 Mei 2020 di malam hari, keduanya sempat menjadi *trending topic* di platform media sosial Twitter. Hal ini dikarenakan keduanya

diisukan saling bersinggungan satu sama lain. Diperkuat dengan beredarnya video Risma yang tersulut emosi akibat adanya sabotase mobil laboratorium *Polymerase Chain Reaction* atau yang kerap disebut mobil PCR. Dalam video tersebut terlihat bahwa Risma bahkan menunjukkan amarahnya secara terang-terangan melalui via telepon dan menunjukkan bukti pesan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan salah satu pegawai Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Adapun yang membuat amarah Risma tersulut ini dikarenakan mobil PCR yang sudah dijanjikan untuk masyarakat Surabaya yang direncanakan untuk dilakukannya Test Swab¹⁷ pada hari Jum'at, 29 Mei 2020 di halaman Gedung Sipla Jalan Tunjungan dan Tanah Kali Kedinding, Surabaya. Namun, rencana tersebut gagal dikarenakan mobil PCR yang ditugaskan justru dialihkan ke daerah Tulungagung dan Lamongan.

Akibat adanya fenomena ini, banyak yang menyangkutpautkan kecemburuan Khofifah tentang citra yang lekat di diri Risma. Isu-isu alasan mengapa keduanya

¹⁷ Test yang dilakukan pada nasofaring dan atau orofaring dengan cara mengusap rongga nasofaring dan atau orofaring menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Hasil dari test ini jika didapatkan hasil positif menunjukkan bahwa orang tersebut terkena Covid-19. Diakses dari <https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapidtest/#:~:text=Swab%20adalah%20cara%20untuk%20memperoleh,singkatan%20dari%20polimerase%20chain%20reaction/>, pada tanggal 8 Oktober 2020.

berseteru menjadi sasaran empuk bagi media untuk menyasar objek dan mengkonstruksikannya sesuai yang diinginkan.

Membicarakan tentang dinamika pemberitaan Khofifah dan Risma sebetulnya sudah bukan bermula pada fase ketika nama keduanya menjadi *trending topics* di Twitter. Dalam perkembangan arus pertumbuhan Covid-19¹⁸, nama keduanya semakin menjadi sorotan publik ketika salah satu dokter menyuarakan kritikan terhadap Khofifah dan Risma pasca digelarnya kesenian dalam acara peresmian Alon-Alon Surabaya pada tanggal 17 Agustus 2020. Sementara untuk acara keseniannya diselenggarakan sejak tanggal 15 Agustus 2020 hingga tanggal 19 Agustus 2020. Hal ini dikarenakan atas dasar bahwa pemerintah telah menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan di mana salah satunya merujuk pada dilarang adanya sebuah kerumunan, namun yang terjadi justru pemerintah daerah yang menyebabkan kerumunan itu sendiri. Sejak saat inilah publik terus menyoroti Khofifah maupun Risma terkait upayanya dalam menangani kasus Covid-19 ini. Di lain sisi, fenomena ini menjadi sebuah kesempatan bagi media untuk turut “menjual” nama keduanya agar publik mengakses portal berita milik mereka.

Fenomena tersebut setidaknya menjadi gambaran bahwa memang banyak media yang menempatkan perempuan sebagai objek komoditas dan menjadikan media tersebut serat akan sensitivitas gender. Dalam penelitian milik T. Titi Widaningsih (1999) yang berjudul “Orientasi Pemberitaan Media Massa Nasional

¹⁸ Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang area pernafasan yang ditularkan melalui droplet (percikan air liur) orang yang terkonfirmasi. Diakses dari <https://who.int/>, pada tanggal 9 Oktober 2020.

dalam Isu Perempuan sebagai Pemimpin Politik” dengan objek harian Kompas dan Rakyat Merdeka menyatakan bahwa isu pemimpin perempuan masih belum memiliki porsi yang strategis di kedua media tersebut. Hal ini dikarenakan kedua media tersebut cenderung menyajikan sumber berita yang didominasi dari pihak laki-laki. Lebih lanjut, Widaningsih menyatakan bahwa salah satu faktor rendahnya sensitivitas gender ialah kuantitas dari jurnalis perempuan di suatu perusahaan media. Dari kedua media tersebut, jumlah jurnalis perempuan masih berada di bawah angka 20%. Bahkan dari jumlah pimpinan redaksi, posisi perempuan yang menempati di kursi pimpinan redaksi kurang dari 15%. Dengan indikasi tidak adanya sensitivitas gender yang dimiliki, kemudian dapat diklasifikasikan bahwa orientasi yang dimiliki kedua media tersebut adalah dari segi keuntungan atau *profit-oriented*.¹⁹

Sementara itu, Iwan Awaluddin Yusuf (2004) dalam karyanya yang berjudul “Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme” membahas mengenai posisi yang dimiliki perempuan akibat konstruksi media dalam sebuah pemberitaan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pemberitaan mengenai perempuan akan dikaitkan dengan bagaimana tubuh yang kemudian menjadi ajang eksploitasi oleh produk-produk hasil dari budaya patriarki. Hasil ini didapatkan dengan melihat posisi perempuan melalui metode semiotik dalam memberikan makna terhadap simbol yang erat dengan feminitas. Adapun contoh dari produk dari konstruksi yang disajikan oleh media ialah; (1) Pemberitaan Inul Darasista

¹⁹ T. Titi Widaningsih, “Orientasi pemberitaan media massa nasional dalam isu perempuan sebagai pemimpin politik”, Tesis Universitas Indonesia, 1999.

yang selalu menonjolkan bagian tubuh pinggul dan paha karena dijuluki “Ratu Ngebor”. (2) Pemberitaan terkait operasi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang hanya difokuskan kepada perempuan yang berprofesi sebagai PSK saja seolah melupakan terdapat peran laki-laki yang juga sebagai pelaku prostitusi. (3) Judul berita yang berbunyi “Digagahi Bertiga di Gubuk Sekitar Pemancingan” yang menjadikan perempuan sebagai korban perkosaan sementara pelaku pemerkosaan ditempatkan sebagai sosok jantan yang gagah dan bertanggungjawab karena menggunakan kata “Digagahi”. Sementara untuk kata “Bertiga” menunjukkan bahwa adanya kewajiban ketika perempuan dikerangkeng dalam kuasa laki-laki, dalam konteks ini mengkonstruksikan terkait pemerkosaan beramai-ramai.

Seolah menyambung dari bahasan milik Yusuf, Diah Wulandari (2010) dalam “Konstruksi Pemberitaan Ber-isu Gender” melihat perempuan sebagai objek yang tidak memiliki kuasa lebih untuk bersuara. Dengan mengadopsi *Muted-Group Theory*, Wulandari (2010) meneliti bagaimana pemberitaan yang masih didominasi oleh etos politik dan budaya patriarki. Gagasan ini didapatkan dari pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1996) tentang *Social Construction of Reality Theory*. Mereka berpandangan bahwa proses konstruksi realitas sebagai upaya mengkonseptualisasi atau menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi. Dalam teori ini, bahasa merupakan unsur utama dan menjadi instrumen utama dalam proses menceritakan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa bahasa menjadi sebuah alat untuk menarasikan dan mengkonseptualisasikan. Berangkat dari pemikiran ini, Wulandari (2010) mengangkat bahwa media memegang peran strategis dalam menciptakan sebuah penggambaran terkait isu-isu yang

berkembang, dalam konteks ini terkait dengan isu gender. Dipadukan dengan *Muted Group Theory*, Wulandari (2010) mencoba untuk menjelaskan bagaimana perempuan yang memegang peran sebagai kelompok minoritas dikonstruksikan oleh media sebagai pelaku utama dalam pengkonstruksian sebuah realita dengan budaya patriarki yang masih kental di industri media. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa dalam media Kompas; (1) framing maskulinitas muncul pada berita yang bertemakan tentang sistem politik, budaya politik dan juga partai politik. Sedangkan framing marginalisasi perempuan muncul pada berita dengan tema sosialisasi dan partisipasi politik. (2) labelisasi perempuan berdasarkan struktur skrip dan tematik yang terkandung ialah; politik belas kasihan, apatisisme politik, stereotipe perempuan dan hegemoni patriarki. Dalam struktur retorik didapat; stereotipe perempuan, annihilisasi simbolik serta hegemoni ideologi patriarki.²⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa media dalam mengkonstruksikan perempuan berawal dari peran yang erat dimiliki oleh perempuan itu sendiri; lemah, minoritas dan tak bersuara. Lalu, bagaimana jika terdapat perempuan dengan peran strategis berada di genggamannya? Apakah media masih mengkonstruksikan perempuan dengan peran tersebut dengan tetap diindikasikan budaya patriarki-nya? Dengan menjadikan fenomena yang terjadi antara Khofifah dan Risma, diharapkan mampu untuk mengelaborasi sekaligus menemukan sebuah indikasi baru dalam produksi berita yang dilakukan oleh media.

²⁰ Diah Wulandari, "Konstruksi Pemberitaan Politik Ber-isu Gender", dalam *Jurnal Interaksi*, 2010, hlm. 32.

Merujuk dalam pemikiran tersebut, menjadikan ketertarikan tersendiri karena objek yang diteliti merupakan perempuan yang memang memiliki peran strategis dalam politik praktis. Mengingat bahwa objek penelitian pada Wulandari (2010) menasar pada para perempuan yang memang tidak memiliki posisi yang kuat untuk menyerukan suaranya. Kemudian, diperkuat dengan regulasi yang memang sudah semakin memperkuat peran perempuan dalam bersuara. Hal ini menjadi landasan kuat atas penelitian terkait bagaimana media dalam mengkonstruksi perempuan yang memang memiliki peran strategis.

Jawa Pos merupakan perusahaan salah satu korporasi besar yang telah menguasai dunia perbisnisan pada bidang media di Indonesia. Dalam sebuah jurnal karya Lintang Citra Christiani yang berjudul “Spasialisasi Grup Media Jawa Pos” menemukan bahwa Grup Jawa Pos (GJP) memuat kepentingan-kepentingan tertentu yang didapatkan dari bagaimana penyebaran kepemilikan modal dan produksi media yang berorientasi pada *market*.²¹ Dengan begitu, terdapat sebuah indikasi bahwa media juga berkemungkinan memiliki sebuah kepentingan yang tidak murni dalam penyampaian informasi. Padahal, masyarakat bertumpu pada sebuah media untuk mendapatkan suatu informasi. Merujuk fakta demikian, dengan diadakannya pemberitaan online yang dipublikasikan oleh Jawa Pos sebagai objek penelitian, peneliti meyakini bahwa hasil penelitian ini mampu mengelaborasi bagaimana dinamika yang ada.

²¹ Lintang Citra Christiani, “Spasialisasi Grup Media Jawa Pos”, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 200.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang permasalahan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan berangkat dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana media Jawapos.com dalam mengkonstruksi konflik antara Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19 melalui pemberitaan online dengan membandingkan pemberitaan konflik Ridwan Kamil dan Mahfud MD?
2. Bagaimana tahapan media Jawapos.com dalam produksi berita terkait isu konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19?
3. Bagaimana perspektif gender yang dimiliki oleh Jawapos.com dalam mempengaruhi produksi berita terkait isu konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana media Jawa Pos dalam mengkonstruksi konflik antara Khofifah dan Risma.
2. Untuk mengetahui tahapan Jawa Pos dalam memproduksi berita terkait konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19.
3. Untuk mengetahui perspektif gender yang dimiliki Jawapos.com dalam mempengaruhi produksi berita terkait konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19.

1.4 Manfaat

Sementara dari segi substansi yang terkandung dalam penelitian ini, diharapkan agar mampu menghadirkan beberapa manfaat, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan perspektif baru guna turut berkontribusi dalam perkembangan kajian Ilmu Politik khususnya terkait framing media.
2. Dapat menjadi suatu peluang dalam lahirnya fokus-fokus kajian lain yang serumpun dan lebih mendalam

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Brawijaya

Dapat menjadi sebuah tambahan dalam referensi bacaan yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca terkait studi ilmu politik dan berbagai macam fenomena yang ada.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi sebuah tambahan ilmu pengetahuan terkait hasil penelitian yang ada sehingga menumbuhkembangkan sebuah inovasi ketika melihat celah dalam penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sebuah pengingat dan penjelasan terkait bagaimana sejatinya krusialnya peran media yang menjadi satu-satunya akses dalam penerimaan sumber informasi sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima segala macam informasi dan tidak menelan mentah-mentah.

d. Bagi Penulis

Dapat menjadi sebuah batu loncatan bagi kemampuan penulis dan sebagai bahan intropeksi diri agar bisa semakin mengembangkan kualitas diri penulis di kemudian hari dalam suatu penelitian mendatang.

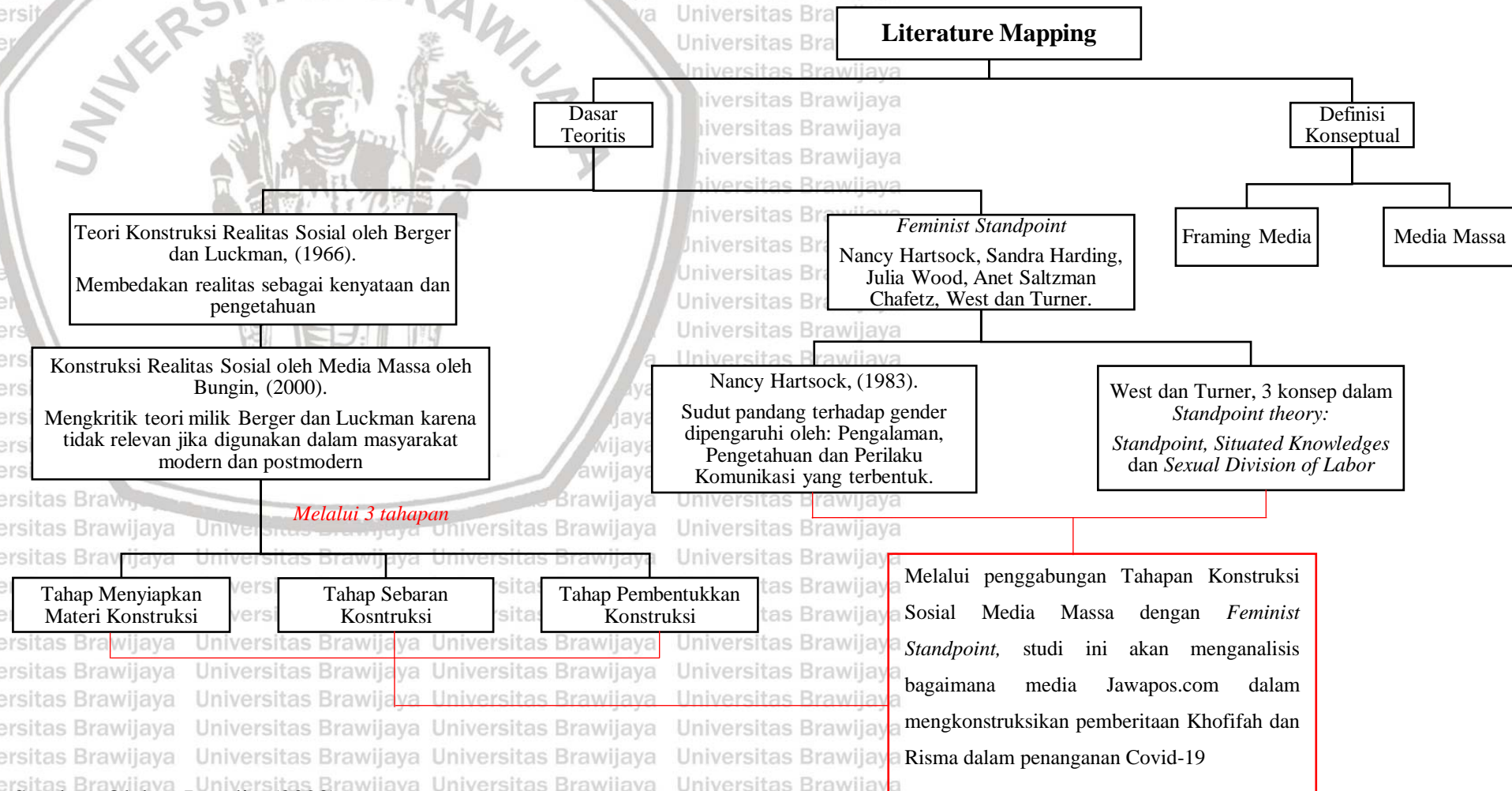


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian kualitatif, teori dianalogikan sebagai sebuah pisau analisis untuk mengupas suatu fenomena. Pada bab ini akan memuat beberapa konsep sebagai alat dalam mengelaborasi alur pembahasan terkait objek penelitian yang ada. Guna mempermudah pemahaman, bab ini akan diklasifikasikan menjadi tiga bagian untuk memperoleh penjelasan terkait dasar yang digunakan dalam memperkokoh konstruksi penelitian ini.

Pada bagian pertama, berisikan dasar teoritis dan definisi konseptual yang digunakan sebagai pendekatan dalam melihat fenomena yang diangkat. Klasifikasi pertama ini penulis akan menggunakan Paradigma Konstruktivisme dan Teori Konstruksi Realitas Sosial Media Massa dipadukan dengan Pendekatan Gender dalam Media yang terbungkus dalam pembahasan kajian *Feminist Standpoint*. Untuk bagian kedua akan mengulas terkait dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dan mengkomparasikan dengan penelitian ini sehingga akan menghadirkan sebuah *novelty* (kebaruan) sekaligus *state of the arts* (orisinalitas) yang dimiliki oleh penelitian ini. Sementara untuk bagian ketiga, penulis akan menghadirkan kerangka berfikir guna menggambarkan alur pemikiran penulis yang disajikan dalam bentuk diagram/ bagan. Namun, sebelum memasuki pembahasan secara mendalam terkait ketiga bagian tersebut, berikut akan disajikan sebuah diagram *Literature Mapping* dari penelitian ini:



Sumber: Olahan Penulis, (2020).

2.1 Dasar Teoritis

Dalam bagan *literature mapping* yang telah penulis rangkai, tertuang secara singkat bagaimana alur perspektif teori yang digunakan oleh penulis. Dengan menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme dan pendekatan gender, penulis menggunakan teori konstruksi realitas sosial media massa dan *feminist standpoint* untuk menjadi landasan eksplorasi pembahasan yang akan penulis sajikan yang berpotensi sebagai pengembangan teori yang ada.

2.1.1 Konstruksi Realitas Media Massa

Burhan Bungin (2000) melalui disertasinya yang berjudul “*Konstruksi Sosial Media Massa: Realitas Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*” menawarkan sebuah solusi atas kekurangan dari teori Berger dan Luckman di mana pendekatan yang dimiliki akan mengalami sebuah kemandulan atau ketumpulan dalam melihat perubahan masyarakat modern dan postmodern. Teori Berger dan Luckman (1963) hanya berbasis pada masyarakat transisi-modern Amerika tahun 1960-an.²²

Buah pemikiran Peter Ludwing Berger dan Thomas Luckman (1963) di kemas dalam sebuah karya yang berjudul “*The Social Construction of Reality*” pada tahun 1966. Secara historis, lahirnya teori konstruksi realitas sosial milik Berger dan Luckman ini berkaitan dengan perkembangan logika positivistik dan fenomenologi. Berikut akan disajikan intisari dari setiap pemikiran secara singkat:

²² Burhan Bungin, “*Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan, Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.

Tabel 2.1
Intisari Pemikiran Logika Positivistik, Fenomologi dan Konstruksi Realitas Sosial

Logika Positivistik	Fenomologi	Teori Konstruksi Realitas Sosial
Berpandangan bahwa sebuah kepastian atas kenyataan diperoleh hanya melalui metodologi inverstigasi yang bergantung pada data empiris hasil kuantitatif	Menyangkal dengan berpandangan bahwa apa yang memang diketahui terdiri dari bagaimana suatu kesan dipengaruhi oleh faktor internal	Mengembangkan sebuah klasifikasi dalam mendefinisikan kenyataan; “kenyataan subjektif” dan “kenyataan objektif”
Berfokus pada hal-hal yang “nampak” yang bisa ditangkap oleh indera	Berfokus pada esensi yang tidak selalu tertangkap oleh indera	Mengkonsepsikan fokus pada esensi sebagai sosialisasi pengetahuan. Dengan membedakan realitas sebagai kenyataan dan pengetahuan

Sumber: Dharma (2018), diolah. (2020)

Dari pemaparan tabel tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori konstruksi realitas sosial ini merupakan hasil dari pengembangan pandangan fenomologi yang mengkritisi bagaimana logika positivistik berpandangan. Dalam melihat bagaimana realitas yang ada, pandangan Berger dipengaruhi oleh tradisi fenomologi Edmund Husserl dan Alfred Schtuz.²³ Husserl dengan lantang menolak bagaimana hadirnya penjelasan terkait logika-logika formal, yang diperkuat dengan Schtuz yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan berasal dari bagaimana *everyday life* berkembang bukan sebatas dari pengetahuan yang di dapatkan dalam lingkup formal.²⁴

Dalam pembahasannya, teori ini memiliki beberapa asumsi, yakni: *pertama*, realitas merupakan sebuah hasil dari apa yang diciptakan oleh kreativitas manusia

²³ Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial”, dalam *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7:1, 2018, hlm. 4

²⁴ *Ibid.*

tentang bagaimana dunia sosial di sekitarnya melalui kekuatan konstruksi sosial yang dimiliki. *Kedua*, sifat yang terbentuk dari hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial yang menjadi lahirnya sebuah pemikiran ialah berkembang dan dilembagakan. *Ketiga*, konstruksi kehidupan masyarakat berjalan secara terus-menerus. *Keempat*, menekankan perbedaan dari sebuah realitas dan pengetahuan. Jika realitas merupakan sebuah kualitas yang ada di dalam sebuah kenyataan dan diakui sebagai suatu keberadaan yang tidak bergantung pada kehendak suatu individu, maka pengetahuan diartikan sebagai suatu kepastian tentang realitas-realitas yang ada yang dianggap nyata dan berkarakteristik yang spesifik.

Jika substansi yang dimiliki oleh teori Berger dan Luckman (1963) merujuk pada suatu proses simultan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari komunitas primer dan semisekunder secara alami melalui bahasa, maka substansi yang dimiliki oleh teori Bungin (2000) ialah terletak pada sirkulasi informasi yang terjadi dengan cepat dan luas sehingga proses konstruksi sosial dapat terjadi secara cepat dan merata penyebarannya.²⁵ Teori milik Bungin (2000) berporos pada posisi media massa yang ditempatkan sebagai pusat pengaruh bagaimana realitas sosial yang tercipta.

Sejatinya makna media massa pun dapat diartikan beragam. Bagi kalangan atas atau *dominant class*, seperti para tokoh, pemuka masyarakat atau pemilik modal, media massa merupakan sebuah infrastruktur kekuasaan. Di mana selalu adanya keterlibatan dari kalangan-kalangan tersebut karena kekuasaan yang

²⁵ Burhan Bungin, "Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat", Jakarta: Kencana, 2006, hlm.

dimiliki terhadap output yang dihasilkan oleh media, seperti kebijakan, regulasi dan sebagainya. Sementara bagi kalangan masyarakat, atau *subordinate class* media massa merupakan sebuah alat kontrol sosial dan perubahan. Melihat bagaimana peran media massa di masing-masing kalangan, media massa dihadapkan benturan dari berbagai kalangan yang ada untuk memproses bagaimana fungsinya.

Adapun tahapan yang dilakukan media massa dalam membentuk sebuah realitas sebagai berikut:

1. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Pada tahapan yang pertama berada di ranah seorang redaksi yang kemudian didistribusikan pada desk editor. Desk yang dimiliki oleh tiap-tiap media berbeda, tergantung bagaimana kebutuhan dan visi yang dimiliki oleh media tersebut. Namun, terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama dari media untuk mengangkat suatu isu, yakni: harta, kedudukan (tahta) dan perempuan.²⁶ Isu harta merujuk pada polemik terkait kemewahan yang juga termasuk korupsi yang memang menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia. Isu kedudukan terkait jabatan, pejabat, birokrat dan kinerjanya dan layanan publik. Sementara untuk problematika isu perempuan terkait aurat, fisik perempuan dan aktivitasnya terutama yang berhubungan dengan harta dan kekuasaan.

Adapun tiga hal penting yang dibutuhkan dalam proses penyiapan materi terkait konstruksi realitas sosial,²⁷ yakni: *pertama*, keberpihakan media massa

²⁶ Puji Santoso, "Konstruksi Sosial Media", dalam *Al-Balagh Vol. 1 No. 1*, 2016 hlm. 34

²⁷ *Ibid.* hlm. 35

terhadap kapitalisme. Tidak dapat dipungkiri, aspek kapitalisme saat ini sudah menguasai media sehingga fokus media saat ini kebanyakan pada *profit-oriented*. *Kedua*, keberpihakan semu media terhadap masyarakat. Dalam arti, bagaimana media melandaskan faktor empati dan simpatinya kepada masyarakat dalam memproduksi sebuah publikasi. *Ketiga*, keberpihakan media terhadap kepentingan umum. Visi media pasti menjadikan kepentingan umum sebagai fokus mereka, namun dari ketiga poin penting tersebut, tetaplh yang mendasari bagaimana arah yang dianut media akan tetap dilandaskan bagaimana kapitalisme dan kekuasaan itu ada di diri media.

2. Tahapan Sebaran Konstruksi

Pada tahap ini bergantung pada bagaimana strategi yang dimiliki oleh masing-masing media massa. Sama halnya dengan desk yang dimiliki oleh masing-masing media massa, strategi pun juga berbeda dari satu media ke media yang lain. Namun, dasarnya prinsip utama yang dimiliki oleh para media massa ini ialah *real time*.²⁸ Yakni, terkait waktu untuk menyampaikan pemberitaan kepada pemirsa.

Dalam asumsi media elektronik, konsep *real time* ini berarti pada saat itu juga berita disiarkan dan sampai ke telinga pemirsa. Sementara asumsi media cetak, terdiri dari beberapa konsep seperti terbitan harian, terbitan mingguan, terbitan beberapa mingguan dan terbitan bulanan. Dengan begitu, konsep *real time* ini

²⁸ *Ibid*, hlm. 36

ialah tidak selalu disiarkan saat itu juga, selama pembaca merasa tepat ketika memperoleh berita tersebut, itulah yang dimaksud konsep *real time*.

3. Tahap Pembentukan Konstruksi

Dalam tahap ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yakni **tahap pembentukan konstruksi realitas, tahap pembentukan konstruksi citra dan tahap konfirmasi.**

a. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

Pada tahap ini, diasumsikan bahwa pemberitaan telah dipublikasi dan dapat diakses oleh pembaca. Di dalamnya, terbagi lagi menjadi 3 (tiga) tahap dalam pembentukan konstruksi. *Pertama*, konstruksi media massa yang berbentuk sebuah membenaran yang didasarkan atas masyarakat cenderung selalu membenarkan dan menyerap langsung apa yang disajikan oleh media. *Kedua*, ketersediaan masyarakat atas konstruksi pikiran yang dilakukan oleh media massa. *Ketiga*, terciptanya sebuah habit untuk selalu mengkonsumsi media massa yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat.

b. Tahap Pembentukan Konstruksi Citra

Tahap ini sangat bergantung bagaimana kuasa yang dimiliki pekerja media dalam memproduksi sebuah berita. Di mana para pekerja yang bertugas sebagai redaksi media massa, seperti wartawan, editor hingga pimpinan redaksi. Hasil dari tahap ini diklasifikasikan menjadi dua model. Model yang pertama adalah *good news* di mana berita yang dihasilkan

tergolong dalam pemberitaan yang baik. Sementara, model kedua adalah *bad news* yang mengkonstruksikan sebagai pemberitaan buruk.

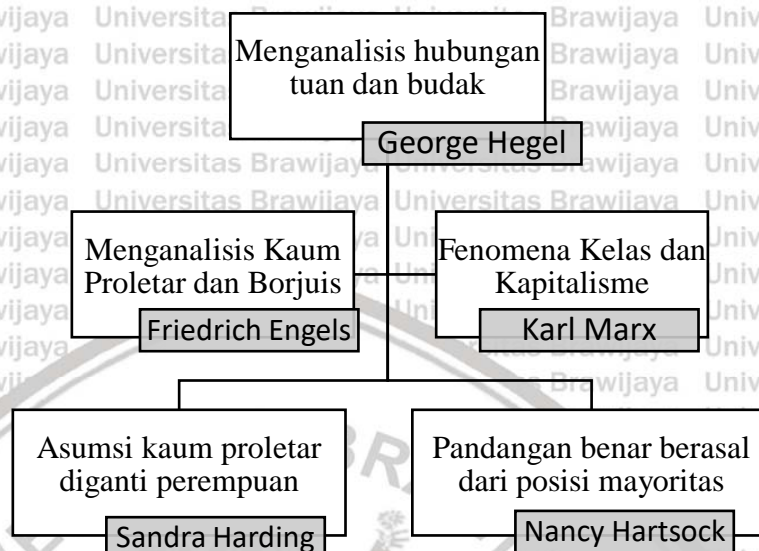
c. Tahap Konfirmasi

Pada tahap ini merupakan tahap pemberian sebuah argumentasi akan akuntabilitas pilihannya. Bagi media, tahap ini diperlukan untuk memberikan sebuah argumentasi alasan apa saja yang mendasari konstruksi yang terbentuk. Sementara bagi pembaca atau pemirsa, ditujukan untuk menjelaskan alasan apa saja yang mendasari atas keterlibatan dan ketersediaannya turut berkecimpung dalam proses konstruksi.

2.1.2 Feminist Standpoint Theory

Mengadopsi dari teori *Standpoint*, teori ini akan lebih spesifik untuk membahas salah satu sasaran utama bagaimana *standpoint* itu dimiliki dalam kaitannya dengan feminisme. Kata lain *standpoint* ialah *perspective*, *viewpoint*, *outlook* dan *position* atau dalam bahasa Indonesia bermakna sebuah pandangan yang dimiliki. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam, akan disajikan berupa bagan guna mempermudah dalam mendapatkan sebuah gambaran terkait bagaimana teori ini bermula:

Bagan 2.1 Silsilah Lahirnya Teori Feminist Standpoint



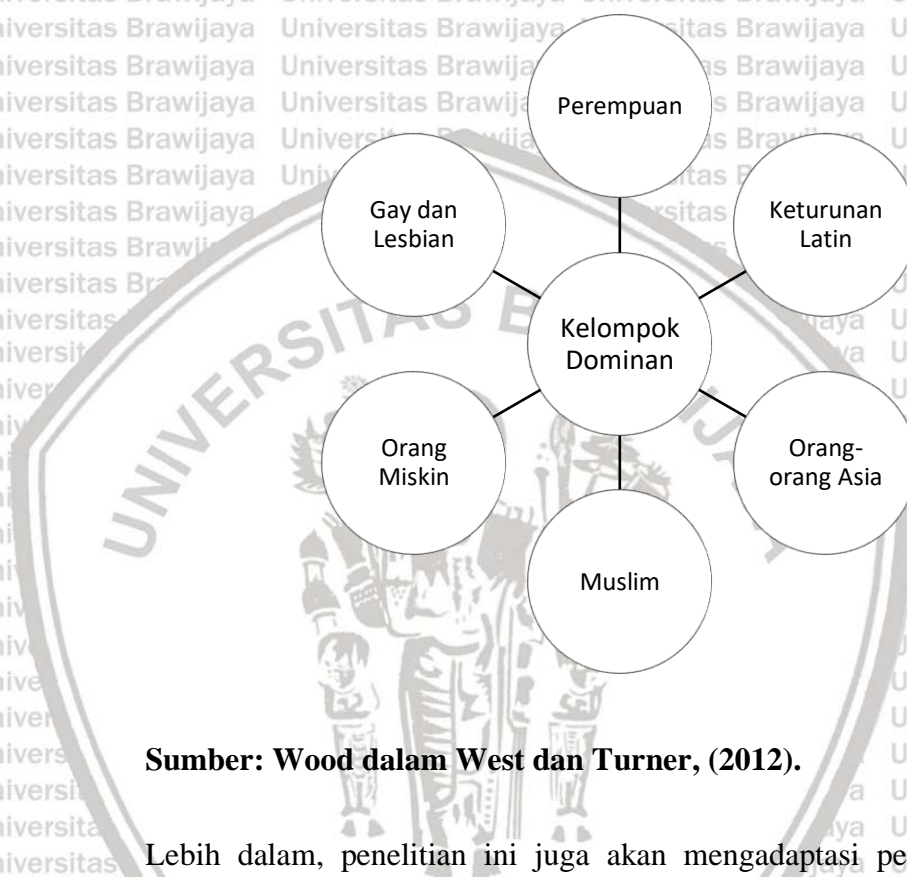
Sumber: Diolah Penulis, (2020).

Melihat bagan tersebut, dapat diketahui bahwa sejatinya akar dari teori ini ialah masih kental kaitannya dengan teori relasi tuan dan budak yang dikembangkan oleh Hegel. Bertumpu pada fokus kajian gender, teori ini memperkuat kajian terkait ketidakadilan yang kerap diterima oleh perempuan dengan mengadaptasi kajian terkait ketidakadilan sebagaimana telah dibahas oleh Hegel, Engels dan Marx.

Dalam pemikiran Wood dan Harding menyatakan bahwa untuk melihat bagaimana dunia berjalan salah satu cara terbaiknya ialah dilakukan melalui *standpoint* perempuan sebagai salah satu pihak yang termarginalkan. Adapun

cakupan yang diklasifikasikan oleh Wood dalam kelompok Teori *Standpoint* ini adalah:²⁹

Bagan 2.2
Cakupan Klasifikasi Kelompok Teori Standpoint



Sumber: Wood dalam West dan Turner, (2012).

Lebih dalam, penelitian ini juga akan mengadaptasi pemikiran Nancy Hartsock tepatnya pada 1983 silam dengan diterbitkannya "*The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism*". Dengan menggabungkan konsep Hegel terkait tuan dan budah dan Marx tentang kelas dan kapitalisme dan isu gender dan jenis kelamin. Walaupun kajian gender ini banyak alirannya, Hartsock meyakini bahwa akan selalu terdapat kesamaan pandangan yang dimiliki semua jenis aliran feminisme yakni bagaimana

²⁹ Richard West dan Lynn H. Turner, "*Introducing Communication Theory: Analysis and Application*", New York: Mc Graw Hill Education, 2010, hlm. 505

keinginan yang dimiliki untuk mendobrak posisi perempuan agar dapat melawan dominasi laki-laki. Dengan kata lain, teori ini merupakan sebuah kritik atas fenomena tersebut. Adanya pembeda yang berkembang dalam sebuah konstruksi sosial yang dianut masyarakat menghasilkan sebuah kaum yang termarginalkan hingga berakibat menyebabkan permasalahan yang kompleks di tatanan masyarakat.

Teori ini diyakini akan mampu memberikan titik awal dalam memahami dinamika yang dialami oleh perempuan dengan menghadirkan sebuah kerangka berpikir tentang sistem kekuasaan. Adapun asal muasal kerangka ini hadir atas dasar pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Dengan melihat pandangan yang dimiliki oleh kaum-kaum marginal, diyakini mampu memberikan sebuah pandangan yang lebih objektif dibandingkan pandangan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkuasa. Hal ini didasarkan bahwa yang berkuasa memiliki beragam kepentingan sementara yang termarginalkan hanya memiliki kepentingan untuk bebas dari ketidakadilan yang diciptakan oleh tatanan sosial itu sendiri.

2.1.2.1 Konsep Teori Standpoint

Berdasarkan konsep dari West dan Turner, terdapat 3 (tiga) konsep utama yang terkandung dalam teori ini; yakni *Standpoint*, *Situated Knowledges* dan *Sexual Division of Labor*. Secara rinci akan dielaborasikan berikut ini:

1. Konsep Standpoint

Dalam konsep ini memfokuskan bagaimana seseorang memposisikan diri dalam memandang terhadap objek. Titik dimana menjadi “lokasi” atau tempat asal seseorang dalam melihat objek inilah yang menjadi pusat bagaimana *standpoint* ini akan mendapatkan hasil. O’Brien Hallstein berpandangan bahwa *Standpoint* dapat diraih hanya ketika setelah lahirnya sebuah pemikiran, terjadinya sebuah interaksi dan perjuangan. Berbeda dengan perspektif yang memang terbentuk atas posisi seseorang dalam tatanan hierarki sosial.

Dalam konsep *standpoint*, terkandung juga konsep keikutsertaan yang diadaptasi oleh pemikiran Hartsock. Berpandangan bahwasanya di dalam proses *standpoint* tidak hanya memahami sebagai posisi yang diharapkan dan diinginkan melainkan adanya keikutsertaan dalam rasa diinginkan tersebut. Lebih jauh, Sandra Harding mendefinisikan bahwa *standpoint* ini bergantung pada di mana lokasi sosial yang dimiliki. Karena dari lokasi tersebut akan menentukan bagaimana posisi kehidupan sosial yang dimiliki terlihat oleh kelompok parsial.

2. Konsep Situated Knowledges

Mengadopsi pemikiran Donna Haraway dalam publikasi yang berjudul *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective*, konsep ini merujuk pada bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan konteks dan keadaan yang ada. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman-pengalaman

yang dimiliki yang berasal dari proses sebuah pembelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan tidak hanya lahir atas apa yang diperoleh secara materi yang terbungkus dalam sistem profesional, melainkan juga lahir atas hasil pembelajaran yang didapatkan dalam setiap pengalaman yang didapatkan.

3. Konsep *Sexual Division of Labor*

Konsep ini merujuk pada bahwa terdapat sebuah garis pemisah antara peran sosial yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran sosial ini terletak pada sektor publik dan sektor domestik. Di mana sektor publik menjadi milik laki-laki sementara perempuan berada di ranah domestik yang mana jika perempuan melanggar garis pemisah tersebut dengan memasuki ranah publik, perempuan akan mendapat banyak tekanan di dalamnya. Hal ini didasarkan atas bagaimana pandangan terhadap sektor publik yang dianggap sebagai aktivitas yang produktif sehingga selalu mendapat tempat untuk dihargai. Sebaliknya, ranah yang dimiliki perempuan selalu dipandang sebelah mata karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan.

2.1.2.2 Asumsi Teori Standpoint

Dalam pemikirannya, Hartsock mengembangkan 5 (lima) asumsi terkait kehidupan sosial yang ada, yakni:

“(1) Material life (or class position) structures and limits understandings of social relations. (2) When material life is structured in two opposing ways for two different groups, the understanding of each will be an inversion of the other. When there is a dominant and a subordinate group, the

understanding of the dominant group will be both partial and harmful. (3) The vision of the ruling group structures the material relations in which all groups are forced to participate. (4) The vision available to an oppressed group represent struggle and an achievement. (5) The potensial understanding of the oppressed (the standpoint) makes visible the inhumanity of the exiting relations among groups and moves us toward a better and more just world.”³⁰

Dari kelima asumsi tersebut menyatakan bahwa dalam tatanan kehidupan material, terdapat kelompok dominan yang memiliki sifat parsial dan merugikan.

Dengan visi untuk selalu berkuasa, kelompok dominan akan selalu memaksa kelompok bawahan agar menuruti kehendak mereka, pemaksaan untuk turut berpartisipasi guna mencapai keuntungan yang diharapkan oleh kelompok dominan. Paksaan ini yang menyebabkan kelompok bawahan tidak memiliki kuasa lebih untuk menyuarakan kehendak mereka. Karena, kelompok dominan telah memiliki apa yang tidak dimiliki oleh kelompok bawahan sehingga rasa “menindas” itu hadir untuk mempengaruhi sikap kelompok dominan. Dengan begitu, pandangan dan pemahaman kelompok bawahan memiliki sebuah potensi indikasi ketidakmanusiawian yang dimiliki oleh kelompok dominan mampu menggerakkan dunia.

Teori ini memang dianjurkan sebagai landasan untuk menyelidiki pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh kelompok bawahan atau kelompok yang terpinggirkan. Dengan menitikutamakan fokus pada sebuah pandangan yang dimiliki, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi sebuah perbedaan dalam setiap pandangan yang ditawarkan. Dengan demikian, teori ini juga dapat dikatakan tidak akan menyalahkan dan melihat mana yang benar dan mana yang salah, dikarenakan

³⁰ Ibid.

semua sudut pandang merupakan sebuah kebenaran yang dianut oleh masing-masing individu.

2.1.3 Definisi Konseptual

Sebagai pembatas antara konsep operasional yang digunakan, bagian ini akan menjelaskan konsep framing media dan media massa untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini.

2.1.3.1 Framing Media

Dalam perkembangan ilmu komunikasi, konsep framing digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses penyeleksian dan penyorotan terhadap aspek atau isu tertentu dalam realitas yang dikonstruksi oleh media. Kajian tentang framing media dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana ideologi yang dianut suatu media dengan cara menganalisis bagaimana cara bercerita media tersebut terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi.³¹ Selain itu, analisis framing juga dapat menjadi sebuah metode untuk melihat antara yang berkuasa dan yang dikendalikan, antara yang diuntungkan dan dirugikan juga siapa yang menindas dan siapa yang tertindas.³²

Terdapat 4 (empat) variabel sebagai pengaruh proses konstruksi bingkai dan realitas sosial dalam kajian framing media, yakni;³³ (1) Faktor politik atau orientasi ekonomi media, yakni bagaimana prinsip seorang wartawan dan pekerja media

³¹ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media", Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002, hlm. 10

³² Mulyana dalam Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*", Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002, hlm. xiv-xv

³³ Wicks dalam Kalbfleisch, 2005 hlm. 342

terhadap orientasi politiknya yang mempengaruhi hasil produksi tulisannya. (2) Praktek komunikasi dan batasannya. (3) Sistem kepercayaan yang dianut dalam jurnalistik media. (4) Teknik yang digunakan untuk menarik perhatian *audience*.

Dengan begitu, dalam penelitian ini penulis mengadopsi konsep analisis framing media milik Robert N. Entman dalam menganalisis fenomena terkait konstruksi media Jawa Pos dalam memberitakan konflik yang dialami antara Khofifah dan Risma. Bagi Entman, esensi framing ini meliputi proses penseleksian dan penonjolan yang dilakukan oleh media dalam proses pembuatan suatu teks berita. Dengan begitu, di dalam sebuah teks berita akan berisi terkait promosi suatu definisi permasalahan secara khusus, interpretasi kausal, pengevaluasian moral dan perekomendasi sebuah solusi jalan keluar.³⁴

Lebih rinci, berikut akan disajikan tabel terkait hubungan framing dengan realitas untuk mempermudah dalam mengambil sebuah benang merah dalam pembahasan ini.

Tabel 2.2

Tabel Hubungan antara framing dan Realitas

Aspek Framing	Makna yang Terkandung
Pemberitaan peristiwa tertentu	Kenapa terdapat peristiwa yang diberitakan sementara yang lain tidak? Kenapa peristiwa yang sama namun dengan tempat atau pihak yang berbeda tidak diberitakan?

³⁴ Hotman Siahaan dkk, "Pers yang Gamang Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur", Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001.

Aspek Framing	Makna yang Terkandung
Pendefinisian suatu realitas tertentu	Kenapa realitas didefinisikan seperti yang diberitakan?
Penyajian sisi tertentu	Kenapa terjadi penonjolan terhadap sisi tertentu sementara yang lain tidak?
Pemilihan fakta tertentu	Kenapa hanya fakta tertentu tersebut yang ditonjolkan sementara yang lain tidak?
Pemilihan narasumber tertentu	Kenapa harus narasumber tersebut bukan yang lain?

Sumber: Eriyanto, (2002).

2.1.3.2 Media Massa

Singkatnya, media massa merupakan sebuah sarana utama untuk memperoleh dan menyampaikan sebuah informasi. Dengan asumsi bahwa media massa ini merupakan sumber informasi yang seharusnya memuat berita yang netral. Namun, dalam perkembangannya akibat persaingan yang ketat, fokus utama perusahaan media ini akhirnya menuju pada informasi yang dikomersialkan. Hal ini diperkuat dengan banyaknya pimpinan dari perusahaan media yang berasal dari luar dunia jurnalisme sehingga kepekaan yang dimiliki akan tuntutan kebenaran informasi sangat minim.³⁵ Fakta ini kemudian berdampak ketidaknetralan informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

Menurut Brian McNair terdapat tiga pendekatan untuk menjelaskan substansi dari media yang ada, yakni; **pendekatan politik-ekonomi, pendekatan**

³⁵ Haryatmoko, “*Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*”, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 21

organisasi dan pendekatan kulturalis yang secara singkat akan dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Bagan 2.3
Pendekatan dalam Mendefinisikan Media



Sumber: Sudibyo (2001), diolah. (2020)

Dalam Pendekatan Ekonomi Politik memandang bahwa isi dari media ditentukan oleh kekuatan eksternal yang diluar pihak-pihak pengelola media. Kekuatan eksternal ini dapat berupa ekonomi dan politik yang berhubungan dengan faktor pemilik media, modal dan pendepatan media. Berbeda dengan pendekatan ekonomi politik, pendekatan organisasi memandang bahwa semua yang dihasilkan oleh media merupakan pengaruh dari faktor internal dari media itu sendiri, yakni piha-pihak yang berperan aktif dalam proses produksi berita dalam media tersebut. Dengan kata lain, apa yang dihasilkan oleh media bergantung dengan apa saja yang terjadi di dalam ruang redaksi. Sementara untuk pendekatan kulturalis, merupakan perpaduan dari dua pendekatan sebelumnya. Di mana apa yang dihasilkan oleh media merupakan hasil perpaduan dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian sama-sama menjadi hal yang mendasari pertimbangan dalam publikasi sebuah berita atau informasi oleh media.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metode dan Deskripsi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Diah Wulandari, (2010). <i>Konstruksi Pemberitaan Berisu Gender</i> , Tesis Universitas Diponegoro	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perempuan yang memegang peran sebagai kelompok minoritas dikonstruksikan oleh media sebagai pelaku utama dalam pengkonstruksian sebuah realita dengan budaya patriarki yang masih kental di industri media	Persamaannya sama-sama meneliti fenomena yang sama namun dengan fokus, metode dan perspektif teori yang berbeda. Walaupun memang sama-sama menggunakan teori konstruksi realitas sosial, namun dalam penelitian yang dimiliki penulis ini juga dipadukan dengan teori konstruksi realitas sosial media massa.
2.	Ika Putriana, (2012). <i>Peran Gender Perempuan Militer dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat Melati Pagar Bangsa</i> , Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 1 No. 1 hlm. 23-29	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak (2001). Penelitian ini menemukan bahwa produksi wacana peran gender dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat Melati Pagar Bangsa bahwa masih berada di bayang-bayang ideologi patriarkhi yang mendominasi.	Persamaannya yakni sama-sama meneliti fenomena yang sama dengan mengadopsi teori <i>feminist standpoint</i> namun fokus dan metode yang berbeda.
3.	Jazmyne E. Butler, (2013), <i>Professional First Ladies In the Media: Framing of Clinton, Bush and Obama In the</i>	Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis dan bantuan LexisNexis, Penelitian ini menemukan bahwa Washington Post mengutamakan penampilan	Persamaannya yakni sama-sama meneliti fenomena yang sama yakni media dan pemimpin politik perempuan. Namun, dengan

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metode dan Deskripsi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	<i>Washington Post</i> , Thesis University of Southern Mississippi.	fisik dan bagaimana gaya berbusananya.	metode yang berbeda.
4.	Sekar Harumningtyas, (2014). <i>Penggambaran Perempuan Melalui Bahasa Media Massa</i> , FISIP UI	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotika. Penelitian ini menemukan bahwa kebiasaan gender dalam media ini disebabkan posisi perempuan yang dianggap tidak setara karena pengaruh budaya patriarkhi.	Persamaannya yakni sama-sama meneliti fenomena yang sama, namun dengan fokus, metode dan teori yang berbeda.
5.	Jessica Andra Rhemrev, (2014). <i>Representasi Perempuan dalam Majalah Pria (Studi Gender, Subjektivitas dan Representasi)</i> , FISIP UI.	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan masih dikonstruksikan dengan menonjolkan sisi fisiknya. Di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam fokus penelitian ini,	Persamaannya yakni sama-sama meneliti fenomena yang sama dengan dipadukan teori <i>feminist standpoint</i> . Namun, fokus dan metode yang berbeda.
6.	Natasha L. Baker (2017), <i>The Framing of Hillary Clinton: A Content Analysis of Media Discourse on Clinton's Candidacy in the 2016 Election</i> , Thesis University of Dayton.	Menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana kritis, penelitian ini melihat bahwa media <i>New York Times</i> dan <i>Washington Post</i> dalam memberitakan Hillary Clinton selaku calon presiden perempuan pertama yang berasal dari partai politik besar di USA. Penelitian ini menemukan bahwa bahasa <i>gender-specific</i> digunakan untuk memprediksikan bagaimana kinerja sang pemimpin. Juga, menemukan bahwa pemberitaan terkait	Persamaannya terletak pada fenomena yang sama namun dengan fokus yang berbeda. Lebih lanjut, perbedaannya terletak pada penggunaan metode dan teknis analisis data. Sementara ini dari penelitian ini ialah untuk membandingkan bagaimana pemberitaan di dua

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metode dan Deskripsi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		pemimpin perempuan seputar tema; <i>Women in Leadership, Faithfulness and Weakness, Privacy and Caution and Credibility.</i>	media sekaligus. Sementara, penulis hanya fokus pada satu media.
7.	Nurkuta Hapsari, (2017), <i>Framing Women Politician in Democratic Environment: A Study of Megawati Soekarno Putri and Hillary Clinton</i> , dalam RUBIKON Vol. 4 No. 1, hlm. 11-29	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan dari delapan berita online di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun setinggi apapun prestasi yang diraih oleh perempuan, media dalam mengkonstruksikan Megawati dan Clinton masih seputar penampilan fisik dan asosiasi keluarga.	Persamaannya ialah sama-sama mengangkat fenomena yang sama, namun dengan fokus yang berbeda. Selain itu, pendekatan yang diusung ialah pendekatan sosio-histori. Perbedaannya terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis framing Van Dijk dikombinasikan dengan CDA.
8.	Catur Nugroho, (2018), <i>Relasi Kuasa Media dan Isu Gender dalam Program Televisi di Indonesia</i> , ProTVF Vol. 2 No.2, hlm. 111-126	Menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil menunjukkan bahwa alat penguasa dalam melanggengkan kuasanya yakni melalui bahasa dan penguasaan wacana. Dibuktikan bahwa isu gender disampaikan dengan keyakinan bahwa isu ini tidak perlu dirisaukan.	Persamaannya terletak pada tema penelitian yakni isu gender dalam media. Sementara perbedaannya terletak pada pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough dan teori yang digunakan yakni seputar media, kekuasaan dan ekonomi politik.
9.	Maudy Fitri Hutami dan	Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan	Persamaannya yakni mengangkat berita

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metode dan Deskripsi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Nuryah Asri Sjaifrah, (2018), <i>Framing Media Online Tribunnews.com terhadap Sosok Perempuan dalam Berita Video Pornografi Depok</i> , Kajian Jurnalisme Vol. 02 No. 01, hlm. 25-43	metode analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki, penelitian ini menghasilkan bahwa media online tribunnews.com dalam memberikan kasus pornografi Depok mengindikasikan bahwa media tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan privasi korban.	dari situs pemberitaan online dengan tema penelitian yang sama yakni perempuan dalam <i>framing</i> media. Perbedaananya terletak pada metode analisis data.
10.	Nila Puspitorukmi, (2019), <i>Konstruksi Feminisme dalam Media Sosial (Analisis Wacana Kritis tentang Feminisme pada Akun @magdaleneid di Instagram</i> , Skripsi UNS	Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills. Teknik yang digunakan ialah teknik pengumpulan sampel dengan <i>purposive sampling</i> . Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan akun instagram @magdaleneid, perempuan masih jarang diposisikan sebagai <i>headline</i> pemberitaan. Juga menunjukkan bahwa penempatan khalayak dijadikan sebagai posisi pembaca.	Menggunakan pendekatan yang sama, yakni feminisme. Namun, fenomena yang diangkat berbeda juga metode dan teknik pengumpulan datanya.

Sumber: Diolah penulis, (2020).

Berdasarkan hasil literatur *review*, studi framing media dengan isu gender ini pada umumnya masih seputar bagaimana perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang tidak berdaya dikarenakan memang tidak memiliki kuasa lebih untuk melakukan perlawanan. Hal ini selaras dengan penelitian milik Diah Wulandari

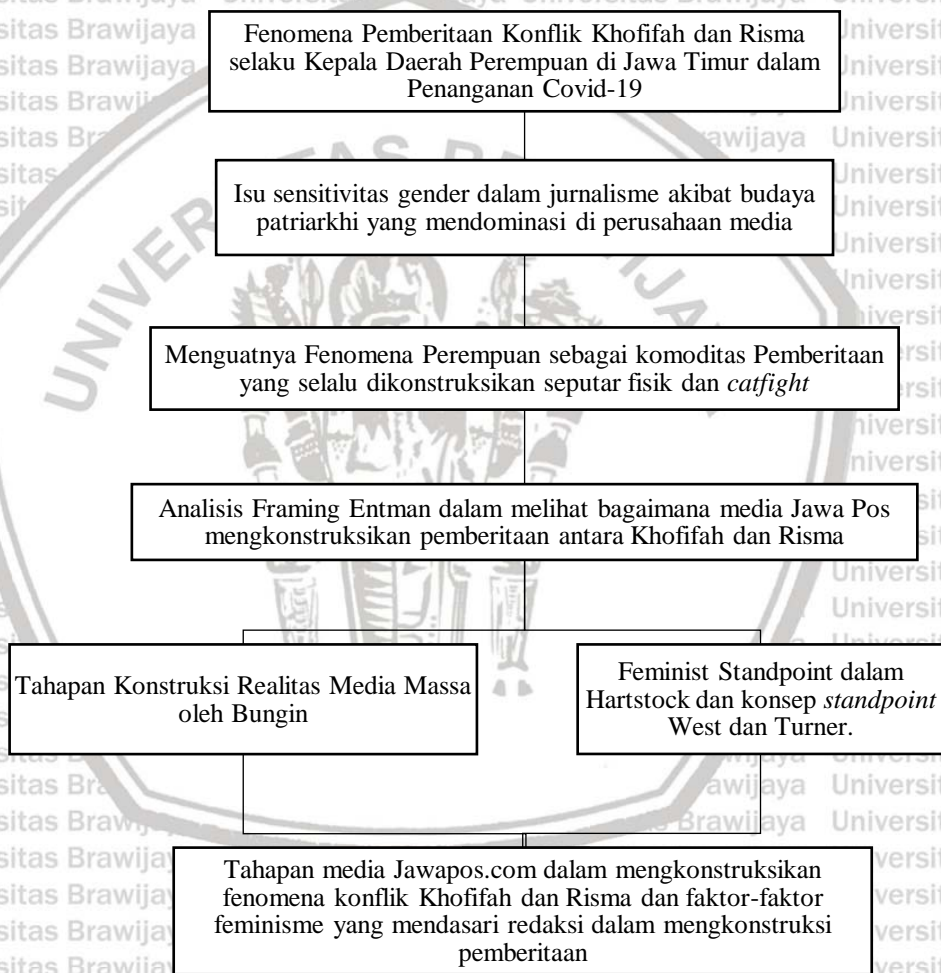
yang dipadukan dengan *Muted Group Theory* sebagai landasan untuk melihat posisi perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki suara untuk didengar. Namun, dalam penelitian ini menjadikan perempuan yang memiliki *power* sebagai objek yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar: *bagaimana kemudian media dalam memberitakan para perempuan yang memiliki kekuasaan? Apakah sama dengan pemberitaan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya?*

Dari sepuluh penelitian terdahulu yang telah dihimpun oleh penulis, dapat diketahui bahwa objek penelitian yang diambil terkait dengan isu gender dalam konstruksi media menghasilkan bahwa perempuan masih dijadikan sebagai objek yang dipandang rendah, dengan diwacanakan seputar fisik, busana dan asosiasi terhadap keluarga baik perempuan yang memiliki kuasa seperti Clinton, Bush, Obama dan Megawati hingga perempuan biasa dalam kasus pemerkosaan. Terlebih, wacana media terkait kepala daerah perempuan masih jarang ditemukan. Hal ini tidak menutup kemungkinan sedikitnya kajian tentang ini dikarenakan peran kepala daerah masih tetap didominasi oleh laki-laki, terlepas data KemenPPPA yang menyatakan terdapat peningkatan jumlah kepala daerah perempuan. Dipadukannya *Feminist Standpoint* dengan Tahapan Konstruksi Realitas Sosial Media Massa oleh Bungin yang memang masih jarang bahkan belum ada digunakan dalam penelitian terdahulu menjadi celah yang dapat ditawarkan dalam studi ini sebagai penegasan akan *state of the arts* dalam penelitian ini.

2.3 Alur Kerangka berpikir

Dihadirkan dalam bentuk bagan, alur kerangka berpikir ini ditujukan agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami bagaimana kerangka berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bagan 2.4
Bagan Alur Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis, 2020

Alur berpikir dalam penelitian ini bermula pada fenomena pertentangan Khofifah dan Risma yang disajikan oleh media terkait penanganan Covid-19 lebih tepatnya mobil PCR. Hal ini pun mengundang banyak opini yang beredar terbukti pada 29 Mei 2020 malam hari, nama Khofifah dan Risma menduduki *trending topics* di jejaring sosial media Twitter. Berangkat dari fenomena tersebut, menghadirkan sebuah pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana media dalam mengkonstruksi pemberitaan Khofifah dan Risma di mana nama keduanya secara tidak langsung sudah memiliki bobot sebagai komoditas yang komersial. Hal ini pun memperkuat alasan penulis tentang fenomena tersebut secara layak diangkat menjadi objek penelitian ini.

Sementara untuk objek penelitiannya, penulis memilih untuk menganalisis pemberitaan yang dipublikasikan di Jawapos.com. Jawapos.com merupakan salah satu bagian publikasi yang dimiliki perusahaan media ternama yakni Jawa Pos yang bertengger di peringkat lima dalam kategori pemberitaan online yang paling banyak di akses di Indonesia. Asumsi dari kerangka berpikir yakni hasil didapat melalui analisis framing Entman dalam melihat konstruksi pemberitaan oleh Jawapos.com dan dikomparasikan dengan teori konstruksi realitas sosial. Lebih detail, penulis juga akan menyasar bagaimana pertimbangan yang dilakukan beserta faktor apa saja yang mendasari redaktur Jawapos.com dalam mengkonstruksi pemberitaan tersebut, Kemudian, hasil wawancara ini akan dikomparasikan dengan teori Konstruksi Sosial Media dan *Feminist Standpoint*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jika kajian teori merupakan sebuah pisau analisis, metode ini bertugas sebagai teknik untuk mengupas sebuah fenomena yang akan dibahas. Maka dari itu, pada bab metode penelitian ini, penulis akan mencoba memberi gambaran mengenai pendekatan apa yang penulis gunakan guna menganalisis fenomena framing media terhadap kepala daerah perempuan, sumber data apa saja yang digunakan hingga bagaimana teknis pengumpulan data sebagai penunjang pengelaborasi penelitian ini.

3.1 Paradigma Penelitian

Layaknya sebuah kompas yang menjadi sebuah acuan dalam menempuh sebuah perjalanan, begitupula hadirnya sebuah paradigma dalam suatu penelitian. Penelitian akan hilang arah tanpa adanya sebuah paradigma. Dengan begitu, dalam penelitian ini akan menggunakan sebuah paradigma konstruksionisme guna menuntun dalam melihat alur pembahasan yang searah.

Dalam pandangan konstruksionisme memandang bahwa suatu realitas yang ada pada kehidupan sosial tidak bersifat natural melainkan hasil sebuah “konstruksi” atau dengan sengaja “dibentuk” dengan suatu tujuan tertentu. Hal ini selaras dengan pemikiran Berger yang menyatakan bahwa realitas bukanlah produk yang terbentuk secara ilmiah ataupun adanya campur tangan Tuhan. Melainkan realitas ada karena hasil dari proses konstruksi.³⁶ Dengan begitu, fokus analisis

³⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Loc.cit.*

yang terkandung dalam paradigma ini ialah menemukan bagaimana realitas itu dibentuk dan cara apa yang dipakai untuk mengkonstruksi realitas sesuai kehendak dan tujuan yang diinginkan.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menjadikan pendekatan gender sebagai pendekatan yang digunakan. Dalam perkembangan kajian mengenai gender, selalu terdapat kesalahpahaman dalam menempatkan makna gender itu sendiri. Walaupun jika diartikan dari asal tempat pengadopsiannya, gender memang bermakna jenis kelamin. Namun, sejatinya kajian gender ini lebih luas jika hanya disandingkan dengan pemahaman gender merupakan kajian terkait jenis kelamin manusia. Hal ini diperkuat dalam *Webster's News Dictionary* yang menerangkan bahwa gender merujuk pada perbedaan yang dapat dilihat antara laki-laki dan perempuan dari segi tingkah laku dan nilai.³⁷

Lebih jauh, Ritzer dan Goodman menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi pusat dari kajian gender. *Pertama* kajian gender terfokus pada situasi, kondisi dan pengalaman perempuan dalam tatanan masyarakat. *Kedua*, kajian terkait bagaimana sudut pandang perempuan terhadap dinamika kehidupan sosial dengan menempatkan perempuan pada peran sentral. *Ketiga*, merujuk pada kajian yang dikembangkan oleh para aktivis, pemikir kritis atau akademisi yang memperjuangkan ketidakadilan yang didapatkan oleh para perempuan guna

³⁷ Yoce Aliah Darma, "Analisis Wacana Kritis", Bandung: Yrama Widya, 2009

mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih layak dan lebih diterima oleh tatanan masyarakat.³⁸

Dari penjelasan tersebut didasarkan atas fakta bahwa memang perempuan berada di pihak yang selalu dipandang sebelah mata. Perempuan selalu dipandang sebagai pihak yang tidak lebih mampu dan layak dibanding laki-laki. Perempuan dianalogikan sebagai sosok yang lemah lembut, menonjolkan sisi emosionalnya, tidak berdaya sehingga dianggap tidak layak untuk mendapatkan perannya di publik. Berbeda dengan laki-laki yang seolah dilahirkan untuk mendominasi ruang-ruang publik. Padahal, apa yang erat tertanam di diri perempuan maupun laki-laki ini merupakan produk dari proses konstruksi yang berkembang di masyarakat. Di mana laki-laki selalu dikaitkan dengan sifat maskulinnya sementara perempuan dengan sifat femininnya secara mutlak. Padahal, tidak selalu berporos seperti itu. Tidak ada jaminan atas laki-laki selalu memiliki sisi feminin yang menonjol begitu juga sebaliknya.

Lahirnya pendekatan gender ini untuk mengkaji terkait permasalahan gender yang tidak berdasarkan pada kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia. Melainkan pada ketidakadilan yang didapatkan oleh manusia, dalam hal ini tentunya perempuan-lah yang mengalami banyak ketidakadilan akibat konstruksi sosial tersebut. Perempuan selalu dituntut untuk berada dalam peran sektor domestik sementara laki-laki pada sektor publik. Ketika perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya di dalam sektor publik, secara otomatis

³⁸ George Ritzer & Douglas J. Goodman, "Teori Sosiologi Modern", Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 403-404

perempuan akan mendapat tekanan dari lingkungannya. Atas konstruksi yang berkembang akan melahirkan sebuah stereotip gender, yang kemudian akan menimbulkan sebuah ketimpangan yang menyebabkan sebuah permasalahan yang kompleks.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai penunjang pembahasan yang akan penulis elaborasikan. Secara historis, metode penelitian kualitatif ini diharapkan mampu memberikan temuan penelitian yang dapat mengukuhkan teori dan memperkuat keyakinan kepercayaan yang dimiliki. Selain itu, metode ini ditujukan sebagai alternatif jika hasil temuan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.³⁹

Adapun fungsi dan manfaat penelitian kualitatif secara lebih rinci ialah; (1) menjadi sebuah alternatif dalam menjelaskan objek penelitian yang tidak terdefiniskan dengan baik dan sulit untuk dipahami; (2) cocok jika digunakan untuk memahami penelitian yang berkaitan dengan perilaku, motivasional dan konsultatif; (3) dapat membantu dalam memahami isu rumit terkait suatu proses dan isu rinci tentang situasi dan kondisi yang sedang dihadapi seseorang; (4) sebagai bahan evaluasi; (5) untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak mampu dijabarkan oleh penelitian kuantitatif; (6) untuk meneliti latar belakang

³⁹ Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Sukidin, "*Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*", Surabaya: Insan Cendikia, 2002, hlm. 1

objek penelitian; (7) untuk mendapatkan sebuah perspektif baru tentang segala hal yang ingin atau telah diketahui.⁴⁰

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi kunci dari tulisan ilmiah kualitatif yang berkembang. Pertama, penulis penelitian kualitatif dapat berisikan terkait laporan *meaning of events* dari pengamatan penulis. Laporan ini dapat berupa pengamatan terhadap kejadian, interaksi hingga keterlibatan partisipatif penulis dalam kegiatan observasinya.⁴¹ Kedua, peneliti dengan pola pikir induktifnya dapat menginterpretasikan hal khusus dan menarik dari berbagai kejadian di dalam kehidupannya maupun lingkungannya. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman bahwa metode kualitatif dapat menyajikan hal khusus dan unik yang terjadi dalam kehidupan.⁴²

Sementara untuk karakter yang dimiliki oleh metode ini ialah bahwa metode ini akan berupaya mengungkapkan suatu keunikan yang dimiliki individu, kelompok hingga masyarakat yang tidak menutup kemungkinan selanjutnya akan dijelaskan secara komprehensif dan rinci. Diharapkan, penelitian yang menggunakan metode ini dapat memberikan suatu penjelasan secara deskriptif tentang objek yang akan diteliti. Hingga menghasilkan suatu sudut pandang yang bulat, utuh, komprehensif dan holistik.

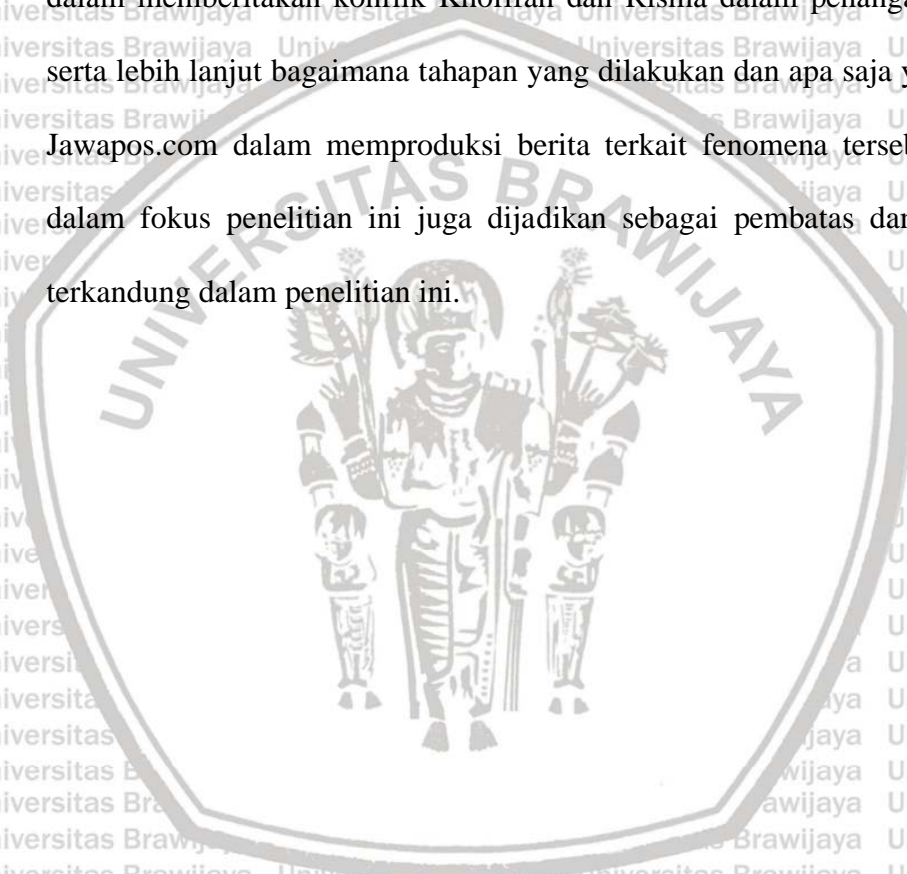
⁴⁰ Dr Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*", Bandung: Rosda, 2017.

⁴¹ Gorman dan Clayton dalam Septiawan Santana K, "*Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

⁴² Matthew B Miles dan Michael Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", Jakarta: UIP, 2014, hlm. 6-

3.3 Fokus Penelitian

Fokus utama yang terkandung dalam penelitian ini tentunya akan berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditentukan hingga pengumpulan data yang telah diolah dan dianalisis oleh penulis. Lebih tepatnya, penelitian ini akan fokus pada pembahasan dan pengelaborasi konstruksi yang diberikan Jawapos.com dalam memberitakan konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19, serta lebih lanjut bagaimana tahapan yang dilakukan dan apa saja yang mendasari Jawapos.com dalam memproduksi berita terkait fenomena tersebut. Selain itu, dalam fokus penelitian ini juga dijadikan sebagai pembatas dan limitasi yang terkandung dalam penelitian ini.



Tabel 3.1

Tabel Fokus Penelitian, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sub Tema Penelitian/ Fokus/ Jenis Data yang Dibutuhkan	Teori Analisis	Sumber Data	Metode Pengumpulan
Gambaran umum pemberitaan yang dipublikasikan oleh Jawapos.com terkait konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19.	Analisis Framing Media oleh Entman.	Berita dalam Jawapos.com.	<i>Tracing Media</i> , Studi Pustaka.
Tahapan redaksi Jawapos.com dalam memproduksi berita konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19.	Teori Konstruksi Realitas Sosial Media Massa Bungin.	Redaksi Jawapos.com	Wawancara, Data Arsip, Studi Pustaka dan <i>Tracing Media</i> .
Dasar-dasar pertimbangan gender oleh redaksi media Jawapos.com dalam produksi berita terkait.	<i>Feminist Standpoint</i> Hartsock, West dan Turner.	Redaksi Jawapos.com	Wawancara, Data Arsip, Studi Pustaka dan <i>Tracing Media</i> .

Sumber: Diolah oleh Penulis, (2020).

3.4 Sumber Data

Sumber data ialah berasal dari manakah data yang akan digunakan. Terbagi menjadi dua data, penelitian ini didukung oleh data berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari objek maupun subjek yang akan diteliti secara langsung. Sumber data ini dapat berupa hasil wawancara dan observasi. Namun, dalam penelitian ini, penulis menjadikan berita-berita yang dipublikasikan dalam Jawapos.com terkait konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19 dan juga dalam bentuk kolom opini yang turut dipublikasikan..

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap dan penunjang yang dibutuhkan dari data primer. Sumber data ini dapat berupa literatur, data arsip, dokumentasi hingga data yang diperoleh diluar sumber utama.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara secara mendalam. Adapun narasumber dari penelitian ini ialah Redaksi Jawapos.com

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni:

Teknik Pengumpulan Data Primer dan Teknik Pengumpulan Data Sekunder.

Dalam teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara dokumentasi.

⁴³ Husein Umar, "Metode Penulisan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Kedua", Jakarta: PT. Raja Grafinfor Persada, 2008, hlm. 42.

Sementara untuk teknis pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

3.5.1 Dokumentasi

Robert K. Yin menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan mengapa menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. *Pertama*, dokumen menjadi data tambahan yang ditujukan agar sebuah penulisan lebih spesifik. *Kedua*, menjadi panduan dalam membenarkan ejaan nama organisasi/ singkatan yang diperlukan dalam penulisan. *Ketiga*, digunakan sebagai inferensi.⁴⁴ Dalam penelitian ini, cara dokumentasi yang dilakukan lebih tepatnya dengan penyeleksian berita yang dipublikasikan di Jawapos.com sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini dalam kurun waktu 29-30 Mei 2020.

3.5.2 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

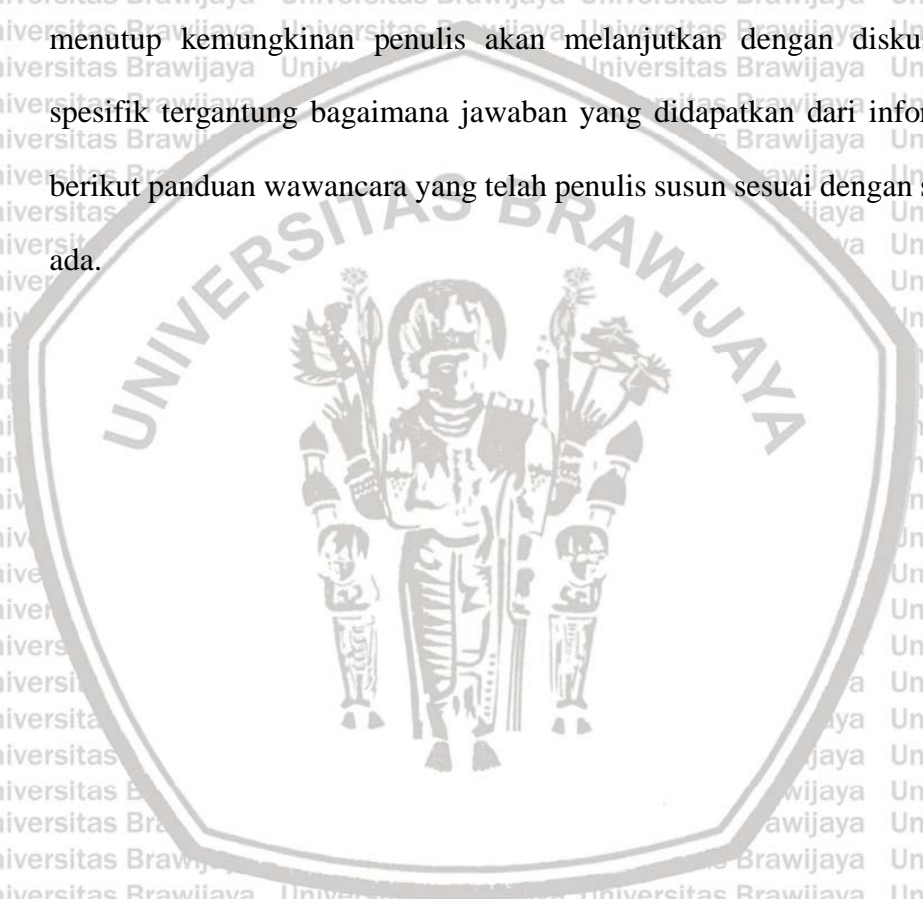
Guna lebih memperdalam penjelasan, penelitian ini selain menjadikan teks berita sebagai sumber utama data, juga menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai data sekunder yang menunjang proses elaborasi. Wawancara kualitatif ini memiliki sebuah tujuan untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain kemudian disampaikan melalui sebuah cerita yang telah disusun guna menjawab permasalahan terkait dengan penelitian.⁴⁵ Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan *in-depth interview* atau wawancara mendalam.

⁴⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain & Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 112

⁴⁵ Patton, 2002 hlm. 341

Sementara dalam metode *in-dept interview* terdiri dari *unstructured interviews* dan *semi-structured interviews*.⁴⁶

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada metode *semi-structured interview*. Di mana penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan sebagai pedoman utama ketika dilangsungkannya proses wawancara. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis akan melanjutkan dengan diskusi yang lebih spesifik tergantung bagaimana jawaban yang didapatkan dari informan. Adapun berikut panduan wawancara yang telah penulis susun sesuai dengan sub-tema yang ada.



⁴⁶ Agus Bandur, *Penulisan Kualitatif: Metodologi, Desain & Teknik Analisis Data dengan NVIVO10* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 113.

Tabel 3.2
Tabel Panduan Wawancara

No.	Rumusan Masalah	Sub Rumusan Masalah	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana tahapan Jawapos.com dalam mengkonstruksi pemberitaan konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19	Teknis produksi berita di Jawapos.com	a) Bagaimana proses mekanisme sebuah berita dapat dipublikasikan di Jawapos.com? b) Ketika berita telah ditangan redaksi, dan menurut redaksi telah layak, apakah berita tersebut sudah langsung dipublikasikan? c) Adakah faktor eksternal selain di ruangan redaktur dalam menentukan berita layak atau tidak?
2.	Hal apa saja yang mendasari redaksi dalam mengkonstruksi pemberitaan konflik Khofifah dan Risma dalam penanganan Covid-19	Latar belakang redaksi Jawapos.com	a) Bagaimana latar belakang pendidikan yang telah dilalui oleh redaksi? b) Bagaimana pengetahuan redaksi tentang gender? c) Bagaimana pandangan terhadap kasus Khofifah dan Risma?
		Faktor apa saja yang mendasari redaksi dalam memproduksi berita	a) Apa saja pertimbangan memilih narasumber? b) Apa saja pertimbangan yang mendasari standard yang dimiliki untuk suatu kelayakan berita? c) Bagaimana lingkungan kerja di Jawapos.com?

Sumber: Diolah penulis, 2020.

3.6 Teknik Perekrutan Informan

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik perekrutan informan dengan sistem narasumber yang telah ditetapkan. Dengan begitu, penulis menentukan

narasumber dalam penelitian ini ialah dari pihak perusahaan media Jawapos.com, yakni redaksi yang bekerja dan berhubungan langsung dengan produksi berita dengan tema yang terkait dengan penelitian ini. Adapun narasumbernya ialah untuk Informan kucingnya yakni Pak Ilham Safutra selaku Kepala Liputan Jawapos.com dan untuk informan tambahannya ialah Bu Nurul Adriyana Salbiah selaku asisten editor.

3.7 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, guna memperoleh penjelasan yang lebih kompleks dan rinci, penulis melakukan teknis analisis teks berita. Telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini akan menggunakan Analisis Framing milik Robert N. Entman⁴⁷. Entman mendefinisikan bahwa framing merupakan proses yang dijadikan sebagai seleksi dari banyaknya aspek realitas yang dibuat terkait dengan sebuah peristiwa.⁴⁸ Lebih lanjut, akan dihadirkan dalam sebuah tabel terkait dimensi framing menurut Entman.

Tabel 3.3
 Tabel Penjelasan Dimensi Framing Robert N. Entman

Dimensi	Definisi
Seleksi Isu	Berkaitan dengan bagaimana pemilihan fakta yang ditentukan dari banyaknya realitas yang tersedia. Terdapat bagian yang dimasukkan (<i>include</i>) sementara yang lain tidak (<i>exclude</i>).

⁴⁷ Seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar analisis framing untuk isi media. Dila Novita, "Konstruksi Media Dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi (Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum Kompas Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh)", dalam *Jurnal AKP Vol. 6 No. 2*, 2016, hlm. 83

⁴⁸ Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm" dala *Journal of Communication*, 1993, hlm 52.

Dimensi	Definisi
Penonjolan Aspek	Berkaitan dengan bagaimana teknis penulisan dalam penyajian sebuah fakta. Setelah dipilih isu apa yang akan diangkat, tahapan selanjutnya bagaimana aspek tersebut disajikan dan dapat dinikmati oleh pembaca. Dengan cara bagaimana pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra ditampilkan.

Sumber: Eriyanto, 2002, diolah penulis, (2020).

Melihat bagaimana dimensi tersebut, akan menimbulkan dua buah realitas; realitas yang sesungguhnya dan realitas media yang terbentuk.⁴⁹ Disinilah tujuan dari analisis framing itu ada yakni dapat membantu dalam mengetahui bagaimana realitas peristiwa yang sama namun dengan kemasan yang berbeda tergantung bagaimana wartawan mengkonstruksikannya. Konsepsi analisis framing yang ditawarkan oleh Entman ini pada dasarnya merujuk terkait pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan sebuah rekomendasi dalam sebuah wacana sebagai penekanan kerangka berpikir dalam suatu peristiwa yang diwacanakan.⁵⁰ Adapun penjelasan dari konsepsi Entman yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis objek dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

⁴⁹ James, Phillips dan Graham Murdock, 1980.

⁵⁰ Eriyanto, *Op.cit*, hlm 223-224

Tabel 3.4
Tabel Pertanyaan yang Terkandung dalam Framing Robert N. Entman

Konsepsi Framing	Pertanyaan yang Melatarbelakangi
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Perkiraan masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap penyebabnya? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Penekanan sebuah Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut? Jalan apa yang ditawarkan sebagai alternatif mengatasi masalah?

Sumber: Eryanto, (2002).

3.8 Waktu Penelitian

Guna membuat sebuah limitasi dari penelitian ini agar pembahasan yang dimuat tidak keluar dari jalur yang ditentukan maka penulis menetapkan untuk mengambil berita yang diterbitkan oleh Jawapos.com dari tanggal 29-31 Mei 2020 hingga. Hal ini didasarkan bahwa nama Khofifah dan Risma sudah mulai menjadi sorotan publik di mana nama mereka sempat bertengger menjadi *trending topics* di Twitter.

3.9 Pemilihan Media

Jawa Pos merupakan perusahaan media besar di Indonesia. Saat ini, di musim digitalisasi, proses pemberitaan secara digital lebih diutamakan karena mudahnya

pengaksesan. Hal ini diperkuat dengan data pendukung yang dapat disajikan ialah pengguna internet per tahun 2020 telah mencapai angka 17,54 juta dengan tingkat penetrasi mencapai angka 64%.⁵¹ Jawapos memiliki segmentasi utama di Surabaya, hal ini dikarenakan Jawa Pos merupakan market leader koran harian di Jawa Timur terlebih di Surabaya.⁵² Tak berhenti disitu, Jawa Pos pun melakukan pengembangan industri dengan menghadirkan sebuah website Jawapos.com sebagai salah satu upaya dalam persaingan dunia media yang semakin ketat dan Jawa Pos telah membuktikan bahwa mampu bertahan di himpitan persaingan yang semakin ketat. Jawapos.com menempati posisi kelima situs berita yang paling sering dikunjungi di Indonesia walaupun eksistensi dalam dunia digital masih sebentar dengan mencapai 2,4 juta pengunjung.⁵³

⁵¹ Wahyunanda Kusuma Pertiwi Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penetrasi Internet di Indonesia Capai 64 Persen", Klik untuk baca: <https://tekno.kompas.com/read/2020/02/20/14090017/penetrasi-internet-di-indonesia-capai-64-persen>. 2020.

⁵² Freddy Mutiara, Tesis Pasca Sarjana: "*Strategi Komunikasi Eksternal Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Harian Jawa Pos*", (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, 2005)

⁵³ Diakses dari Nataconnexionindo.com, 2019, pada tanggal 1 Desember 2020.

BAB IV

ANALISIS DATA

Sebagai bagian penentu dalam suatu hasil penelitian, pada bagian ini akan memuat beberapa bagian; Temuan Penelitian dan Konfirmasi Temuan dengan Teori. Sementara dalam sub-bagian Temuan Penelitian, akan memuat hasil analisis menggunakan model Robert N. Entman dengan operasional menyangkut empat elemen struktural dan dua dimensi substansi terhadap pemberitaan terkait.

4.1 Temuan Penelitian

Dalam bagian ini akan menganalisis framing pemberitaan Jawapos.com tentang konflik Gubernur Jawa Timur yakni Khofifah dengan Risma selaku Walikota Surabaya terkait penanganan Covid-19 edisi 29-30 Mei 2020. Sebagai bahan pembandingan, akan dilakukan sebuah analisis framing terhadap konflik yang terjadi antara Ridwan Kamil dan Mahfud MD edisi 16-17 Mei 2020 sebagai suatu preferensi untuk menarik benang merah media Jawapos.com dalam mengkonstruksikan konflik dan perspektif gender dalam pemberitaan yang dipublikasikan dengan objek yang berbeda.

4.1.1 Pemberitaan Konflik Khofifah dan Risma

Ketika dilakukan *tracing* website Jawapos.com, pemberitaan mengenai Khofifah dan Risma dalam konflik penanganan Covid-19, lebih tepatnya terkait Mobil Tes PCR didapatkan sebanyak 5 (lima) pemberitaan yang dipublikasikan selama edisi 29 Mei 2020- 30 Mei 2020. Hal ini bertepatan juga dengan nama keduanya menduduki posisi *trending topics* di Twitter.

1) Berita 1: Gugus Tugas Covid-19 Jatim Geser Mobil Lab BNPB, Risma Ngamuk (Jum'at, 29 Mei 2020, 19:48:08 WIB)

Define Problem: Geramnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini, sesuai dengan kutipan berita berikut:

““Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni (Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo). Jadi, ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu,” kata Risma kesal sembari menunjukkan obrolannya dengan Doni via WhatsApp.”

Diagnose Causes: Adanya pergeseran bantuan dari BNPB berupa dua mobil laboratorium ke daerah lain, sesuai dengan kutipan berikut:

“Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dibikin geram lantaran dua mobil laboratorium yang sedianya diperuntukkan Kota Surabaya, digeser oleh Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur (Jatim) ke daerah lain. Dua unit mobil lab tersebut merupakan donasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).”

Make Moral Judgement: Pasien yang akan melakukan tes sesuai rencana harus menunggu hingga lima jam sementara mobil laboratorium tidak kunjung datang.

“Sementara itu, para pasien di Hotel Asrama Haji dipersiapkan mulai sekitar pukul 12.30 WIB dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Namun, setelah menunggu sekitar lima jam, mobil lab yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang.”

Treatment Recommendation: Walikota Surabaya Tri Rismaharini melakukan konfirmasi dan menghubungi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

“Mendengar kabar dua mobil lab malah ditujukan ke daerah lain, Risma langsung berkoordinasi. Dia menghubungi berbagai pihak yang telah dimintai bantuan untuk mendatangkan mobil lab tersebut. Risma juga melaporkan kejadian tersebut kepada Doni

Monardo. Doni pun berjanji mengecek keberadaan mobil tersebut. Pasalnya, memang dua mobil bantuan itu diprioritaskan untuk Kota Surabaya.”

- 2) Berita 2: Soal Mobil PCR, Harusnya Ikut Doni Monardo untuk Prioritaskan Surabaya (Sabtu, 30 Mei 2020, 10:11:08 WIB)

Define Problem: Keributan akibat pergeseran mobil PCR yang semula diperuntukkan untuk Kota Surabaya, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Ribut-ribut soal digesernya mobil laboratorium polimerase chain reaction (PCR) yang sedianya diperuntukkan untuk Kota Surabaya memicu banyak komentar. Seperti dari anggota DPRD Surabaya. Menurut mereka, Pemprov Jatim perlu punya strategi komprehensif dalam penanganan Covid-19.”

Diagnose Causes: Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memiliki strategi yang cermat dan terukur, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Anggota Komisi A DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, semestinya Pemprov Jatim bergerak berdasarkan indikator yang terukur. Dia mencontohkan, Surabaya sebagai ibu kota provinsi dan kota terbesar adalah episentrum utama di Jawa Timur. Baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularan. Sampai saat ini, Surabaya memang berada di posisi tertinggi zona merah Jatim.”

Make Moral Judgement: Adanya aksi yang dianggap sebagai teror terhadap warga Surabaya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno menambahkan, sudah beberapa kali Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang terkesan meneror warga Surabaya. Misalnya, saat Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Joni Wahyuhadi menyebut Surabaya bisa menjadi Wuhan baru.”

Treatment Recommendation: Pernyataan Doni Monardo yang menyatakan bahwa pihak BNPB telah menyerahkan mobil PCR ke Kota Surabaya

sebagai kota prioritas karena tingginya angka positif Covid-19, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Selain itu, pada 27 Mei 2020, Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Monardo telah menyebutkan bahwa pihaknya memberikan mobil laboratorium tes PCR ke Jawa Timur. Doni juga menyebut, jika Surabaya adalah salah satu prioritas bagi penggunaan fasilitas mobil tersebut karena tingginya angka positif Covid-19.”

- 3) Berita 3: PDIP Angkat Bicara Terkait Protes Risma Soal Mobil PCR (Sabtu, 30 Mei 2020, 10:40:16 WIB)

Define Problems: Adanya tanggapan dari DPP PDIP terkait protes Risma tentang mobil PCR, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi serius protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengenai mobil PCR yang seharusnya ada di Surabaya namun dialihkan ke daerah lain.”

Diagnose Cause: Tidak adanya pertimbangan dan skala prioritas dalam penanganan Covid-19, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyayangkan mobil PCR dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas penanganan Covid-19.”

Make Moral Judgement: Sosok Risma yang selalu bekerja keras untuk warga Surabaya, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Menurut Hasto, rakyat tahu bagaimana Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah. Beliau juga sosok kreatif dan menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah.”

Treatment Recommendation: Harapan agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur lebih bijak dalam mengambil keputusan, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Hasto berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas. Sehingga setiap kebijakannya diambil dengan memerhatikan kepentingan rakyat tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik. Tentunya harus menghindari ego kepemimpinan.”

- 4) Berita 4: Kebutuhan Tes Rapid-Swab Masih Besar, Risma Kecewa Mobil PCR Digeser 30 Mei 2020, 10:48:55 WIB

Define Problems: Amarah Risma selaku Walikota Surabaya langsung mengadu kepada Kepala BNPB, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Pemindahan secara mendadak itu membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah. Dia langsung mengadukan persoalan tersebut kepada Kepala BNPB Doni Monardo. Dalam pesan pendek yang disampaikan kepada Risma, Doni menyebutkan bahwa dua mobil tersebut memang diprioritaskan untuk Surabaya”

Diagnose Causes: Dipindahkannya mobil laboratorium PCR sebagai salah satu upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19 untuk Surabaya ke Lamongan dan Tulungagung, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Rapid test dan uji swab secara masif menjadi salah satu rangkaian untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Surabaya. Pemkot mendapatkan bantuan dua mobil laboratorium PCR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat upaya tersebut. Tetapi, Jumat (29/5) mobil tersebut dibawa ke Lamongan dan Tulungagung.”

Make Moral Judgement: Kekhawatiran Pemerintah Kota Surabaya selain terhadap pertumbuhan kasus Covid-19 juga tentang turunnya kepercayaan masyarakat, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Yang dikhawatirkan pemkot bukan hanya soal keputusan mata rantai Covid-19 yang terhambat. Kepercayaan masyarakat juga bisa turun. Sebab, cukup sulit merayu warga agar mau menjalani tes swab meskipun gratis. Bila berbiaya mandiri, ongkos tes itu bisa sampai Rp 1,6 juta.”

Treatment Recommendation: Target Pemerintah Kota dalam menyiapkan tes swab di beberapa lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Pemkot juga sudah menyiapkan untuk tes swab di lokasi-lokasi lain dalam lima hari ke depan. Ditargetkan, dalam lima hari itu tes swab di Surabaya sudah bisa selesai.”

- 5) Berita 5 Kronologi Kisruh Mobil PCR yang Digeser dari Surabaya (30 Mei 2020, 11:14:48 WIB)

Define Problems: Wali Kota Tri Rismaharani kesal akibat dialihkannya dua mobil PCR dari BNPB, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Dua mobil khusus polymerase chain reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Surabaya yang dialihkan ke daerah lain cukup membuat Wali Kota Tri Rismaharani kesal. Sebab mobil bantuan yang dijadwalkan bertandang ke Surabaya justru berbelok ke Tulungagung dan Lamongan.”

Diagnose Causes: Tanggapan Koordinator Rumpun Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Menanggapi hal tersebut, Koordinator Rumpun Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim Suban Wahyudiono di Surabaya pun mengungkapkan kronologis permintaan bantuan mobil PCR tersebut.”

Make Moral Judgement: Pergeseran dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pemeriksaan, sesuai dengan kutipan berikut:

“Bahkan, salah satu mobil digeser ke Tulungagung. Hal ini juga untuk mempercepat pemeriksaan. Sebab, di Tulungagung butuh bantuan cepat akibat terkendala kapasitas swab. Terlabih jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) yang tertinggi kedua di Jatim.”

Treatment Recommendation: Penegasan akan tidak adanya penyerobotan terkait bantuan dua unit mobil PCR, sesuai dengan kutipan berikut:

“Sehingga, pihaknya menegaskan tidak pernah menyerobot bantuan dua unit mobil tersebut dari Pemkot Surabaya. Sebab Gugus Tugas Jatim sendiri telah mengirimkan surat ke pusat untuk mendapat bantuan alat PCR guna mempercepat pemeriksaan swab.”

- 6) Berita 6 Kisruh Penggunaan Mobil PCR, Gugus Tugas Jatim Sebut Ada Miskomunikasi (30 Mei 2020 11:20:47 WIB)

Define Problems: Adanya miskomunikasi yang melatarbelakangi dibatalkannya mobil laboratorium PCR untuk Surabaya, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Miskomunikasi terjadi saat Bu Feni (sapaan Kadinkes Surabaya, Red) menugaskan stafnya, kalau tidak salah namanya Bu Deni. Tapi, tidak menyampaikan hari ini acaranya di Surabaya apa, sehingga mobil dikirim ke Lamongan dan Tulungagung yang memang juga sangat membutuhkan,” ujarnya lagi.

Namun, kata dia, saat mobil PCR di tengah perjalanan, ia mendapat informasi bahwa Surabaya meminta, padahal di Tulungagung dan Lamongan sudah siap dilakukan pemeriksaan.”

Diagnose Causes: Penjelasan dari pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur terkait dibatalkannya mobil laboratorium PCR untuk Kota Surabaya, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur memberi penjelasan terkait batalnya penggunaan mobil laboratorium polimerase chain reaction (PCR) yang terjadi di Surabaya. Kedua mobil yang sedianya akan melakukan pemeriksaan di Surabaya dialihkan ke kota lain.”

Make Moral Judgement: Terjadinya miskomunikasi ketika mobil PCR telah dalam perjalanan menuju Tulungagung dan Lamongan, sesuai dengan kutipan berikut:

“Namun, kata dia, saat mobil PCR di tengah perjalanan, ia mendapat informasi bahwa Surabaya meminta, padahal di Tulungagung dan Lamongan sudah siap dilakukan pemeriksaan.”

Treatment Recommendation: Dikarenakan tugas tenaga medis di dalam mobil berat, maka tidak bisa dipaksakan, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Namun, ia mengingatkan bahwa tugas tenaga medis di mobil tersebut sangat berat dan tidak boleh dipaksakan karena memang sangat melelahkan.”

4.1.2 Pemberitaan Konflik Ridwan Kamil dan Mahfud MD

- 1) **Berita 1:** Ridwan Kamil Sebut Pernyataan Mahfud MD Salah Satu Pemicu Kerumunan (16 Desember 2020, 13:20:28 WIB)

Define Problems: Pandangan Ridwan Kamil terhadap kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI), sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Habib Rizieq Shihab.”

Diagnose Causes: Penyebab adanya kerumunan berasal dari pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Menurut dia, setelah diperiksa di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (16/12), kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD.

Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan,” kata Ridwan Kamil.”

Make Moral Judgement: Sikap Ridwan Kamil yang menyayangkan pemeriksaan oleh kepolisian hanya kepada kepala daerahnya saja, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Sehingga, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa kepolisian hanyalah para kepala daerahnya. Dalam hal ini dia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut Ridwan, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan.”

Treatment Recommendation: Proses pemeriksaan Ridwan Kamil oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Ridwan Kamil diperiksa sekitar dua jam oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dia hadir pada pukul 09.11 WIB dan keluar sekitar pukul 11.00 WIB. Selama pemeriksaan dia mengaku hanya melengkapi dua hingga tiga pertanyaan setelah dirinya juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus kerumunan kegiatan Habib Rizieq Shihab pada Jumat (13/11) lalu di Megamendung, Bogor.”

2) Berita 2: Diminta Tanggung Jawab Kerumunan Rizieq, Mahfud MD: Siap Kang RK (16 Desember 2020, 21:37:41 WIB)

Define Problems: Ridwan Kamil meminta Mahfud MD untuk turut bertanggung jawab, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut bertanggung jawab atas kerumunan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Ridwan menilai pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan Rizieq di Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai pemicu terjadinya kerumunan.”

Diagnose Causes: Mahfud MD menyatakan bahwa memang pernah membuat pernyataan tentang penjemputan Rizieq, sesuai dengan kutipan berikut:

“Terkait itu, Mahfud tak menampik jika dirinya pernah membuat pernyataan membolehkan penjemputan Rizieq.”

Make Moral Judgement: Pernyataan Mahfud MD menjadi sebuah tafsir yang berkembang di masyarakat, seperti kutipan berita berikut:

“Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Habib Rizieq. Baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan.”

Treatment Recommendation: Pernyataan pertanggungjawaban Mahfud MD terkait kerumunan yang disebabkan atas datangnya Habib Rizieq, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Namun, dalam pernyataan tersebut sudah jelas jika penjemput Rizieq harus mentaati protokol kesehatan. “Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pula,” kata Mahfud melalui akun twitter resminya @mohmahfudmd, Rabu (26/12).”

3) Berita 3: Ridwan Kamil Minta Mahfud Tanggung Jawab, Nasir Djamil: Jangan Cengeng (17 Desember 2020, 15:18:48 WIB)

Define Problems: Permintaan Ridwan Kamil terhadap Mahfud MD selaku Menko Polhukam dalam mempertanggungjawabkan pernyataannya yang terkesan menyetujui adanya kerumunan akibat kedatangan Habib Rizieq, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk bertanggung jawab terkait kerumunan yang diciptakan oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.”

Diagnose Causes: Tanggapan Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil yang menyatakan Ridwan Kamil tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai kepala daerah, sesuai dengan kutipan berikut ini:

“Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil mengeluhkan pernyataan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Karena terlihat Ridwan Kamil tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang kepala daerah.”

Make Moral Judgement: Menurut Nasir, hal ini terjadi justru memperlihatkan tidak adanya koordinasi antara pusat dan daerah, sesuai dengan kutipan berita berikut:

““Nasir menuturkan terlihat tidak adanya koordinasi antara pusat dengan daerah terkait kerumunan Rizieq Shihab. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Jadi melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam sama saja memperlihatkan bahwa tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah,” katanya.”

Treatment Recommendation: Nasir berpesan agar pihak-pihak terlibat tidak cengeng dan saling melempar tanggung jawab, sesuai dengan kutipan berita berikut:

““Jangan cengeng. Masing-masing sudah punya tanggung jawab sesuai perundang-undangan. Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam soal kerumunan menunjukan Ridwan Kamil belum siap memikul tanggung jawab,” ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (17/12).”

4) Berita 4: Soal Kerumunan Massa Rizieq, RK: Saya Bertanggung Jawab Secara Moril (17 Desember 2020, 11:06:22 WIB)

Define Problems: Gubernur Jawa Barat mengaku turut bertanggungjawab secara moril atas terjadinya kerumunan massa pasca kedatangan Rizieq Shihab, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku ikut serta bertanggung jawab terhadap terjadinya kerumunan massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun, tanggung jawab yang dipikulnya hanya sebatas moril, tidak secara teknis.”

Diagnose Causes: Penjelasan Ridwan Kamil atas pernyataan tidak bertanggung jawab secara teknis, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Ridwan menjelaskan, wilayah Jawa Barat merupakan daerah otonom. Di mana bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Maka dari itu, setiap bupati atau wali kota bertanggung jawab atas kegiatan lokal di wilayahnya.”

Make Moral Judgement: Akibat pertanggungjawaban yang sebatas moril tidak secara teknis, gubernur tidak dapat memberikan sanksi pencopotan bupati dan walikota, sesuai dengan kutipan berita berikut:

“Atas dasar itu, Gubernur tidak bisa memberikan sanksi maupun pencopotan bupati dan wali kota. Proses tersebut harus melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki kekhususan. Yakni wali kota atau bupati dipilih langsung oleh Gubernur. Sehingga Gubernur bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka.”

Treatment Recommendation: Tidak tepenuhinya kriteria untuk disebut acara lokal, sesuai dengan kutipan berita berikut ini:

“Acara lokal akan menjadi tanggung jawab provinsi jika memenuhi pertama, pemerintah lokal tidak mampu menangani acara tersebut. Kedua jika acara diselenggarakan di perbatasan antar kota atau antar kabupaten. Sedangkan Ridwan Kamil berpandangan kegiatan di Megamendung tidak memenuhi dua kriteria tersebut.”

4.2 Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini akan mentransformasikan hasil analisis framing menjadi pembahasan yang terbagi menjadi dua bagian, yakni pembahasan Elemen Framing yang terdiri dari *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*; dan Dimensi Framing yang terdiri dari Seleksi Isu dan Aspek yang Ditonjolkan.

4.2.1 Elemen Framing Berita Khofifah-Risma

1) Berdasarkan *Define Problem*, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang merasa dikecewakan akibat keputusan dialihkannya dua unit mobil PCR ialah; Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini; Anggota DPRD Surabaya yang menjadi salah satu contoh pihak yang turut memberikan komentar; hingga respon perwakilan PDIP yang menyayangkan sikap pemerintah provinsi. Sementara, di lain sisi, pihak pemerintah provinsi mengklarifikasi adanya miskomunikasi terkait apa yang telah terjadi dalam peralihan mobil PCR.

2) Berdasarkan *Diagnose Causes*, dijelaskan bahwa akibat pergeseran dua unit mobil PCR yang merupakan bantuan yang berasal dari BNPB ini, beberapa pihak menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki strategi yang cermat dan terukur sekaligus tidak memiliki pertimbangan dan skala prioritas.

Selain itu, peralihan mobil PCR ini juga dirasa sebagai salah satu penghambat upaya pemutusan rantai pertumbuhan Covid-19 di Surabaya. Sementara di sisi lain, Koordinator Rumpun Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim Suban Wahyudiono menerangkan bagaimana kronologi permintaan mobil PCR yang berjumlah 15 (lima belas) mobil dan terjadinya

pembatalan bantuan mobil PCR untuk Surabaya dikarenakan adanya miskomunikasi di dalam Dinas Kesehatan.

- 3) Berdasarkan *Make Moral Judgement*, dijelaskan bahwa beberapa pihak menganggap bahwa akibat dialihkannya mobil PCR ini memiliki beberapa dampak, yakni; pasien yang terlanjur menunggu selama kurang lebih 5 (lima) jam, adanya indikasi teror terhadap masyarakat Surabaya, kekhawatiran Pemerintah Kota Surabaya atas kepercayaan masyarakatnya dan usaha Risma selaku Wali Kota yang pada akhirnya menjadi sia-sia. Namun, di lain sisi juga dijelaskan bahwa adanya pergeseran ini dilakukan untuk upaya percepatan pemutusan rantai pertumbuhan Covid-19.

- 4) Berdasarkan *Treatment Recommendation*, dijelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan konfirmasi dan telah dipastikan oleh Doni selaku perwakilan dari BNPB bahwa PCR diberikan kepada Surabaya. Dengan terjadinya peristiwa ini, Khofifah selaku gubernur Jawa Timur diminta agar lebih tegas karena target telah ditentukan. Sementara itu, tidak dapat dipungkiri, jika dilakukan pengembalian PCR ke Surabaya setelah Tulungagung dan Lamongan, akan terjadi sebuah pemaksaan terhadap tenaga medis yang memang telah bekerja keras.

4.2.2 Elemen Framing Ridwan Kamil dan Mahfud MD

- 1) Berdasarkan *Define Problems*, dijelaskan bahwa Ridwan Kamil sebagai pihak yang menuntut Mahfud MD selaku Menko Polhukam untuk bertanggung jawab atas sebuah pernyataan yang dilontarkan karena mengindikasikan terjadinya kerumunan massa dari Front Pembela Islam (FPI). Selebihnya, Ridwan Kamil

juga menyatakan bahwa hanya memiliki tanggung jawab moril atas kerumunan yang terjadi.

2) Berdasarkan **Diagnose Cause**, dijelaskan bahwa Mahfud MD telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan yang menjadi polemik dengan Ridwan Kamil memang benar adanya. Namun, dari pandangan Anggota Komisi II DPR, Nasir Djamil justru menilai bahwa Ridwan Kamil tidak dapat mempertanggungjawabkan jabatannya. Sementara itu, Ridwan Kamil mempertegas penjelasannya terkait bahwa dirinya tidak memiliki tanggung jawab secara teknis sebagai Gubernur Jawa Barat.

3) Berdasarkan **Make Moral Judgement**, dijelaskan bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi menimbulkan berbagai reaksi, diantaranya Ridwan Kamil yang menyayangkan pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang hanya dilakukan kepada kepala daerah saja, pernyataan Mahfud MD yang kemudian menjadi tafsir berkembang di masyarakat, Nasir Djamil yang menilai bahwa dengan melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam menunjukkan tidak adanya koordinasi antara pusat dan daerah, dan selaku Gubernur pun tidak memiliki kuasa untuk memberikan sanksi pencopotan terhadap Bupati dan Wali Kota yang menjabat pasca terjadinya peristiwa ini.

4) Berdasarkan **Treatment Recommendation**, dijelaskan bahwa akibat peristiwa ini, Ridwan Kamil diperiksa oleh penyidik Diteskrimum Polda Jabar. Sementara, Mahfud MD bersedia bertanggung jawab atas pernyataan terkait diizinkannya HRS pulang ke Indonesia yang kemudian menimbulkan sebuah kerumunan massa di tengah-tengah pelaksanaan PSBB. Lebih jauh lagi, untuk disebut

sebagai acara lokal, peristiwa ini menurut Ridwan Kamil tidak memenuhi kriteria yang ada sehingga berdampak pada upaya yang dapat dilakukan pun tidak banyak. Akibat peristiwa ini juga, Nasir berpesan agar pihak-pihak yang terlibat tidak cengeng dan saling melempar tanggung jawab.

4.2.3 Dimensi Framing Berita Khofifah-Risma

4.2.3.1 Seleksi Isu Berita Khofifah Risma

Dari segi jumlah publikasi berita yang dilakukan oleh Jawapos.com, terlihat bahwa dari 6 (enam) berita dengan topik serupa, 5 (lima) diantaranya memuat perspektif yang menyatakan bahwa adanya pemindahan Mobil PCR ini berdampak serius bagi Kota Surabaya. Selain dengan menonjolkan bagaimana reaksi Wali Kota Surabaya yang menyita perhatian masyarakat, Jawapos.com juga turut menghadirkan pendapat dari beberapa pihak lain yang memang memiliki kesetaraan pandangan dalam melihat ketidakberesan yang terjadi. Diantaranya yakni perwakilan dari PDIP, Harto Kristiyanto yang menyatakan bahwa sangat disayangkan adanya fenomena pengalihan mobil PCR yang semula ditujukan untuk Kota Surabaya.⁵⁴ Hal ini mengindikasikan adanya sebuah ketidakmampuan Pemerintah Provinsi dalam melihat skala prioritas. Kemudian pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri bahwa memang sudah menjadi tugas Pemprov untuk menjalankan skala prioritas berdasarkan indikator terukur.⁵⁵

⁵⁴ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/surabaya/30/05/2020/pdip-angkat-bicara-terkait-protes-risma-soal-mobil-pcr/>

⁵⁵ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/surabaya/30/05/2020/soal-mobil-pcr-harusnya-ikut-donimonardo-untuk-prioritaskan-surabaya/>

Tuduhan-tuduhan tersebut seolah mendapat konfirmasi kuat ketika Jawapos.com mempublikasikan pemberitaan dengan mengungkap perspektif dari Doni Monardo selaku ketua BNPB yang menyatakan bahwa bantuan yang berupa dua unit mobil PCR memang ditujukan untuk Kota Surabaya⁵⁶. Dengan dicantungkannya pernyataan Doni Monardo ini menambah kesan adanya sebuah penguatan konfirmasi terkait kesalahan memang berada di pihak pemerintah provinsi. Ditambah lagi, pernyataan dari Harto Kristiyanto selaku perwakilan dari PDIP, melahirkan sebuah persepsi baru bahwa adanya ketidakharmonisan hubungan yang terjadi antara pemerintah kota dan provinsi. Kemudian, dengan menyertakan sebuah pendapat dengan merujuk suatu perwakilan tertentu, dalam konteks ini salah satu partai politik besar yang bertengger di Indonesia yakni PDIP, mengindikasikan sebuah pertanyaan apa yang mendasari dipilihnya perwakilan PDIP untuk turut ikut menyuarakan pendapatnya, sementara partai politik lain tidak.

Dengan adanya indikasi berat sebelah, ini juga menjadikan pihak Pemprov tidak memiliki ruang sebanyak pihak yang pro terhadap Wali Kota Surabaya terkait pengalihan bantuan mobil PCR dalam menyampaikan pandangannya. Dengan hanya 1 (satu) berita yang terpublikasikan, Pemprov mendapatkan kesempatan untuk memberikan sedikit pandangannya terkait alasan dialihkannya bantuan mobil PCR tersebut. Sementara itu, untuk pendapat Khofifah pun tidak dibahas sama sekali dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh Jawapos.com padahal fenomena ini mengakibatkan perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat hingga

⁵⁶ Ibid.

dijuluki perseteruan antara Khofifah dan Risma sebagai dua sosok pemimpin daerah perempuan yang justru menyebabkan suatu “drama”. Dengan adanya ketimpangan ini pun mengindikasikan bahwa secara implisit dapat dikatakan bahwa Jawapos.com memiliki kecenderungan untuk ingin menyampaikan bahwa pengalihan bantuan mobil PCR dari Kota Surabaya ini merupakan sebuah kesalahan. Walaupun telah disampaikan juga bahwa terdapat beberapa alasan yang menekankan bahwa mobil PCR ini tidak secara tiba-tiba dialihkan begitu saja tanpa ada pertimbangan mendasar. Namun, Jawapos.com seolah memperkuat bahwa peralihan ini merupakan kesalahan dengan mempublikasikan porsi yang lebih banyak dengan mengangkat dari perspektif yang berlawanan.

4.2.3.2 Aspek yang ditonjolkan Berita Khofifah Risma

Pemberitaan mengenai pengalihan mobil PCR untuk Surabaya yang dipublikasikan oleh Jawapos.com mengindikasikan terjadinya penonjolan terhadap bagaimana reaksi emosional yang disuguhkan oleh Risma selaku Wali Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari beberapa *headline* berita, nama Risma selalu yang direpresentasikan dengan kata “geram”, “amarah” hingga “kesal”. Apa yang terjadi ini didasarkan bahwa Risma memang memiliki alasan yang kuat sehingga memiliki reaksi yang demikian.

Dijelaskan bahwa memang dua unit mobil PCR ditujukan untuk Kota Surabaya sebagai bantuan yang diberikan oleh pihak BPBN.⁵⁷ Namun secara tiba-tiba bantuan tersebut dialihkan menuju Tulungagung dan Lamongan. Dengan

⁵⁷ Ibid.

dilakukannya peralihan bantuan yang berupa mobil PCR, dijelaskan juga bahwa mengakibatkan dampak yang tidak patut diremehkan. Salah satunya pernyataan bahwa pasien-pasien yang menjadi sasaran bantuan ini telah menunggu hingga 5 (lima) jam.⁵⁸ Hal ini tentunya berdampak terhadap keadaan pasien yang memang sedang dalam kategori sangat membutuhkan bantuan. Di sisi lain, akibat yang juga dikhawatirkan akan terjadi ialah merosotnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Arus pertumbuhan virus Covid-19 bukanlah masalah ringan yang dapat disepelekan, sinergi banyak pihak sangat dibutuhkan. Dengan terjadinya kemerosotan kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, ditakutkan akan berdampak terhadap kualitas sinergi yang terbentuk sehingga segala upaya untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 tidak dapat dilakukan secara optimal.

Pemberitaan Jawapos.com dengan topik serupa juga didapatkan turut dibahas mengenai sisi lain yang dapat menjadi sebuah perspektif lain dari publikasi yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat bagaimana klarifikasi yang disuguhkan oleh Jawapos.com dari pihak Pemerintah Provinsi itu sendiri meski hanya dikemas dalam 1 (satu) berita saja, setelah menghadirkan dari perspektif Risma, Partai PDIP hingga BPBN. Dengan berlandaskan terhadap fenomena yang mejadi pusat perhatian publik, ternyata Jawapos.com tidak menempatkan nama Khofifah secara aktif memberikan pernyataannya. Hal ini mengindikasikan seolah Khofifah tidak turut andil dan perlu mengikutcampuri permasalahan yang terjadi. Sementara yang

⁵⁸ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/surabaya/29/05/2020/gugus-tugas-covid-19-jatim-geser-mobil-lab-bnpb-risma-ngamuk/>

terjadi, nama Khofifah terseret dalam tema perseteruan dengan Risma sehingga mengakibatkan nama keduanya menjadi sorotan publik.

4.2.4 Dimensi Framing Berita Ridwan Kamil-Mahfud MD

4.2.4.1 Seleksi Isu Berita Ridwan Kamil-Mahfud MD

Masih membicarakan terkait dengan perkembangan isu pandemi yang sedang dihadapi oleh Indonesia, fenomena yang terjadi antara Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan Mahfud MD selaku Kemenpolhukam juga menjadi sebuah sorotan publik. Merujuk pada pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh Jawapos.com, didapatkan sebuah indikasi bahwa pemberitaan yang ada terfokus pada bagaimana reaksi Ridwan Kamil terhadap pernyataan Mahfud MD yang dirasa mengundang sebuah kerumunan. Berawal dari pernyataan Mahfud MD yang memberikan pernyataan terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab (yang selanjutnya akan disebut dengan HRS) yang memang diizinkan pulang ke Indonesia atas dasar bahwa HRS memiliki hak hukum untuk pulang hingga memperbolehkan HRS dijemput dan diantar hingga ke Petamburan⁵⁹ dengan catatan tertib dan tidak melanggar protokol kesehatan secara ketat.⁶⁰

Merujuk pada pernyataan tersebut, Ridwan Kamil berpendapat bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Mahfud MD menjadi sebuah tafsir masyarakat yang mengakibatkan kerumunan dengan datang ke bandara. Apa yang difokuskan oleh Ridwan Kamil ialah bahwa pernyataan Mahfud MD ini seolah menjadi diskresi

⁵⁹ jelaskan

⁶⁰ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/16/12/2020/diminta-tanggung-jawab-kerumunan-rizieq-mahfud-md-siap-kang-rk/>

terhadap kebijakan yang tengah dijalankan oleh Pemerintah, yakni PSBB. Dengan begitu, menurut Ridwan Kamil, Mahfud MD harus bertanggungjawab penuh terhadap kerumunan yang telah terjadi.⁶¹

Melihat bagaimana alur narasi yang dilakukan oleh Jawapos.com ini merujuk pada bagaimana respon Ridwan Kamil terhadap pernyataan Mahfud MD, alih-alih membahas dampak yang sebenarnya terjadi ketika terjadi kerumunan.

Terfokus pada bagaimana respon Ridwan Kamil ini menunjukkan bahwa memang akan menjadi sorotan publik jika melihat tokoh besar dengan memiliki kapasitas masing-masing saling berseteru. Jawapos.com juga mempublikasikan berita dengan turut menyisipkan pandangan Nasir Djamil, Anggota Komisi II DPR, yang berpandangan bahwa apa yang sedang terjadi antara Ridwan Kamil dan Mahfud MD ini justru menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah.⁶² Hal ini ditenggarai karena Ridwan Kamil yang dirasa melemparkan tanggung jawabnya hanya ke Mahfud MD seolah dirinya tidak memiliki kapasitas untuk turut bertanggung jawab juga.

4.2.4.2 Aspek yang ditonjolkan Berita Ridwan Kamil-Mahfud MD

Dalam pengemasan alur narasi berita yang dipublikasikan oleh Jawapos.com, mayoritas membahas terkait reaksi Ridwan Kamil yang menyudutkan Mahfud MD akibat pernyataan yang telah dilontarkannya. Terlihat bahwa Jawapos.com sangat menonjolkan bagaimana krusialnya pernyataan

⁶¹ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/16/12/2020/ridwan-kamil-sebut-statment-mahfud-md-salah-satu-pemicu-kerumunan/>

⁶² Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/12/2020/ridwan-kamil-minta-mahfud-tanggung-jawab-nasir-djamil-jangan-cengeng/>

Mahfud MD yang mengakibatkan Ridwan Kamil berlaku demikian. Dalam kacamata Ridwan Kamil, dengan adanya pernyataan yang dilontarkan Mahfud MD mengindikasikan sebuah kerumunan yang menjadi hal terlarang ketika pelaksanaan kebijakan PSBB.

Pemberitaan yang dipublikasikan oleh Jawapos.com sendiri terfokus pada bagaimana protes yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil terhadap pernyataan yang dirasa menimbulkan tafsir yang salah dari Mahfud MD.⁶³ Namun, Jawapos.com juga mencoba memberikan sebuah pandangan baru dengan menghadirkan pendapat dari Nasir Djamil, Anggota DPR RI.⁶⁴ *Jangan Cengeng*, menjadi *headline* berita yang dipilih oleh Jawapos.com untuk mengemas pemberitaan terkait pandangan Nasir Djamil ini juga menuai sebuah perhatian khusus. Kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa adanya campur tangan emosional sebagai akibat yang didapat pasca terjadinya perseteruan yang dihadirkan oleh Ridwan Kamil dan Mahfud MD.

Sementara itu, dari pihak Mahfud MD pun juga telah mengakui atas pernyataan yang dilontarkan. Mahfud MD juga bersedia untuk bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang akan terjadi.⁶⁵ Namun, topik bahasan ini ternyata tidak cukup menarik bagi Jawapos.com untuk tidak dibahas lebih lanjut walaupun memuat urgensi yang sangat tinggi dalam pemecahan perseteruan yang ada. Hal ini dapat terlihat ketika pihak Jawapos.com lebih memilih untuk membahas secara

⁶³ *Op.cit*

⁶⁴ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/12/2020/ridwan-kamil-minta-mahfud-tanggung-jawab-nasir-djamil-jangan-cengeng/>

⁶⁵ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/16/12/2020/diminta-tanggung-jawab-kerumunan-rizieq-mahfud-md-siap-kang-rk/>

tuntas perspektif dari Ridwan Kamil yang meminta Mahfud MD untuk bertanggung jawab hingga pernyataan terkait dirinya yang tidak memiliki tanggung jawab secara teknis, hanya sebatas moril terhadap apa yang terjadi.⁶⁶



⁶⁶ Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/17/12/2020/soal-kerumunan-massa-rizieq-rk-saya-bertanggung-jawab-secara-moril/>

BAB V

ANALISIS KONSTRUKSI REALITAS MEDIA JAWAPOS.COM

Dalam bagian ini, akan menjadi sebuah inti pembahasan dalam penelitian yang telah disusun. Sebab, dalam bab ini akan berisi pemaparan temuan penelitian yang kemudian dikomparasikan dengan teori yang ada sehingga akan didapatkan penjelasan secara komprehensif tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Secara umum, bab ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, yakni pemaparan hasil framing pemberitaan, perspektif konflik dan gender dalam publikasi berita yang ada,

5.1 Pembahasan Hasil Framing Pemberitaan Khofifah-Risma

Pada Bab IV, telah disebutkan poin-poin penting yang dapat ditarik menjadi benang merah terhadap bagaimana konstruksi pemberitaan yang dipublikasikan oleh Jawapos.com. Terdapat poin penting yang dapat digarisbawahi, yakni; *pertama*, mengenai isu yang terseleksi. Diketahui bahwa Jawapos.com menekankan pada isu terkait bagaimana krusialnya dampak yang didapatkan ketika terjadi peralihan bantuan yang berupa mobil PCR yang semula ditujukan untuk Surabaya namun pada hari yang telah dijadwalkan, bantuan tersebut justru ditujukan ke Tulungagung dan Lamongan. Pemberitaan yang telah dipublikasikan sebagian besar memuat pembahasan bahwa terdapat sebuah indikasi Jawapos.com lebih condong untuk sepakat bahwa dengan dilakukannya peralihan mobil PCR merupakan langkah yang kurang tepat. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa secara kuantitas, berita yang

dipublikasikan lebih banyak membahas dampak-dampak buruk yang dirasakan ketika bantuan mobil PCR dialihkan.

Senada dengan apa yang menjadi pembahasan pemberitaan yang dipublikasikan, terdapat beberapa pernyataan yang memperkuat mengapa pengalihan mobil PCR dirasa merupakan langkah yang keliru, yakni; Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini dengan reaksi emosionalnya yang juga dijadikan sebagai *headline* berita yang dipublikasikan oleh Jawapos.com⁶⁷; Anggota DPRD Surabaya yang berkomentar tentang harusnya Pemprov mengambil langkah dengan indikator yang terukur⁶⁸; hingga respon perwakilan PDIP yang menyayangkan sikap pemprov.⁶⁹ Selain itu, menurut PDIP dengan dialihkannya bantuan ketika target pasien telah berkumpul, menyebabkan terbelengkalai para pasien juga kepercayaan masyarakat Surabaya yang ditakutkan akan merosot.⁷⁰

Sementara untuk pembahasan konfirmasi dari pihak Pemprov, Jawapos.com hanya menerbitkan 1 (satu) artikel berita saja. Dalam pembahasan artikel ini, didapatkan bahwa apa yang terjadi merupakan akibat dari adanya miskomunikasi.⁷¹ Selain itu, proses peralihan yang ada sebenarnya bukan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pertimbangan. Lamongan dan Tulungagung sebagai

⁶⁷ <https://www.jawapos.com/surabaya/30/05/2020/kebutuhan-tes-rapid-swab-masih-besar-risma-kecewa-mobil-pcr-digeser/>

⁶⁸ <https://www.jawapos.com/surabaya/30/05/2020/soal-mobil-pcr-harusnya-ikut-doni-monardo-untuk-prioritaskan-surabaya/>

⁶⁹ <https://www.jawapos.com/surabaya/30/05/2020/pdip-angkat-bicara-terkait-protas-risma-soal-mobil-pcr/>

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ <https://www.jawapos.com/surabaya/30/05/2020/kisruh-penggunaan-mobil-pcr-gugus-tugas-jatim-sebut-ada-miskomunikasi/>

daerah yang mendapatkan bantuan peralihan mobil PCR merupakan daerah yang juga memiliki jumlah korban terkapar covid-19 juga tinggi.⁷²

Kedua, terkait penonjolan suatu aspek. Berdasarkan hasil framing, didapatkan bahwa dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh Jawapos.com adanya penekanan terhadap reaksi emosional Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Hal ini dibuktikan pada beberapa judul yang ditetapkan dalam beberapa berita yang dipublikasikan. Selaras dengan apa yang menjadi hasil dari proses penyeleksian isu, apa yang menjadi landasan mengapa Risma bereaksi demikian. Hal ini diperkuat dengan beredarnya video Risma yang sangat emosional sebagai respon peralihan bantuan mobil PCR. Kekecewaan yang dirasakan oleh Risma diakibatkan karena dirinya telah sangat mengupayakan dan berharap atas bantuan ini untuk masyarakat Surabaya. Video Risma yang beredar secara cepat ini pun menyita perhatian publik yang cukup tinggi yang kemudian berdampak dengan nama Risma yang bertengger di jajaran *trending topics* di sosial media Twitter.

Melihat bagaimana temuan-temuan yang didapatkan dari proses analisis framing, menunjukkan bahwa realita yang memang berusaha dibangun oleh Jawapos.com ialah penekanan bahwa dengan dilakukannya peralihan bantuan berupa mobil PCR merupakan salah satu langkah yang keliru karena memuat banyak dampak yang tidak patut untuk diremehkan hingga menjadi pusat perhatian publik yang menyebabkan simpang-siur opini yang berkembang. Padahal, di masa-masa pandemi ini menjadi sangat krusial opini-opini yang berkembang yang justru

⁷² Ibid.

menciptakan sebuah kebiasaan fokus yang berdampak pada terbelenggalnya upaya-upaya penanganan Covid-19 yang sudah sepatutnya dioptimalkan dan diutamakan.

Jawapos.com memerankan perannya sebagai media yang memiliki kuasa untuk menyeleksi isu mana yang akan dipublikasikan dan aspek apa yang ingin ditonjolkan. Dengan mempublikasikan artikel-artikel berita yang menekankan pada pernyataan bahwa terdapat kekeliruan jika melakukan sebuah peralihan bantuan mobil PCR karena berakibat cukup fatal. Hal ini kemudian akan menimbulkan persepsi masyarakat yang turut menyayangkan aksi tersebut. Terlebih, seperti yang telah disinggung, dengan beredarnya video Risma merespon secara emosional, semakin menambah pusat perhatian publik terhadap isu ini.

Argumen-argumen penguat dalam artikel berita yang dipublikasikan juga menjadi salah satu faktor konfirmasi atas kepercayaan yang dianut oleh publik. Ketika Jawapos.com menjadikan salah satu perwakilan partai PDIP untuk turut terekspose dalam penyampaian pendapat.⁷³ Namun, dengan dipublikasikannya perspektif dari salah satu perwakilannya, mengindikasikan suatu temuan. Pasalnya, Partai PDIP sejatinya tidak ada sangkut-paut sama sekali dalam isu ini kecuali PDIP merupakan asal partai politik Risma. Dengan begitu, apa yang diucapkan oleh perwakilan PDIP ini pun menjadi salah satu penguat pernyataan yang mendukung adanya sebuah alur atas konfirmasi terhadap peralihan mobil PCR merupakan sebuah kekeliruan dalam penggiringan opini publik.

⁷³ <https://www.jawapos.com/surabaya/30/05/2020/pdip-angkat-bicara-terkait-protas-risma-soal-mobil-pcr/>

Melihat temuan tersebut, menunjukkan bahwa realitas yang sedang diupayakan untuk dibangun dalam benak pembaca ialah penekanan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Pemprov merupakan sebuah langkah yang keliru dan tidak mendasari pertimbangan yang matang. Seperti yang telah dikatakan oleh Berger dan Luckman, realitas merupakan sebuah kenyataan yang diakui, maka realitas yang dibangun oleh Jawapos.com ini juga telah diakui oleh publik. Hal ini diperkuat bagaimana cuitan pengguna sosial media Twitter yang akhirnya menempatkan nama Risma menjadi *Trending Topics*.

Gambar 5.1
Tangkapan Layar Reaksi Risma dalam Video yang Beredar



Sumber: Tangkapan Layar <https://www.youtube.com/watch?v=Ay18l8CNt28>, diolah. (2021)

Dengan ditonjolkannya aspek emosional Risma, dengan menghadirkan kata-kata amarah, geram dan kesal, menunjukkan bahwa Jawapos.com juga ingin memancing perhatian publik dengan penonjolan aspek tersebut. Dengan begitu

dapat dikatakan bahwa framing pemberitaan terhadap sosok perempuan selama ini selalu mengedepankan tentang fisik dan sisi emosionalnya. Dengan adanya sebuah perseteruan dan melibatkan dua sosok pemimpin perempuan, memang menjadi sasaran empuk untuk para media mengeksekusi isu ini untuk menarik banyak perhatian.

Temuan yang dapat dilihat berikutnya ialah terkait pertanyaan mendasar dari penelitian ini; *bagaimana kemudian para perempuan yang memiliki “power” dikonstruksikan oleh media?* Merujuk pada hasil framing, dapat dikatakan bahwa ternyata perempuan yang memiliki kekuasaan pun tidak dapat menjamin bagaimana konstruksi pemberitaan tentang mereka akan terbebas dari suatu penonjolan aspek tertentu yang erat kaitannya dengan bagaimana perempuan itu sendiri dikonstruksikan. Apa yang menjadi faktor utama ialah bagaimana redaksi media dalam memproduksi berita. Selain itu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa apa yang diutamakan oleh para media dalam memproduksi berita ialah adanya pengaruh dari faktor-faktor eksternal.⁷⁴ Meskipun begitu, merujuk pada hasil framing yang menunjukkan bahwasanya proses penonjolan aspek terhadap dua perempuan yang memiliki “power” ini tidak dimanfaatkan oleh Jawapos.com begitu saja tanpa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemberitaan yang dipublikasikan tidak terfokus pada sosok pemimpin perempuannya, melainkan bagaimana fenomena yang berlangsung.

⁷⁴ Sudibyo, *Loc.cit*

5.1.1 Komparasi Pembahasan Hasil Framing Pemberitaan Khofifah-Risma dan Ridwal Kamil-Mahfud MD

Sebagai pembanding, fenomena yang terjadi antara Ridwan Kamil-Mahfud MD dirasa sangat pas untuk dikomparasikan dengan pemberitaan Khofifah-Risma guna mendapat penjelasan yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan, dalam perkembangan jurnalisme Indonesia, isu sensitivitas gender masih menjadi sebuah problematika yang masih bersarang di suatu badan perusahaan media yang identik sebagai produk patriarki. Sama-sama berseteru karena topik yang serupa yakni Covid-19, menjadi alasan mendasar lain yang menjadikan bahwa perbandingan ini setidaknya merujuk pada isu yang linear. Ketika dalam pemberitaan Khofifah-Risma terpusat pada bagaimana dampak yang dirasa sangat merugikan, maka dalam pemberitaan Ridwan-Mahfud terfokus pada bagaimana Ridwan yang memojokkan Mahfud atas pernyataannya yang dirasa menyebabkan sebuah penafsiran ganda sehingga menyebabkan sebuah kerumunan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan PSBB.

Hal ini juga mendasari alasan mengapa dalam membandingkannya tidak dikomparasikan dengan pemberitaan terkait sepak terjang karir para pemimpin perempuan yang mulai memiliki tempat di ranah ruang publik. Pada dasarnya, dalam penelitian ini berfokus dalam pencapaian pembahasan terkait perspektif media dalam memproduksi berita sehingga terjadi sebuah konstruksi realitas terhadap suatu konflik yang terjadi antara pemimpin perempuan yang dianggap sebagai perempuan yang memiliki kuasa. Dengan begitu membandingkannya dengan fenomena konflik yang terjadi antara tokoh laki-laki yang memiliki kuasa

diasumsikan lebih terfokus pada titik yang sama sehingga bahasannya tidak menyimpang namun tetap memiliki bahasan yang komprehesif.

Dalam perspektif sensitivitas gender, dapat terlihat bahwasanya Jawapos.com sejatinya sudah memiliki sensitivitas gender yang cukup baik. Hal ini dikarenakan walaupun terfokus pada bagaimana reaksi emosional dari Risma, namun Jawapos.com tidak terfokus pada bagaimana drama konflik yang melibatkan dua sosok pemimpin perempuan. Alih-alih terfokus terhadap hal demikian, Jawapos.com menghadirkan pernyataan-pernyataan yang lebih komprehesif dengan membahas bagaimana dampak yang dihasilkan dan memperkuat bahwa apa yang menyebabkan Risma bereaksi demikian merupakan hal wajar. Hal ini dikarenakan bahwa dampak yang digadang-gadang akibat adanya peralihan mobil PCR ini sangat krusial, di mana pasien yang telah ditargetkan telah berkumpul hingga terdapat adanya indikasi kemerosotan kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap Pemkot di masa-masa pandemi ini.

Dalam perspektif konflik, sejatinya pemberitaan Khofifah-Risma lebih ke penekanan bahwa langkah Pemprov mengambil langkah yang salah dan reaksi emosional yang ditunjukkan oleh Risma. Hal ini dikarenakan Khofifah tidak dibahas sama sekali secara khusus bagaimana pendapatnya dalam artikel berita yang dipublikasikan. Lain halnya dengan Ridwan-Mahfud, dua-duanya diberikan ruang untuk bersuara. Walaupun lebih condong dan lebih banyak perspektif dari Ridwan.

Melihat bagaimana artikel-artikel berita yang telah dipublikasikan, Jawapos.com dalam melihat fenomena Khofifah-Risma ini sebagai suatu hal yang terjadi bukan antara dua sosok pemimpin daerah perempuan yang sedang berseteru.

Melainkan bagaimana reaksi Risma sebagai pemimpin Kota Surabaya yang tidak terima atas keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas peralihan mobil PCR yang semula ditujukan untuk Kota Surabaya. Hal ini diperkuat dengan intensitas pemberitaan mengenai “drama PCR” ini yang tidak sama sekali menyangkutpautkan Khofifah di dalamnya. Adapun hanya sebatas respon Pemerintah Provinsi terkait miskomunikasi yang terjadi.

Justru dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi antara Ridwan-Mahfud lebih terfokus pada perseteruan yang terjadi di sisi personal mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang selalu dikaitkan terkait perempuan dengan sisi emosionalnya yang berkemungkinan lebih tinggi mengalami sebuah perseteruan, ternyata tidak ditemukan dalam konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh Jawapos.com. Dalam konstruksi pemberitaan yang dipublikasikan oleh Jawapos.com ketika membahas mengenai Ridwan-Mahfud, juga muncul salah satu kata yang mengindikasikan adanya unsur emosional, yakni “cengeng”. Melihat hal demikian, juga memperkuat kesimpulan bahwa memang Jawapos.com sudah memiliki perhatian terhadap isu sensitivitas gender. Dikarenakan kata “cengeng” selama ini banyak dilekatkan pada diri perempuan.

Sebagai penguat hasil penemuan, dalam penelitian ini juga akan dikomparasikan dengan Indikator Sensitivitas Gender yang disusun oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan dipublikasikan oleh UNESCO pada tahun 2012.

Terdapat 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan, yakni; Keberimbangan gender di antara para pengambil keputusan di organisasi media; Perlakuan dan Pengakuan terhadap kapasitas perempuan; Upah setara; dan Keseimbangan antara hidup dan pekerjaan.

Dalam indikator pertama, di dapatkan bahwa Jawapos.com hanya memiliki satu Pegawai perempuan di tingkat redaktur. Sesuai dengan penemuan Widaningsih (1999) yakni salah satu faktor mengapa perusahaan media merupakan produk patriarkhi dengan sensitivitas gender yang rendah ialah dikarenakan para aktor yang bekerja di perusahaan media ialah didominasi dengan kaum laki-laki,⁷⁵ ternyata juga tidak terbukti dalam tubuh media Jawapos.com. Hal ini diketahui bahwa jumlah pekerja dalam redaksi Jawapos.com sebanyak 26 dari 37 karyawannya berjenis kelamin laki-laki. Berikut tabel terkait data karyawan di Jawapos.com:

Tabel 5.1
Data Karyawan Jawapos.com

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
Dhimas Ginanjar Satria Perdana	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab	Laki-Laki
Ilham Safutra	Kepala Liputan	Laki-Laki
Ainur Rohman	Redaktur	Laki-Laki
Banu Adikara	Redaktur	Laki-Laki
Bintang Pradewo	Redaktur	Laki-Laki
Edy Pramana	Redaktur	Laki-Laki
Eko Dimas Ryandi	Redaktur	Laki-Laki
Kuswandi	Redaktur	Laki-Laki

⁷⁵ Titi Widaningsih, *Loc.cit*

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
Latu Ratri Mubyarsah	Redaktur	Perempuan
Mohamad Nur Asikin	Redaktur	Laki-Laki
M. Dinarsa Kurniawan	Redaktur	Laki-Laki
Estu Suryowati	Asisten Redaktur	Perempuan
Nurul Adriyana Salbiah	Asisten Redaktur	Perempuan
Abdul Rahman	Reporter	Laki-Laki
Gunawan Wibbisono	Reporter	Laki-Laki
Gugun Gumilar	Reporter	Laki-Laki
Marieska Harya Virdhani	Reporter	Perempuan
Muhammad Ridwan	Reporter	Laki-Laki
Rian Alfianto	Reporter	Laki-Laki
Romys Binekasri	Reporter	Laki-Laki
Sabik Aji Taufan	Reporter	Laki-Laki
Saifan Zaking	Reporter	Laki-Laki
Dery Ridwansah	Fotografer	Laki-Laki
Adnan Reza Maulana	Desain Grafis	Laki-Laki
Ane Herfira	Creative Content	Perempuan
Juwita K. Ginting	Sekretaris Redaksi	Perempuan
Fajar Budihartono	Research & Development	Laki-Laki
Ahmad Aan Tory Tonang	Research & Development	Laki-Laki
Steven Clinton	Mobile Apps	Laki-Laki
Indra Sanjaya	AdsOp & Programmatic	Laki-Laki
Aisyah Jatu Kusumawati	Account Executive (Surabaya)	Perempuan
Karina Kusuma Halim	Account Executive (Surabaya)	Perempuan
Arkhandhito Putra	Account Executive (Jakarta)	Laki-Laki
Agita Nurzakiah	Account Executive (Jakarta)	Perempuan
Rahadyan Prabhasworo	Account Executive (Jakarta)	Perempuan
Vaya Vanessa	Account Executive (Jakarta)	Perempuan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
Sanindiana	Programmatic & Partnership	Perempuan
Kusumaramadhanti		

Sumber: Jawapos.com, diolah. (2021)

Untuk indikator kedua, di dapatkan bahwa Jawapos.com menerapkan sistematika kerja yang sangat flexible. Tidak ada perlakuan khusus di antara para pekerja laki-laki dan perempuan. Sementara untuk indikator ketiga dan ke-empat, didapatkan bahwa selama berdirinya Jawapos.com, tidak pernah terjadi suatu gejolak yang dilakukan oleh para pekerjanya baik berupa protes atau bahkan demo mogok kerja.

Dari pemaparan tersebut, Jawapos.com melalui artikel-artikel berita yang telah dipublikasikan secara tidak langsung menerapkan asumsi bagaimana konstruksi realitas sosial tercipta, yakni dengan dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dapat terlihat bahwa dengan menerbitkan beberapa artikel dengan topik bahasan yang sama. Seolah Jawapos.com menginginkan para pembacanya mendapat informasi yang lebih detail sehingga asumsi-asumsi yang berkembang lebih variatif. Kemudian, dari proses produksi berita, Jawapos.com juga tidak terlepas dari keikutsertaannya dalam mempengaruhi realitas yang berkembang di masyarakat, dalam pembahasan aspek yang ditonjolkan menjadi poin-poin penting yang dapat digarisbawahi tentang bagaimana Jawapos.com berusaha mempengaruhi opini dan pandangan publik.

5.2 Tahapan Media Jawapos.com dalam Memproduksi Berita

Telah disebutkan dalam bagian landasan teori bahwa dalam penelitian ini juga akan menggunakan teori konstruksi realitas media massa oleh Bungin (2000) melalui disertasinya yang berjudul *Konstruksi Sosial Media Massa: Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*.⁷⁶ Dalam disertasi tersebut, iklan televisi menjadi objek penelitian untuk melihat bagaimana konstruksi realitas yang tercipta sekaligus mengkritik teori konstruksi realitas sosial milik Berger dan Luckman.⁷⁷ Meskipun dengan objek yang tidak sama, namun kedua objek ini sejatinya memiliki kesamaan, yakni memiliki urgensi kuat sebagai trend media penyalur informasi di kalangan masyarakat. Merujuk pada tahun penelitian yang dilakukan oleh Bungin (2000) yakni pada tahun 2000 di mana perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) masih belum pesat, sehingga televisi menjadi media utama masyarakat dalam mengonsumsi sebuah informasi. Berbeda dengan trend yang terjadi di sekitar 2 (dua) dasawarsa kemudian, di mana penelitian ini dilakukan, yang menjadikan internet dan produk media *online* menjadi *platform* yang kerap digunakan oleh masyarakat. Dengan begitu, asumsi bahwa masing-masing menjadi primadona penyampaian informasi pada masanya menjadi alasan kuat untuk mengkomparasikan teori Bungin (2000).

Guna memperkuat pembahasan mengenai tahapan konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh Jawapos.com, maka dalam pembahasan yang terkandung

⁷⁶ Bungin (2000), *Loc.cit*

⁷⁷ Adapun alasan mengapa Bungin (2000) mengkritik teori Berger dan Luckman ialah terkait adanya faktor media TV dalam konstruksi sosial yang tidak terpikirkan oleh Berger dan Luckman sebelumnya. *Ibid.*

dalam bagian ini, diambil dari hasil wawancara dengan narasumber terkait; yakni Bapak Ilham Safutra selaku Kepala Liputan Jawapos.com. Membicarakan sebuah produksi berita, tentu erat kaitannya dengan proses atau tahapan dalam menyusun sebuah artikel berita itu sendiri. Dari mulai memilih topik yang akan diangkat, pemilihan narasumber hingga penyusunan konstruksi struktur berita itu sendiri.

Secara garis besar, dapat dilihat dalam bagan berikut terkait mekanisme yang dijalankan oleh media Jawa Pos dalam memproduksi berita.



Bagan 5.1 Alur Tahapan Produksi Berita Media Jawa Pos



Sumber: Interview Pak Iham, Diolah. (2021)

Dalam teori Bungin (2000) yang telah dijelaskan dalam bagian kajian teori bahwa terdapat tiga tahapan dalam pembentukan suatu konstruksi realitas media massa. *Pertama*, tahap menyiapkan materi konstruksi; *kedua*, tahap sebaran konstruksi; dan *ketiga* tahap pembentukan konstruksi. Dipadukan dengan hasil wawancara oleh narasumber Ilham Safutra, selaku kepala liputan Jawapos.com, penjelasan berikut akan membahas terkait komparasi keduanya.

Dalam tahap pertama, alur tahapan produksi berita yang didapatkan dari proses wawancara menemukan bahwa tahapan yang dilakukan ialah reporter yang bertugas untuk turun lapang mencari materi-materi berita dan kemudian diserahkan ke redaktur untuk dilakukan penyuntingan. Melihat bagaimana proses yang berlangsung tersebut, menjadikan sebuah titik temu bahwa hasil produksi sebuah berita kemudian sangat bergantung di tangan reporter dan redaktur dalam mengolah struktur dan isi dari berita itu sendiri. Perspektif mana yang akan diangkat hingga hal mana yang akan menjadi sebuah penonjolan aspek berada di tangan reporter yang mengemas tahap awal sebuah berita yang kemudian diserahkan ke meja redaktur untuk dilakukan penyesuaian dan penyuntingan hingga mencapai sebuah keputusan apakah berita tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan.

Dalam teori Bungin (2000) dikatakan bahwa dari proses produksi berita di meja redaktur ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga fokus utama media dalam mengangkat kasus, yakni harta, kedudukan (tahta), dan perempuan (wanita). Ketika ditanyakan mengenai isu apa yang dimungkinkan paling diminati, Pak Ilham menjawab sebagai berikut:

“Selama ini, berita yang paling diminati pasti yang berkaitan dengan perut. Artinya, misalnya: gaji naik, harga sembako naik, kasus yang berkaitan dengan uang seperti sengketa tanah yang walaupun subjeknya bukan pejabat publik tapi selalu rame dan dibaca.”⁷⁸

Dari pernyataan Pak Ilham selaku Ketua Liputan Jawapos.com tersebut menunjukkan bahwa apa yang terpikirkan oleh Bungin (2000) masih relevan hingga sekarang. Di mana *urusan perut* yang dimaksud oleh Pak Ilham merupakan salah satu bentuk dari banyaknya isu terkait tentang harta dalam konsep milik Bungin (2000). Kemudian, selain *urusan perut*, Pak Ilham juga menambahkan pernyataan yang dapat menguatkan fokus lain media dalam mengangkat isu, yakni terkait dengan tahta.

“...ada yang menarik, ketika berhubungan TNI/ Polri atau Kriminal pasti akan banyak diminati oleh pembaca, kemudian berkaitan dengan pangkat.”⁷⁹

Kemudian, terkait dengan fokus ketiga yakni perempuan (wanita) tidak ditemukan dalam pernyataan dari Pak Ilham. Hal ini didasarkan ketika melihat *Google Analytics* sebagai alat untuk mengetahui bagaimana trend pembaca dalam merespon suatu isu, tidak ditemukan tentang perempuan dan gender dalam 10 top isu yang terdapat dalam *Google Analytics* selama bulan Januari-Maret 2021 sesuai dengan pernyataan Pak Ilham selama proses interview.

Selain itu, Bungin (2000) membahas juga terkait hal penting yang dibutuhkan dalam proses penyiapan materi konstruksi realitas sosial, yakni terkait

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

dengan keberpihakan media massa. Ketika melakukan proses Jawapos.com memiliki keberpihakan terhadap kepentingan umum. Hal ini selaras dengan pernyataan Pak Ilham sebagai berikut:

“Kita sudah ada rulesnya. Jika tidak ada lagi ranah kepada kepentingan publik, atau lebih ke memicu ke kehebohan atau kegaduhan yang tidak berkesudahan itu tidak akan kita garap. Karena tidak akan ada ujungnya. Karena salah satu fungsi media ialah problem solving. Media berisi tawaran-tawaran sebuah penyelesaian masalah bagi publik, harusnya. Kalau sudah memicu masalah, bukan media lagi namanya.”⁸⁰

Dalam tahap kedua, yakni tahapan sebaran konstruksi. Pada tahap ini memuat bagaimana proses media dalam mempublikasikan berita yang telah digarap. Merujuk hal tersebut, menurut penuturan Pak Ilham menyatakan bahwa memang proses yang dilalui Jawa Pos dalam mempublikasikan berita memang berbeda, di mana dalam media cetak melalui proses yang ketat. Sementara untuk media online, lebih tepatnya Jawapos.com tidak seketat proses yang dilalui untuk publikasi di media cetak. Hal ini selaras dengan pernyataan Pak Ilham sebagai berikut:

“...seleksi beritanya (media online) tidak seketat di koran. Kalau di koran berjenjang dan ada keputusan berita yang dilahirkan untuk esok hari. Karena durasi berita itu lahir kan memakan waktu sekitar 6-8 jam.... (sementara untuk media online) bisa jadi berita dikirim oleh reporter prosesnya hanya dua jam paling lama. Bisa juga hanya setengah jam selama berita penting.”⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

Dari pernyataan itu juga dapat terlihat bagaimana penerapan *real time* oleh Jawa Pos sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bungin (2000). Di mana untuk media elektronik, konsep *real time* ini berarti pada saat itu juga berita disiarkan dan sampai ke telinga pemirsa. Sementara asumsi media cetak, terdiri dari beberapa konsep seperti terbitan harian, terbitan mingguan, terbitan beberapa mingguan dan terbitan bulanan. Melihat bagaimana proses yang dilalui oleh Jawa Pos dalam memproduksi berita untuk media *online* yang sangat memangkas waktu dan tahapan sementara untuk publikasi media cetak membutuhkan proses yang lebih ketat dan lebih lama, membuktikan bahwa konsep *real time* dalam publikasi berita ini tidak memiliki makna yang tertutup. Melainkan memiliki sebuah kedinamisan akan sebuah makna di mana dimungkinkan antar definisi sangat bertolak-belakang. Namun, Bungin (2000) menggarisbawahi bahwa pada dasarnya konsep *real time* utamanya ketika para pembaca selaku target segmentasi publikasi berita merasa tepat ketika menikmati suatu berita.

Ketepatan waktu dalam suatu momen ini juga kerap digunakan oleh Jawapos.com dalam mempublikasi suatu berita yang sekiranya menjadi isu yang paling ditunggu oleh masyarakat. Dengan anggapan seperti itu, tidak jarang proses publikasi untuk media *online* pun mengalami sebuah pemangkasan di mana hanya memerlukan waktu yang sangat singkat hingga menghasilkan sebuah berita yang dapat dinikmati oleh pembaca. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut:

“...bisa jadi berita dikirim oleh reporter prosesnya hanya dua jam paling lama. Bisa juga hanya setengah jam selama berita penting.... Apa yang ditulis oleh reporter langsung dinaikkan. Karena berita tersebut memenuhi

unsur-unsur yang diperlukan. Pertama, pejabat publik. Kedua, kebutuhan publik. Dan, sales of used-nya tinggi.”⁸²

Dalam tahap ketiga yakni tahap pembentukan konstruksi. Pada tahap ini memuat perpaduan bagaimana berita itu dipublikasi dengan respon pembaca dan proses yang dilalui oleh reporter dan redaktur dalam penyusunan struktur dan isi dari berita itu sendiri. Dalam tahap pembentukan konstruksi realitas ini tidak lepas dari pengaruh kuasa para agen media (reporter dan redaktur) dalam menyusun struktur dan isi suatu berita. Sama halnya pada tahap menyiapkan materi konstruksi, pada tahap ini juga pada akhirnya bergantung pada keputusan para agen media untuk menjadikan suatu berita itu menjadi *good news* atau *bad news*. Hal ini selaras dengan penjelasan narasumber sebagai berikut:

“Untuk isu-isu tertentu, ketika isu tersebut misalnya berada di ranah SARA. Tapi penting untuk publik. Maka, ada sikap. Contoh, di Sumatera Barat ada berita tentang jilbab, di mana non-muslim wajib berjilbab. Semula, sepanjang faktanya ada akan dinaikkan. Karena ada berita yang udah digarap tapi tidak jadi naik itu biasanya kontennya kita baca dulu. Kontennya itu terlalu menggiring, atau kepentingan publik, itu nanti akan dirapatkan secara internal di redaksi. Antara saya, pimpinan redaksi, dan beberapa redaktur. Itu secara garis besar, dan itu tidak terlalu sensitif.”⁸³

Setelah itu, ketika berita telah dipublikasi dan menjadi konsumsi masyarakat, terdapat tahapan konfirmasi. Tahapan ini bagi media ditujukan untuk melihat bagaimana reaksi pembaca atas konstruksi realitas yang diselipkan dalam struktur berita yang dipublikasikan. Berbicara tentang media *online*, pastinya untuk mengukur bagaimana *trend* yang sedang berkembang sangat mudah. Hal ini

⁸² Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

dikarenakan telah banyak aplikasi yang tersedia dan dapat digunakan untuk mengukurnya. Salah satunya yang digunakan juga oleh Jawapos.com ialah *Google Analytics*. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut:

“Saya kembali lagi ke perbedaan media cetak dan media online, kalau di online ada alat ukur. Namanya Google Analytics...Google Analytics untuk mengukur bagaimana isu tersebut diminati atau tidak. Saya bukakan, sepanjang Januari hingga Maret 2021. 25 berita yang paling banyak dibaca, tertinggi terkait Surabaya dan Walikota yang baru terkait janjinya untuk menuntaskan Covid-19 dan dampak paling tinggi di Surabaya. ada yang menarik, ketika berhubungan TNI/ Polri atau Kriminal pasti akan banyak diminati oleh pembaca, kemudian berkaitan dengan pangkat, atau terkait dengan perut.”⁸⁴

Setelah itu, hasil dari *Google Analytics* dapat menjadi bahan pertimbangan para agen media untuk membuat keputusan sikap dalam mengolah suatu isu yang ada. Hal ini juga secara eksplisit dijelaskan oleh Pak Ilham bahwa jika memang isu tersebut merupakan berita yang penting, maka tidak menutup kemungkinan prosesnya sangat singkat. Lebih lengkap dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

“...bisa jadi berita dikirim oleh reporter prosesnya hanya dua jam paling lama. Bisa juga hanya setengah jam selama berita penting.... Apa yang ditulis oleh reporter langsung dinaikkan. Karena berita tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Pertama, pejabat publik. Kedua, kebutuhan publik. Dan, sales of used-nya tinggi.”⁸⁵

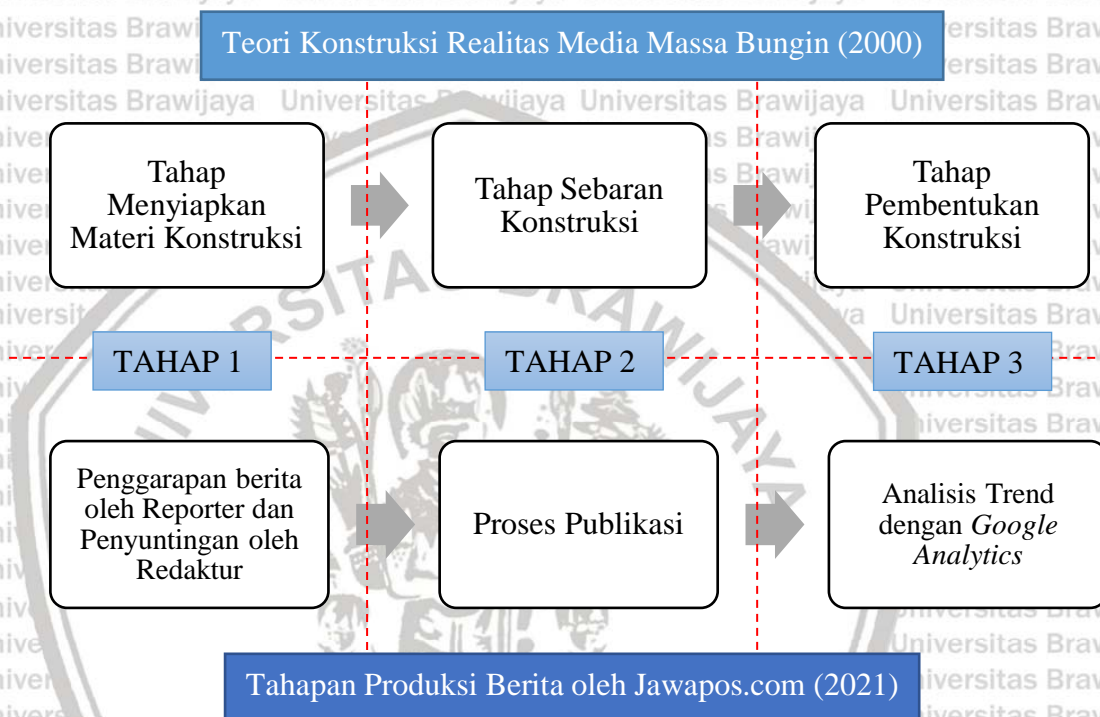
Dengan begitu, pada penghujung pembahasan bagian ini, sejatinya telah terdapat benang merah antara proses produksi berita yang dilakukan oleh Jawapos.com jika dikomparasikan dengan teori konstruksi realitas media massa

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

milik Bungin (2000). Untuk mempermudah, akan disajikan sebuah bagan berikut ini terkait komparasi antara keduanya.

Bagan 5.2
Mind-map Tahapan Konstruksi Realitas Jawapos.com



Sumber: Diolah Penulis, (2021).

5.3 Feminist Standpoint Jawapos.com

Ketika membicarakan tentang bagaimana keberpihakan media dalam mempengaruhi lahirnya sebuah konstruksi realitas melalui publikasi media yang telah di bahas pada bagian sebelumnya, pasti erat kaitannya dengan bagaimana posisi media itu sendiri dalam melihat sebuah isu. Dalam konteks ini, disebut dengan istilah *standpoint* yang diadopsi dari pemikiran Hartsock yang dikolaborasikan dengan konsep feminisme.

Lebih lanjut, dalam pemikiran West dan Turner telah disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) konsep yang dapat dijadikan bahan untuk melihat bagaimana *standpoint* yang dimiliki. *Pertama*, konsep *standpoint*. Dalam konsep ini guna melihat bagaimana media tersebut memposisikan diri dalam melihat objek yang akan dimuat dalam isi berita. Dari berita-berita yang berhasil dihimpun dan telah dianalisis menggunakan teknik analisis framing Entman, bahwasanya Jawapos.com memang tidak terlalu fokus untuk membahas hal yang erat kaitannya dengan sensitivitas gender dalam tema pemberitaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Tidak seperti data-data yang telah disajikan pada sub-bab latar belakang yang menyatakan perusahaan media merupakan produk dari patriarkhi. Dengan begitu, perusahaan media memiliki sensitivitas gender yang rendah. Jawapos.com dalam memberitakan kasus peralihan bantuan mobil PCR ini, justru tidak terfokus kepada tokoh pemimpin perempuan yang digadang-gadang memiliki tendensi ketidakakuran. Isu ketidakakuran antara Khofifah dan Risma ini memang santer terdengar bahkan sejak sebelum drama PCR ini terjadi. Jika Jawapos.com memanfaatkan isu ini dengan menonjolkan sisi pemimpin perempuan yang erat kaitannya dengan perseteruan, maka *standpoint* Jawapos.com ini tidaklah ramah gender. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, bahwa Jawapos.com menonjolkan sisi reaksi emosional salah satu pihak saja yakni Risma yang kecewa atas langkah Pemprov Jatim yang dirasa sangat merugikan Surabaya. Lebih lanjut, Jawapos.com justru menekankan pada langkah yang dinilai sangat merugikan yang telah diambil Pemprov Jatim dengan mengalihkan bantuan mobil PCR. Hasil ini kemudian juga

diperkuat dengan pernyataan narasumber yang membicarakan terkait fungsi media, sebagai berikut:

*“Karena salah satu fungsi media ialah problem solving. Media berisi tawaran-tawaran sebuah penyelesaian masalah bagi publik, harusnya. Kalau sudah memicu masalah, bukan media lagi namanya.”*⁸⁶

Pernyataan Pak Ilham tersebut sejatinya telah dapat dijadikan sebagai suatu *standpoint* yang dimiliki oleh Jawapos.com. Bahwa Jawapos.com akan berupaya dalam menjaga isi beritanya agar tetap berada di ranah yang semestinya, di mana tetap mengutamakan kode etik Jurnalistik.

*“Contoh, misalnya, berita pelantikan Risma kemarin sebagai menteri sosial. Apa yang ditulis oleh reporter langsung dinaikkan. Karena berita tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Pertama, pejabat publik. Kedua, kebutuhan publik. Dan, sales of used-nya tinggi. Risma sangat dibaca oleh siapapun, baik orang Surabaya sendiri maupun di luar daerah. Karena Risma merupakan Menteri Sosial, ruang kerjanya se-Indonesia. makannya, kita naikkan.”*⁸⁷

Dari penuturan tersebut, memperkuat bahwa *standpoint* Jawapos.com dalam melihat kasus yang berkaitan dengan perempuan, tidak mengutamakan untuk fokus terhadap isu gendernya. Melainkan terkait dengan jabatannya yang memiliki lingkup kerja yang luas. Selain itu, merujuk penuturan narasumber yang menyebutkan bahwa dengan identiknya Jawa Pos dengan Surabaya, maka semua hal yang berkaitan dengan Surabaya, pasti akan tinggi minat pembacanya.

Kedua, konsep situated knowledge. Dalam konsep ini menyebutkan bahwa arah pandang seseorang juga dipengaruhi oleh bagaimana pengetahuan dan pengalaman

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

yang dimiliki. Berikut beberapa pengalaman dan penghargaan yang didapatkan oleh Pak Ilham selaku narasumber dalam penelitian ini.

Tabel 5.2
Pengalaman Kerja Narasumber

Nama Perusahaan	Jabatan	Lama
JawaPos.com (Jawa Pos Group)	Kepala Liputan Editor	Juli 2017 – sekarang Januari 2016 – Juli 2017
KORAN SINDO (MNC Group)	Wartawan (Reporter)	April 2011 – Januari 2016
Harian Padang Ekspres (Jawa Pos Group)	Wartawan (Reporter)	Agustus 2007- April 2011

Sumber: Interview Ilham Safutra, Diolah. (2021).

Tabel 5.3
Penghargaan yang Didapat oleh Narasumber

Nama Penghargaan	Tahun
Juara I Anugerah Jurnalistik MH Thamrin PWI Jaya, Kategori artikel umum	2015
Juara II Penghargaan Jurnalistik, Kategori Pemberitaan oleh BPK RI	2015
Juara I Anugerah Jurnalistik MH Thamrin PWI Jaya, kategori artikel Layanan Publik	2014
Nominator Penghargaan MH Thamrin-PWI Jaya, Kategori artikel Layanan Publik	2012

Sumber: Interview Ilham Safutra, Diolah. (2021).

Dengan latar belakang yang dimiliki tersebut, pastinya mempengaruhi narasumber dalam melihat suatu isu yang akan diolah. Hal tersebut diperkuat juga tentang pengetahuan narasumber terkait sepak terjang pemimpin perempuan di Indonesia. Dalam pernyataannya, narasumber menuturkan bahwa jika ingin melihat bagaimana Jawapos.com dalam memperlakukan perempuan, alangkah baiknya juga melihat keseluruhan berita yang telah dipublikasi terkait perjalanan pemimpin perempuan yang telah tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Namun, penulis kemudian menjelaskan bahwa fokus penelitian yang ingin diteliti oleh penulis yakni terkait konflik dan perspektif gendernya. Dari penuturan tersebut, narasumber secara implisit menyatakan bahwa objek perempuan dalam pemberitaan bukan lagi suatu hal yang tabu untuk dibicarakan dan bukan merupakan sebuah komoditas yang pasti laku untuk diperjualbelikan. Dengan memperlakukan pemberitaan terkait perempuan dengan dasar pemikiran yang sangat terbuka, menjadi salah satu faktor mengapa Jawapos.com tidak memiliki sensitivitas gender yang rendah.

Ketiga, terkait dengan konsep bagaimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, atau disebut dengan konsep *sexual division of labor*. Ketika ditanyakan terkait sistem kerjanya melalui narasumber Ibu Nurul Adriyana Salbiah, jawabannya sebagai berikut:

“Sebenarnya saya itu editor *lifestyle* dan kesehatan Mbak. Beberapa kali memang pegang politik maupun birokrasi tapi tdk mendalami. Sebab biasanya hanya mengisi kekosongan editor politik ketika libur atau ada urusan lainnya.”⁸⁸

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Nurul Adriyana Salbiah, Pada 4 Maret 2021.

Melihat bagaimana jalinan sistem kerja yang diterapkan, Jawapos.com dapat dikatakan mengimplementasikan sistem kerja yang *flexible* namun tetap mengutamakan kaidah-kaidah jurnalistik. Hal ini diperkuat dengan ungkapan Pak

Ilham sebagai berikut:

“...media online tidak memiliki keterbatasan ruang untuk menyiarkan sebuah berita. Relatif apapun berita itu digarap oleh reporter, akan naik, sepanjang berita tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah jurnalistik dan berita-berita tersebut mengandung unsur kebutuhan publik, itu pasti akan naik dan dapat ruang di publik.”⁸⁹



⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ilham Safutra, Pada 15 Maret 2021.

BAB VI

PENUTUP

Pada BAB VI ini merupakan bagian penghujung dari laporan penelitian ini.

Di mana pada bagian ini akan menjelaskan secara singkat bagaimana gambaran umum alur penelitian yang dilakukan hingga mendapatkan suatu konklusi. Hasil dari konklusi yang akan dipaparkan pada bagian ini bersifat terbuka, di mana sangat tidak menutup akses untuk menghadirkan sebuah potensi akan konklusi lain yang dapat diambil setelah membaca keseluruhan pembahasan. Bab ini juga menghadirkan keterbatasan penelitian dan rekomendasi guna menjadi suatu peluang untuk penelitian mendatang tentang kajian dengan topik yang sama.

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana media dalam menciptakan framing terhadap sosok perempuan yang memiliki kuasa. Hal ini diakibatkan, sebagian besar literatur mengenai analisis framing yang bernuansa gender selalu menjadikan perempuan lemah sebagai objeknya. Dipadukan dengan teori konstruksi realitas sosial, teori konstruksi realitas media massa dan *feminist standpoint*, penelitian ini berusaha untuk memberikan pembahasan yang komprehensif dalam melihat bagaimana media Jawapos.com dalam memproduksi berita tentang konflik mengenai PCR yang melibatkan dua nama pemimpin perempuan, yakni Risma dan Khofifah.

Hasil dari penelitian ini membawa penulis sampai pada 4 (empat) poin yang dapat disimpulkan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Hasil framing pemberitaan Jawapos.com menunjukkan bahwa Jawapos.com dalam memproduksi berita terkait drama PCR ini menekankan bahwa dengan dilakukannya pengalihan bantuan mobil PCR ini merupakan langkah yang tidak tepat yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Kemudian, langkah Pemprov tersebut menyebabkan memunculkan reaksi emosional dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Reaksi inilah yang menyulut perhatian publik yang kemudian dikaitkan bahwa terdapat tendensi tidak akurnya antara Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa.
2. Dalam perspektif sensitivitas gender, dapat terlihat bahwasanya Jawapos.com sejatinya sudah memiliki sensitivitas gender yang cukup baik. Hal ini dikarenakan walaupun terfokus pada bagaimana reaksi emosional dari Risma, namun Jawapos.com tidak terfokus pada bagaimana drama konflik yang melibatkan dua sosok pemimpin perempuan. Dalam perspektif konflik, sejatinya pemberitaan Khofifah-Risma lebih ke penekanan bahwa langkah pemprov mengambil langkah yang salah dan reaksi emosional yang ditunjukkan oleh Risma. Hal ini dikarenakan Khofifah tidak dibahas sama sekali secara khusus bagaimana pendapatnya dalam artikel berita yang dipublikasikan. Kesimpulan tersebut diambil dengan mengkomparasikan dengan berita yang dipublikasikan Jawapos.com terkait perseteruan antara dua tokoh laki-laki yang juga memiliki kuasa, yakni Ridwan Kamil dan Mahfud MD terkait pernyataan Mahfud dalam kepulangan Habib Rizieq.

3. Tiga tahapan dalam teori Bungin (2000) jika dikomparasikan dengan mekanisme yang dilakukan oleh Jawapos.com menghasilkan;
 - Tahap pertama, tahap menyiapkan materi konstruksi di mana tahap ini berada seutuhnya di meja redaktur dengan bahan pemberitaan yang berasal dari kerja reporter.
 - Tahap kedua, tahap sebaran konstruksi di mana tahap ini ditemukan makna *real time* yang berbeda seperti pemikiran Bungin. Definisi *real time* ini berbeda ketika diterapkan dalam media cetak dengan media online.
 - Tahap ketiga, tahap pembentukan konstruksi yang ditujukan bagi media untuk mengetahui bagaimana sebuah *trend* sebagai reaksi atas publikasi berita yang dilakukannya. Dengan bantuan *Google Analytics*, Jawapos.com dapat terus melihat bagaimana *trend* yang terjadi.
4. Dalam konsep *standpoint* ditemukan bahwa Jawapos.com memang tidak terlalu fokus untuk membahas hal yang erat kaitannya dengan sensitivitas gender dalam tema pemberitaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Kemudian, dalam konsep *situated knowledge*, objek perempuan dalam pemberitaan bukan lagi dilihat sebagai suatu hal yang dijadikan komoditas yang pasti laku untuk diperjualbelikan. Dengan memperlakukan pemberitaan terkait perempuan dengan dasar pemikiran yang sangat terbuka, menjadi salah satu faktor mengapa Jawapos.com tidak memiliki sensitivitas gender yang rendah. Sementara, dalam konsep *sexual division of labor*, didapatkan bahwa Jawapos.com tidak membedakan sistem

kerja antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dikarenakan, sistem kerja yang *flexible* diterapkan di mana siapa yang memang sedang senggang dapat mengambil alih pekerjaan rekannya yang sedang berhalangan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada objek dan periode penelitian. Di mana penulis hanya mencantumkan media Jawapos.com dalam menganalisis bagaimana sensitivitas gender yang dimiliki. Sementara perusahaan media yang bersarang di Indonesia sangatlah banyak, dan akan menghasilkan penjabaran dan temuan penelitian yang menarik untuk disumbangkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

6.3 Rekomendasi

Kajian *feminist standpoint* ini memang masih sangat jarang ditemukan dalam perkembangan studi Ilmu Politik. Padahal, telah banyak fenomena politik yang mengangkat citra perempuan yang semakin hari semakin diakui dalam ranah publik. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan oleh penulis:

1. Studi *framing* berita dengan topik pemimpin daerah perempuan selama ini masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan fakta di lapangan yang menampilkan bahwa jika dilihat *track record* pemimpin daerah perempuan di Indonesia memang awalnya masih sangat minim. Namun, berbeda dengan sekarang, di mana pemimpin perempuan sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Sampai saat ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian dengan menggabungkan teori konstruksi realitas sosial dan *feminist standpoint* sebagai landasan teori yang digunakan untuk melihat fenomena pemberitaan di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis topik serupa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan E-book

Bandur, A. (2014). *Penulisan Kualitatif: Metodologi, Desain & Teknik Analisis Data dengan NVIVO10*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Basrowi, & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia.

Berger, P. L., & Luckman, T. (2008). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan Terj. Hasan Basari*. Jakarta: LP3S.

Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan, Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana.

Darma, Y. A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.

Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.

Hotman Siahaan, dkk. (2001). *Pers yang Gamang Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur*. Jakarta: Institut Studi Arus Informas.

K, S. S. (2017). *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2011). *Media Online: Pembaca, Laba dan Etika; Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.

Miles, M. B., & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP.

Moleong, D. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda.

Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana, 2008.*, Jakarta: Kencana.

Robert K. Yin, (2015). *Studi Kasus: Desain & Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar, H. (2008). *Metode Penulisan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Walter, L. (2014, Oktober 3). *Public Opinion*. United States: Gutenberg Ebook.
Retrieved from Gutenberg Ebook: <http://www.gutenberg.org/etext/6456>

West, R., & Turner, L. H. (2019). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: Mc Graw Hill Education.

Jurnal Artikel

Christiani, L. C. (2015). Spasialisasi Grup Media Jawa Pos. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 12 No. 2*, 199-212.

Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi 7:1*, 1-9.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*.

Hapsari, Nurkuta, (2017), Framing Women Politician in Democratic Environment: A Study of Megawati Soekarno Putri and Hillary Clinton. *RUBIKON Vol. 4 No. 1*, 11-29

Hutami, M. F., & Sjarifah, N. A. (2018). Framing Media Online Tribunnews.Com Terhadap Sosok Perempuan dalam Berita Video Pornografi Depok. *Kajian Jurnalisme Vol. 02 No. 01*, 25-43.

Novita, D. (2016). Konstruksi Media Dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi (Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum Kompas Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh). *Jurnal AKP Vol. 6 No. 2*, 73-103.

Nugroho, C. (2018). Relasi Kuasa Media dan Isu Gender dalam Program Televisi di Indonesia. *ProTVF Vol. 2 No. 2*, 111-126.

Santoso, P. (2016). Konstruksi Sosial Media. *Al-Balagh Vol. 1 No. 1*, 30-48.

Susilo, D., & Haezer, E. (2017). Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Berita Pemerikosaan di Teks Media Daring. *Kawistara Volume 7 No. 1*, 157-174.

Wulandari, D. (2010). Konstruksi Pemberitaan Politik Ber-isu Gender. *Jurnal Interaksi*, 28-33.

Yusuf, I. A. (2004). Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 7 Nomor 3*, 351-376.

Artikel Berita dan Website

Adam, A. (2017, Mei 18). *Tentang Jambak-Jambakan dan Cakar-Cakaran Perempuan*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/tentang-jambak-jambakan-dan-cakar-cakaran-perempuan-coXQ>

Gerintya, S. (2017, September 17). *Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>

KemenPPPA. (2018, November 27). *Pilkada Serentak 2018 Perempuan Terpilih menjadi Kepala Wakil Kepala Daerah Meningkatkan*. Retrieved from
Kemenpppa.go.id:

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1977/pilkada-serentak-2018-perempuan-terpilih-menjadi-kepala-wakil-kepala-daerah-meningkat/>

Kusuma, W. (2020, Februari 20). *Penetrasi Internet di Indonesia Capai 64 Persen*. Retrieved from KOMPAS.com:

<https://tekno.kompas.com/read/2020/02/20/14090017/penetrasi-internet-di-indonesia-capai-64-persen>

Primaya Hospital. (n.d.). *Apa Itu Rapid Test?* Retrieved from Primaya Hospital:

<https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapidtest/#:~:text=Swab%20adalah%20cara%20untuk%20memperoleh,sin gkatan%20dari%20polymerase%20chain%20reaction/>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, retrieved from <https://jdih.kpu.go.id/countuu-6a4a545652544e45>

Skripsi

Rhemrev, Jessica Andrea, (2014), "Representasi Perempuan dalam Majalah Pria (Studi Gender, Subjektivitas dan Representasi)", FISIP Universitas Indonesia.

Harumningtyas, Sekar, (2014), Penggambaran Perempuan Melalui Bahasa Media Massa, FISIP Universitas Indonesia.

Puspitorukmi, Nila, (2019), Konstruksi Feminisme dalam Media Sosial (Analisis Wacana Kritis tentang Feminisme pada Akun @magdaleneid di Instagram, FISIP Universitas Negeri Surakarta.

Tesis

Widaningsih, Titi, (1999), "*Orientasi pemberitaan media massa nasional dalam isu perempuan sebagai pemimpin politik*", Tesis Universitas Indonesia.

Diah Wulandari, (2010), "*Konstruksi Pemberitaan Ber-isu Gender*", Tesis Universitas Diponegoro

Butler, Jazmyne E., (2013), "*Professional First Ladies In the Media: Framing of Clinton, Bush and Obama In the Washington Post*", Thesis University of Southern Mississippi.

Baker, Natasha L.,(2017), "*The Framing of Hillary Clinton: A Content Analysis of Media Discourse on Clinton's Candidacy in the 2016 Election*", Thesis University of Dayton.

Disertasi

Bungin, Burhan, (2000), "*Konstruksi Sosial Media Massa Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*", Pascasarjana Universitas Airlangga.

LAMPIRAN I CURRICULUM VITAE NARASUMBER

1) Riwayat Pribadi

Nama	Ilham Safutra
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat dan tanggal lahir	Padang, 15 Juni 1985
Nomor KTP	1371041506850008
Status Perkawinan	Menikah
Golongan Darah	O
Alamat	Jalan Wijayakusuma III no 4, Perumnas Parung Panjang III, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Nomor HP	081374351086
Hobi	Membaca, menulis, traveling, mendengar musik, olahraga

2) Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun
Pendidikan tinggi (Strata 1)	Universitas Andalas, Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Indonesia	2004-2009
IPK	2,95 (dua koma Sembilan lima)	
SMA	MAN 2 Padang	2000-2003
SMP	SMP 12 Padang	1997-2000
SD	SD 10 Alai Timur Padang	1991-1997

3) Pendidikan Informal

Nama Pendidikan	Tempat	Tahun
Journalist Fellowship Program, PT MRT Jakarta	Tokyo dan Osaka Jepang	8-14 November 2014

4) Riwayat Pekerjaan

Nama Perusahaan	Jabatan	Lama
JawaPos.com (Jawa Pos Group)	Kepala Liputan Editor	Juli 2017 – sekarang Januari 2016 – Juli 2017
KORAN SINDO (MNC Group)	Wartawan (Reporter)	April 2011 – Januari 2016
Harian Padang Ekspres (Jawa Pos Group)	Wartawan (Reporter)	Agustus 2007-April 2011

5) Penghargaan

Nama Penghargaan	Tahun
Juara I Anugerah Jurnalistik MH Thamrin PWI Jaya, Kategori artikel umum	2015
Juara II Penghargaan Jurnalistik, Kategori Pemberitaan oleh BPK RI	2015
Juara I Anugerah Jurnalistik MH Thamrin PWI Jaya, kategori artikel Layanan Publik	2014

Nominator Penghargaan MH Thamrin-PWI Jaya, 2012
Kategori artikel Layanan Publik

6) Riwayat Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Jabatan
Komunitas Muda Minang Rantau	Sekretaris Jenderal	2012-sekarang
EO Sastra Production	Koordinator Pengawas Pengurus	2008-2009
EO Sastra Production	Manager Operasional	2005/2008
EO Sastra Production	General Secretary	2005/2008
EO Sastra Production	Pendiri	2005
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Andalas	Ketua	2006/2007
HMJ Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Andalas	Koordinator Bidang Kesenian dan Pertunjukan	2005/2006
Komisaris tingkat angkatan 2004	Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Andalas	2004-2009

OSIS MAN 2 Padang	Koordinator Bidang Olahraga	2001/2002
OSIS MAN 2 Padang	Wakil Ketua MPK	2000/2001

7) Riwayat Kepanitiaan

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
Festival Musik Rock "Boom Sastra IV" Fakultas Sastra Univeristas Andalas	Streering commite	2008
Festival Musik Rock "Boom Sastra III" Fakultas Sastra Univeristas Andalas	Streering commite	2007
Sport Challenge	Sekretaris Pelaksana	2006
XL Mobile Trailer	Panitia	2006
English Debate Contest	Panitia	2006
Festival Musik Rock "Boom Sastra II" Fakultas Sastra Univeristas Andalas	Wakil Ketua Pelaksana	2006
Panitia Pelatihan Teater Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Andalas	Steering Comite (SC)	2006
Student Day Fakultas Sastra Unand	Sekretaris Panitia	2006
Malam Tadarus Puisi	Ketua Pelaksana	2005
Gebyar Seni Mahasiswa (Gesima) Fakultas Sastra Unand	Ketua Pelaksana	2004

8) Riwayat Pelatihan/Seminar

Nama Pelatihan/Seminar	Tahun
------------------------	-------

Pelatihan Pemuda Antikorupsi yang diselenggarakan KPK	2006
Pelatihan Leadership ESQ 165 untuk aktivis kampus	2006

Demikialah curriculum vitae ini saya buat, segala data tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dapat menjadi referensi tentang diri saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Ilham Safutra



LAMPIRAN II TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PAK ILHAM SAFUTRA

Bagaimana mekanisme Jawapos.com dalam memproduksi berita?

Berita itu ada dua sumber yang kita hasilkan. Pertama, dari reporter sendiri. Kedua, dari garapan editor sendiri yang bersifat *relate*. Jadi sumbernya bisa dari antara atau grup-grup. Umumnya berita-berita yang tidak terjangkau oleh reporter kita. Contoh, Jawapos.com walaupun hidupnya Jawapos yang berada di Surabaya, tapi personilnya lebih banyak di Jakarta dan di Surabaya hanya satu orang. Sehingga, sumber-sumber berita Surabayanya lebih banyak supply dari koran atau sekarang ada reporter kita juga satu orang perempuan yang di Surabaya yang memang kita khususkan untuk kasus-kasus di Surabaya. Sementara untuk daerah lain namun tetap berada di Jawa Timur, supply berita itu dari antara atau dari grup, seperti radar yang memang ada di setiap daerah.

Kemudian, seleksi beritanya tidak seketat di koran. Kalau di koran berjenjang dan ada keputusan berita yang dilahirkan untuk esok hari. Karena durasi berita itu lahirkan memakan waktu sekitar 6-8 jam. Kalau di koran, jika diterbitkan untuk besok, dikatakan berita itu muncul, maka sekitar jam 3 sore sudah harus diputuskan apa yang akan ditayangkan. Berarti proses produksi berita, reporter yang telah mencari berita dari pagi kemudian terdapat proses penyaringan di editor. Sebelum itu, terdapat *listing* atau setoran judul berita, gambaran berita. Itu untuk media cetak.

Kemudian terdapat proses penyesuaian *space*, untuk halaman ini halaman berikutnya berisi berita apa saja.

Lalu, ada berita yang terdaftar dan ada berita yang terbuang atau tereliminasi. Disitu baru ada skala berita, kemudian dalam hal teknis ada editing oleh redaktur. Sebelum tayang adalagi seleksi oleh redaktur pelaksana, untuk mengakurasi lagi berita itu seperti apa untuk tayang. Sampai nanti ada pracetak dan cetak dan paginya sudah beredar.

Sementara untuk di media online, berita itu didapatkan anggaplah di jam 10 siang, diliput oleh reporter, ada proses wawancara dan observasi dan semacamnya, maka

jam 11 siang berita sudah diproduksi oleh reporter. Disini, media online tidak memiliki keterbatasan ruang untuk menyiarkan sebuah berita. Relatif apapun berita itu digarap oleh reporter, akan naik, sepanjang berita tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah jurnalistik dan berita-berita tersebut mengandung unsur kebutuhan publik, itu pasti akan naik dan dapat ruang di publik. Sehingga produksi berita tidak sepanjang yang koran dan cetak. Nah, bisa jadi berita dikirim oleh reporter prosesnya hanya dua jam paling lama. Bisa juga hanya setengah jam selama berita penting. Contoh, misalnya, berita pelantikan Risma kemarin sebagai menteri sosial. Apa yang ditulis oleh reporter langsung dinaikkan. Karena berita tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Pertama, pejabat publik. Kedua, kebutuhan publik. Dan, sales of used-nya tinggi. Risma sangat dibaca oleh siapapun, baik orang Surabaya sendiri maupun di luar daerah. Karena Risma merupakan Menteri Sosial, ruang kerjanya se-Indonesia. makannya, kita naikan.

Untuk menyeleksi berita layak atau tidaknya itu ada di redaktur, apakah ada faktor eksternal di luar meja redaktur yang dapat mempengaruhi keputusan dalam menyeleksi berita layak atau tidak?

Bisa, untuk isu-isu tertentu. Ketika isu tersebut misalnya berada di ranah SARA. Tapi penting untuk publik. Maka, ada sikap. Contoh, di Sumatera Barat ada berita tentang jilbab, di mana non-muslim wajib berjilbab. Semula, sepanjang faktanya ada akan dinaikkan. Karena ada berita yang udah digarap tapi tidak jadi naik itu biasanya kontennya kita baca dulu. Kontennya itu terlalu menggiring, atau kepentingan publik, itu nanti akan dirapatkan secara internal di redaksi. Antara saya, pimpinan redaksi, dan beberapa redaktur. Itu secara garis besar, dan itu tidak terlalu sensitif. Misal, berita di Malang tentang mahasiswa papua. Disitu ada fakta-faktanya. Tapi kalau ada Papua itu hitam, Papua dibuang, itu sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kadangkala kita juga sudah menggariskan kepada reporter, bahwa garis-garis ini tidak perlu untuk digarap. Kita sudah ada *rules*nya. Jika tidak ada lagi ranah kepada kepentingan publik, atau lebih ke memicu ke hehebohan atau kegaduhan yang tidak berkesudahan itu tidak akan kita garap.

Karena tidak akan ada ujungnya. Karena salah satu fungsi media ialah *problem*

solving. Media berisi tawaran-tawaran sebuah penyelesaian masalah bagi publik, harusnya. Kalau sudah memicu masalah, bukan media lagi namanya.

Dari semua topik, topik atau isu apa yang paling banyak diminati itu seperti apa?

Saya kembali lagi ke perbedaan media cetak dan media online, kalau di online ada alat ukur. Namanya *Google Analytics*. Jadi berdasarkan dari dashboard kita untuk memfokuskan untuk melihat di alat ukur tersebut. Selama ini, berita yang paling diminati pasti yang berkaitan dengan perut. Artinya, misalnya gaji naik, harga sembako naik, kasus yang berkaitan dengan uang seperti sengketa tanah yang walaupun subjeknya bukan pejabat publik tapi selalu rame dan dibaca.

Apakah pemberitaan tentang perempuan dan gender ini paling banyak diminati atau tidak?

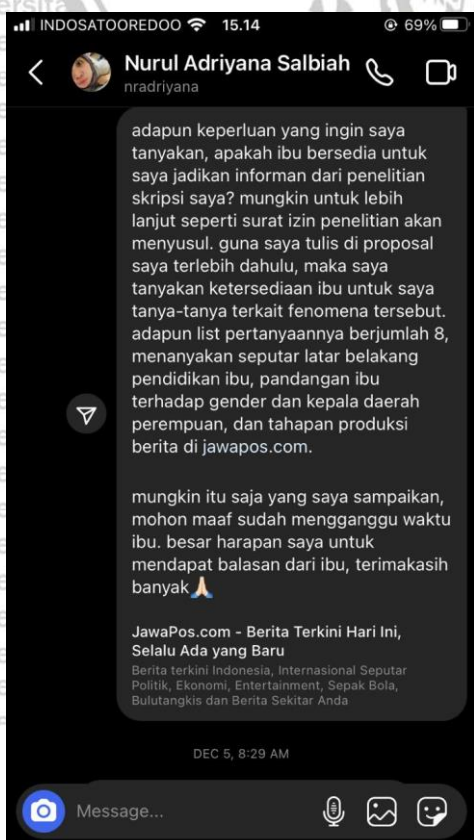
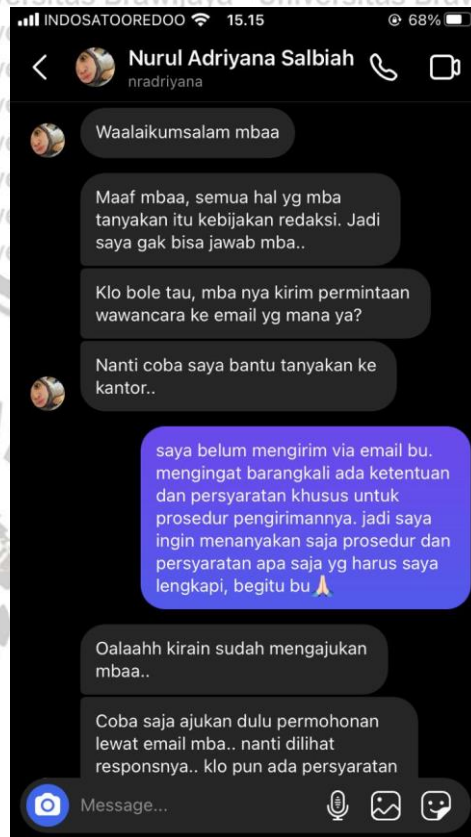
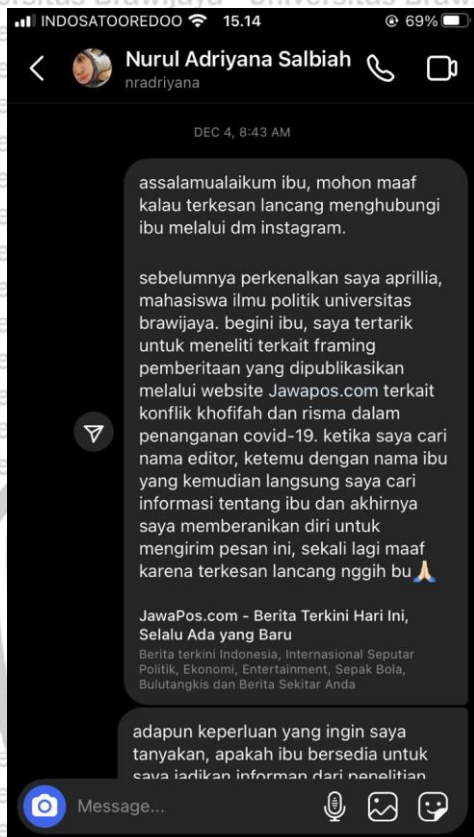
Kalau perempuan, tertentu. Itu tadi, balik ke *Google Analytics* untuk mengukur bagaimana isu tersebut diminati atau tidak. Saya bukakan, sepanjang Januari hingga Maret 2021. 25 berita yang paling banyak dibaca, tertinggi terkait Surabaya dan Walikota yang baru terkait janjinya untuk menuntaskan Covid-19 dan dampak paling tinggi di Surabaya. ada yang menarik, ketika berhubungan TNI/ Polri atau Kriminal pasti akan banyak diminati oleh pembaca, kemudian berkaitan dengan pangkat, atau terkait dengan perut.

Untuk pertimbangan dalam memilih narasumber, bagaimana?

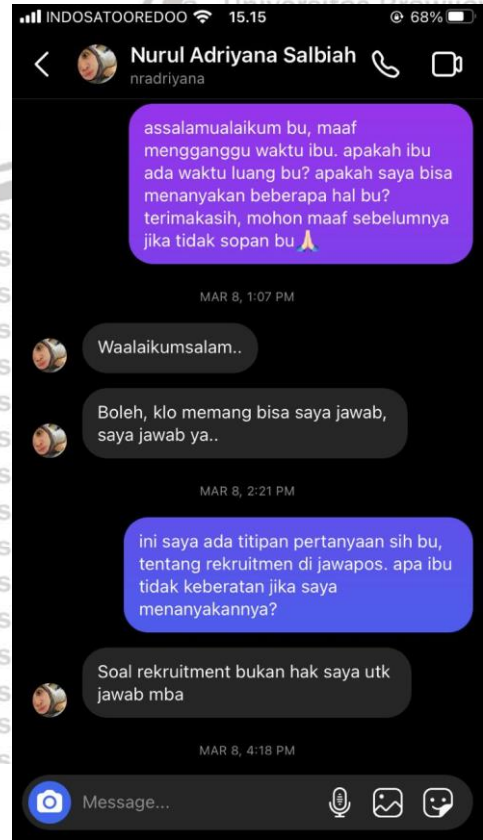
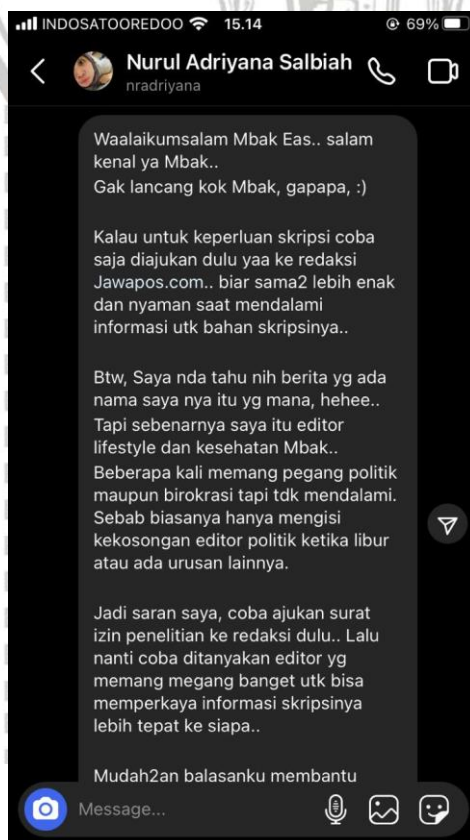
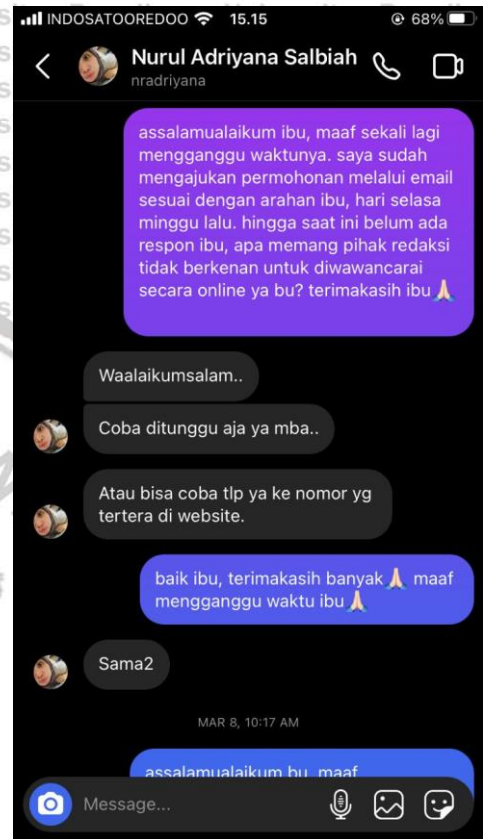
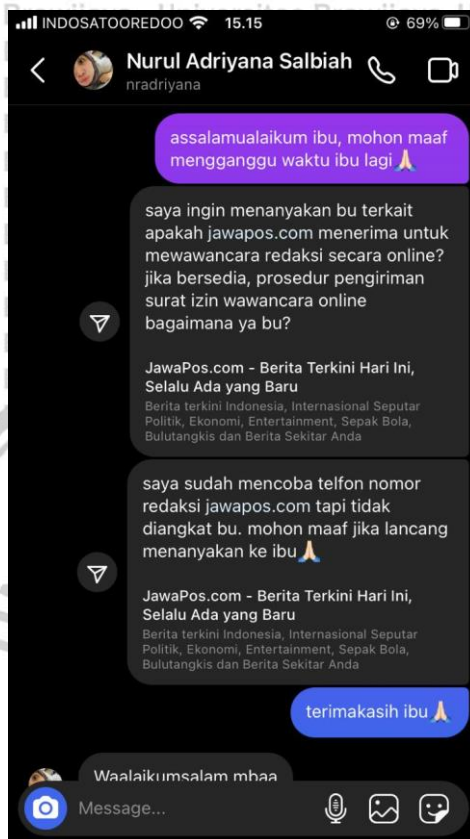
Dalam sebuah media, dalam bidang politik, ketua partai layak diikutip, anggota dewan, politikus, dan yang memiliki jabatan strategis. Sepanjang ada korelasi isu dan layak untuk diikutip. Dalam kasus pemberitaan PCR, terdapat partai PDIP yang diikutip, dikaitkan pro atau tidak dengan Risma, itu masalah lain. Fokus kita terdapat korelasi dengan isu yang ada saja, layak atau tidak, masalah pro atau tidak bukan fokus kita. Karena kita menampilkan isu tersebut tidak ingin membatasi pro dan kontra, dan itu namanya dinamika.

LAMPIRAN III BUKTI KONFIRMASI JAWAPOS.COM

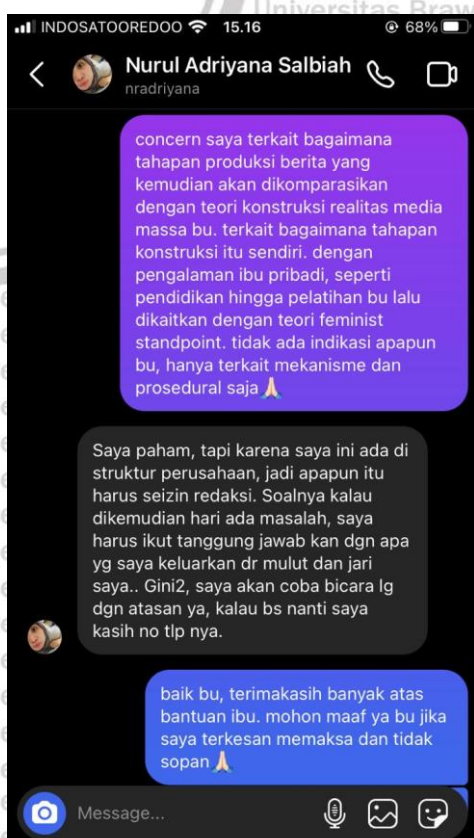
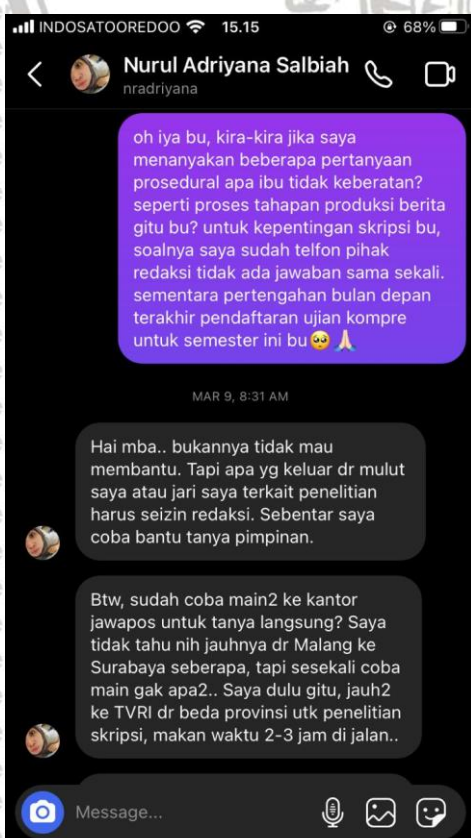
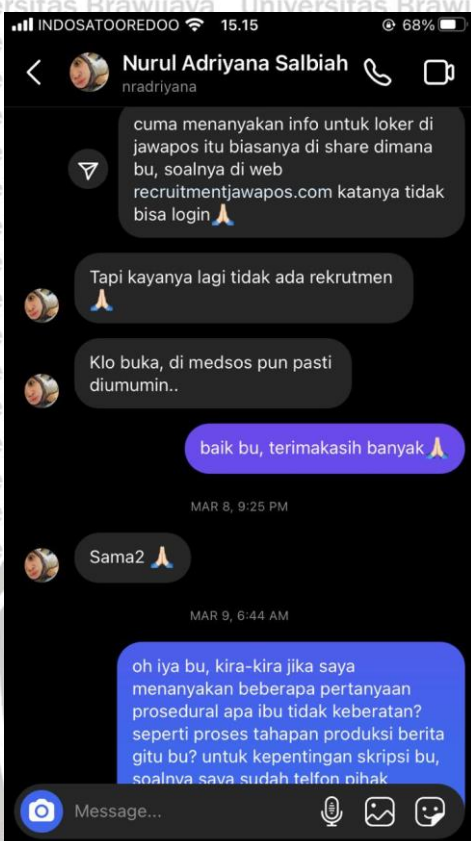
Proses konfirmasi dengan pihak Jawapos.com melalui ibu Nurul Adriyana Salbiah



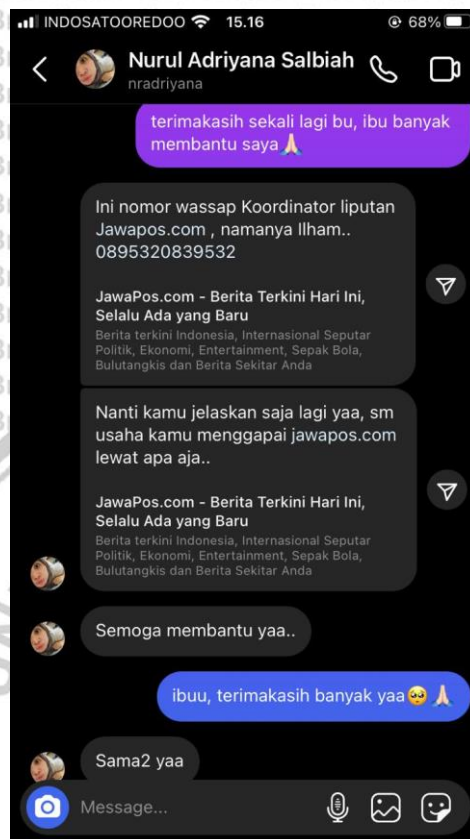
Proses konfirmasi dengan pihak Jawapos.com melalui ibu Nurul Adriyana Salbiah



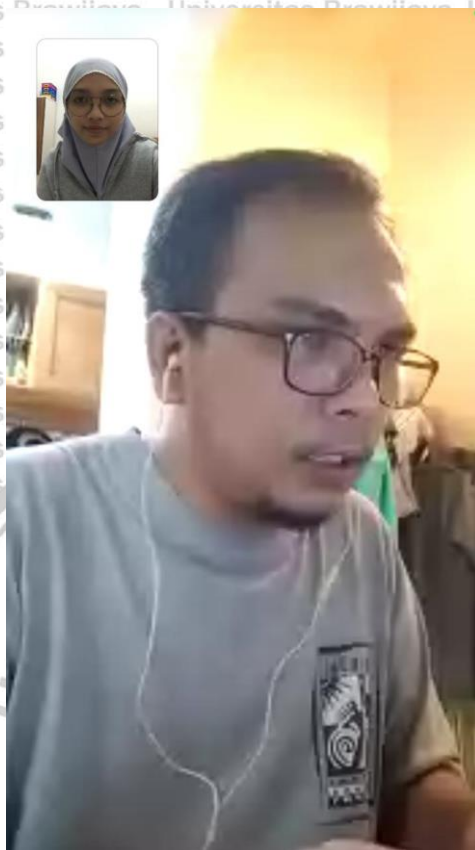
Proses konfirmasi dengan pihak Jawapos.com melalui ibu Nurul Adriyana Salbiah



Proses konfirmasi dengan pihak Jawapos.com melalui ibu Nurul Adriyana Salbiah



Proses Wawancara dengan bapak Ilham Safutra



LAMPIRAN IV KUMPULAN BERITA YANG MENJADI BAHAN ANALISIS FRAMING

Soal Mobil PCR, Harusnya Ikut Doni Monardo untuk Prioritaskan Surabaya



BISA MOBILE: BNPB menyerahkan bantuan mobil untuk mempercepat pelaksanaan rapid test ke Pemkot Surabaya. (Pemkot for Jawa Pos)

JawaPos.com – Ribut-ribut soal digesernya mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) yang sedianya diperuntukkan untuk Kota Surabaya memicu banyak komentar. Seperti dari anggota DPRD Surabaya. Menurut mereka, Pemprov Jatim perlu punya strategi komprehensif dalam penanganan Covid-19.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, semestinya Pemprov Jatim bergerak berdasarkan indikator yang terukur. Dia mencontohkan, Surabaya sebagai ibu kota provinsi dan kota terbesar adalah episentrum utama di Jawa Timur. Baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularan. Sampai saat ini, Surabaya memang berada di posisi tertinggi zona merah Jatim.

"Itu dibuktikan dengan pengalihan mobil tes PCR dari Surabaya ke daerah lain yang angka Covid-nya di bawah Surabaya," ujar Syaifuddin Zuhri, Jumat (29/5).

Lebih lanjut Syaifuddin mengatakan, semestinya Surabaya menjadi prioritas. Digesernya mobil tes PCR dari Surabaya ke daerah lain, menurutnya menjadi indikator Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi yang cermat dan terukur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno menambahkan, sudah beberapa kali Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang terkesan meneror warga Surabaya. Misalnya, saat Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Joni Wahyuhadi menyebut Surabaya bisa menjadi Wuhan baru.

"Pernyataan-pernyataan yang seolah meneror warga Surabaya, tidak diikuti dengan tindakan konkrit di lapangan dengan memberi prioritas ke kota ini. Jadi patut dipertanyakan apa motif para pejabat Pemprov Jatim dengan berbagai pernyataan yang tidak diikuti aksi dan strategi di lapangan," ujar Anas.

Dia menambahkan, pada 22 Mei 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah berkirim surat kepada Kepala BNPB Jawa Timur. Isinya, meminta bantuan untuk perluasan tes swab dengan 2 unit Mobile Combat Covid-19.

"Logikanya, surat Wali Kota itu bisa menjadi landasan bagi kebijakan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan Surabaya untuk pengoperasian mobil test PCR bantuan BNPB Pusat," ujar Anas.

Selain itu, pada 27 Mei 2020, Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Monardo telah menyebutkan bahwa pihaknya memberikan mobil laboratorium tes PCR ke Jawa Timur. Doni juga menyebut, jika Surabaya adalah salah satu prioritas bagi penggunaan fasilitas mobil tersebut karena tingginya angka positif Covid-19.

"Pemprov Jatim seharusnya mengikuti instruksi Kepala BNPB Pak Doni Monardo. Apalagi, sudah jelas ada jadwal mobil tes PCR lima hari di Surabaya. Tapi, mobil yang sudah ditunggu warga Surabaya malah dialihkan ke daerah lain," kata Anas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dibikin geram lantaran dua mobil laboratorium yang sedianya diperuntukkan Kota Surabaya, digeser oleh Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur (Jatim) ke daerah lain. Dua unit mobil lab tersebut merupakan donasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni (Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo). Jadi, ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu," kata Risma kesal sembari menunjukkan obrolannya dengan Doni via WhatsApp.

Mendengar kabar dua mobil lab malah ditujukan ke daerah lain, Risma langsung berkoordinasi. Dia menghubungi berbagai pihak yang telah dimintai bantuan untuk mendatangkan mobil lab tersebut.

Risma juga melaporkan kejadian tersebut kepada Doni Monardo. Doni pun berjanji mengecek keberadaan mobil tersebut. Pasalnya, memang dua mobil bantuan itu diprioritaskan untuk Kota Surabaya.

Sementara, Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Rumpun Kuratif dr Joni Wahyuadi menyatakan ada kesalahpahaman soal mobil PCR itu. Menurut dia, mobil tersebut sudah dijadwalkan penggunaannya. "Fokusnya membantu proses tes masif di Jawa Timur," katanya.

Hari pertama, mobil tersebut disiagakan di RSUD dan RS Haji di Surabaya. Hari berikutnya, mobil bertugas di Sidoarjo. Dokter Joni juga menegaskan Kadinkes Surabaya mengirim utusan kepadanya. Tapi tidak mengutarakan kalau ada rencana tes di Surabaya. "Karena itu, mobil diluncurkan ke Tulungagung dan Lamongan," ujarnya.

Kebutuhan rapid test dan uji swab di Surabaya memang begitu tinggi. Data dari dinas kesehatan menunjukkan, total sudah ada 24.118 rapid test hingga Kamis (28/5). Dari jumlah tersebut, 2.453 orang reaktif atau 10,17 persen. Pemkot pun ingin memastikan kondisi 2.453 orang tersebut dengan cara tes swab PCR. Sudah ada 1.155 tes swab yang dilakukan. Jadi, masih 1.298 orang yang belum menjalani tes swab.

Editor: Dhimas Ginanjar

PDIP Angkat Bicara Terkait Protes Risma Soal Mobil PCR



Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

JawaPos.com – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi serius protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengenai mobil PCR yang seharusnya ada di Surabaya namun dialihkan ke daerah lain. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyayangkan mobil PCR dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas penanganan Covid-19.

Menurut Hasto, rakyat tahu bagaimana Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah. Beliau juga sosok kreatif dan menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah.

“Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut,” ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Hasto berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas. Sehingga setiap kebijakannya diambil dengan memerhatikan kepentingan rakyat tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik. Tentunya harus menghindari ego kepemimpinan.

“Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP wajib kedepankan kepentingan rakyat, tanpa membedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA. Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerja sama,” katanya.

Diketahui, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini marah, setelah tahu sebuah mobil Lab PCR bantuan dari BNPB batal beroperasi di sejumlah titik kota Surabaya. Padahal bantuan ini ditunggu untuk dapat mempercepat deteksi penyebaran virus Korona atau Covid-19 di Surabaya.

Mobil Lab PCR bantuan dari BNPB ini seharusnya beroperasi di kelurahan Tanah Kali Kedinding Surabaya. Namun terpaksa batal beroperasi, karena mobil dipindah ke wilayah Tulungagung dan Lamongan. Padahal warga Surabaya telah menunggu untuk melakukan tes PCR.

Rencananya pemerintah kota Surabaya menargetkan dalam lima hari ke depan dapat memeriksa 2000 warganya dengan fasilitas mobil Lab PCR, yang merupakan bantuan dari BNPB.

Editor : Nurul Adriyana Salbian

Reporter : Gunawan Wibisono



Kebutuhan Tes Rapid-Swab Masih Besar, Risma Kecewa Mobil PCR Digeser

30 Mei 2020, 10:48:55 WIB



Sejumlah warga Surabaya mengantri untuk pemeriksaan rapid test serta swab yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Pemkot Surabaya di gedung Siola, Jumat (29/5) (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

JawaPos.com – Rapid test dan uji swab secara masif menjadi salah satu rangkaian untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Surabaya. Pemkot mendapatkan bantuan dua mobil laboratorium PCR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat upaya tersebut. Tetapi, Jumat (29/5) mobil tersebut dibawa ke Lamongan dan Tulungagung.

Pemindahan secara mendadak itu membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah. Dia langsung mengadukan persoalan tersebut kepada Kepala BNPB Doni Monardo. Dalam pesan pendek yang disampaikan kepada Risma, Doni menyebutkan bahwa dua mobil tersebut memang diprioritaskan untuk Surabaya.

Sebelum menunjukkan pesan pendek itu, Risma dua kali menelepon. Dia berbincang dengan lawan bicaranya dengan nada tinggi. Marah. "Saya ndak terima lho, Pak. Betul, saya ndak terima. Saya dibilang ndak bisa kerja. Siapa yang ndak bisa kerja sekarang kalau ngawur nyerobot begitu?" kata Risma.

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Rumpun Kuratif dr Joni Wahyuhadi menyatakan ada kesalahpahaman soal mobil PCR itu.

Menurut dia, mobil tersebut sudah dijadwalkan penggunaannya.

"Fokusnya membantu proses tes masif di Jawa Timur," katanya.

Hari pertama, mobil tersebut disiagakan di RSUD dan RS Haji. Hari berikutnya, mobil bertugas di Sidoarjo. Dokter Joni juga menegaskan Kadinkes Surabaya mengirim utusan kepadanya. Tapi tidak mengutarakan kalau ada rencana tes di Surabaya. "Karena itu, mobil diluncurkan ke Tulungagung dan Lamongan," ujarnya.

Kebutuhan rapid test dan uji swab di Surabaya memang begitu tinggi.

Data dari dinas kesehatan menunjukkan, total sudah ada 24.118 rapid test hingga Kamis (28/5). Dari jumlah tersebut, 2.453 orang reaktif atau 10,17 persen. Pemkot pun ingin memastikan kondisi 2.453 orang tersebut dengan cara tes swab PCR. Sudah ada 1.155 tes swab yang dilakukan. Jadi, masih 1.298 orang yang belum menjalani tes swab.

Bukan hanya mereka yang perlu tes swab. Orang yang telah terkonfirmasi positif dan mendapatkan perawatan juga harus dites swab lagi untuk memastikan kondisi. Tujuannya, memastikan bahwa mereka sudah sembuh. Terutama untuk orang tanpa gejala (OTG) yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk memastikan seseorang negatif Covid-19, minimal hasil dua kali uji swab negatif.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mengungkapkan, ada kebutuhan untuk tes swab bagi ODP, PDP, dan OTG. Total, ada sekitar dua ribu orang. Selain itu, tes cepat terus berjalan dan yang reaktif akan langsung menjalani tes swab. "Kalau tahu hasilnya dengan cepat, penanganan juga bisa semakin cepat," ungkap Feni –sapaan Febria Rachmanita.

Yang dikhawatirkan pemkot bukan hanya soal pemutusan mata rantai Covid-19 yang terhambat. Kepercayaan masyarakat juga bisa turun. Sebab, cukup sulit merayu warga agar mau menjalani tes swab meskipun gratis. Bila berbiaya mandiri, ongkos tes itu bisa sampai Rp 1,6 juta.

Pemkot juga sudah menyiapkan untuk tes swab di lokasi-lokasi lain dalam lima hari ke depan. Ditargetkan, dalam lima hari itu tes swab di Surabaya sudah bisa selesai.

Dari hasil tes swab tersebut akan diketahui orang itu positif Covid-19 atau tidak. Bila positif dan tak memiliki gejala, yang bersangkutan ditempatkan di Asrama Haji Sukolilo. Dari total kapasitas 359 unit, yang terisi sudah 236 unit. Tapi, bila ada gejala seperti sesak napas, demam, dan batuk, penderita akan ditempatkan di rumah sakit rujukan.

Yang jadi masalah, rumah sakit rujukan saat ini memang penuh. Pemkot sedang mengupayakan untuk memperbanyak kapasitas rumah sakit tersebut. Di RSUD Bhakti Dharma Husada, kapasitas akan dinaikkan menjadi sekitar 100 bed. "Di RS Husada Utama pada 1 Juni akan ditambah lagi sekitar 100 bed," papar Feni.

Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jawa Timur Dodo Anondo menuturkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan rumah sakit non rujukan untuk mau menerima pasien-pasien Covid-19. Tentu disesuaikan dengan kapasitas rumah sakit tersebut. "Rumah sakit sudah disiapkan untuk menambah RIK (ruang isolasi khusus), bergantung masing-masing rumah sakit. Non rujukan diminta untuk mendukung," kata Dodo, Jumat (29/5).

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : jun/c11/ady



Kronologi Kisruh Mobil PCR yang Digeser dari Surabaya

30 Mei 2020, 11:14:48 WIB



ILUSTRASI. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, Suban Wahyudiono di Surabaya mengungkapkan, kronologis permintaan bantuan mobil PCR. (ANTARA)

JawaPos.com – Dua mobil khusus polymerase chain reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Surabaya yang dialihkan ke daerah lain cukup membuat Wali Kota Tri Rismaharani kesal. Sebab mobil bantuan yang dijadwalkan bertandang ke Surabaya justru berbelok ke Tulungagung dan Lamongan.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Rumpun Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim Suban Wahyudiono di Surabaya pun mengungkapkan kronologis permintaan bantuan mobil PCR tersebut. Dikatakan, pada Jumat malam menjelaskan, pihaknya sempat mengirim surat permohonan bantuan ke gugus tugas pusat pada 11 Mei 2020.

“Kami mengirim surat permohonan dukungan percepatan penegakan diagnosis COVID-19 dan di dalam surat kami mengajukan permohonan 15 unit mobil,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Detailnya, ungkap Suban, permohonan tersebut meliputi permintaan mesin RT-PCR sebanyak 15 unit dan cartridge sebanyak 3.500 buah

untuk rumah sakit, yang memiliki kemampuan melakukan tes cepat molekuler (TCM) GeneXpert.

Disamping itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menelepon Kepala BNPB Doni Monardo untuk menindaklanjuti surat permohonan tersebut. Bahkan, Pangdam V/Brawijaya juga berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. "Termasuk saya mengirim WhatsApp ke beliau," ucap Kepala Pelaksana BPBD Jatim tersebut.

Setelah itu, Suban diarahkan untuk berkoordinasi dengan Deputi Kedaruratan dan Logistik BNPB Dody Ruswandi. Ini dilakukan terkait teknis pengiriman mobil PCR, dengan diberi nomor telepon sopir serta kru mobil.

Pengiriman mobil PCR pun dilakukan pada Rabu (27/5) malam. Satu unit mobil PCR sudah dikirim yang isinya dua mesin PCR dan disepakati untuk diterima di Rumah Sakit Lapangan di Jalan Indrapura Surabaya.

Setelahnya, mobil difungsikan di RS Universitas Airlangga Surabaya serta Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk dilakukan pengambilan sampel ke pasien yang dirawat.

Setelah itu, aku Suban, pada Kamis (28/5), mobil PCR diarahkan ke Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan untuk mempercepat pemeriksaan sampel yang belum dapat diperiksa.

Bahkan, salah satu mobil digeser ke Tulungagung. Hal ini juga untuk mempercepat pemeriksaan. Sebab, di Tulungagung butuh bantuan cepat akibat terkendala kapasitas swab. Terlalu banyak jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) yang tertinggi kedua di Jatim.

Setidaknya terdapat 588 orang berstatus PDP di Tulungagung. Dan sebanyak 172 orang diantaranya meninggal dunia dengan status PDP, tapi belum sempat dilakukan tes swab.

Sehingga, pihaknya menegaskan tidak pernah menyerobot bantuan dua unit mobil tersebut dari Pemkot Surabaya. Sebab Gugus Tugas Jatim sendiri telah mengirimkan surat ke pusat untuk mendapat bantuan alat PCR guna mempercepat pemeriksaan swab.

"Sebab, jumlah alat yang ada terbatas dan harus digunakan untuk memeriksa ribuan sampel yang masuk dari berbagai daerah," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan jadwal operasional mobil PCR di Jatim, rinciannya yakni pada Rabu (27/5) di RS Unair diambil 100 sampel dan Asrama Haji 10 sampel, lalu pada Kamis (28/5) di RSUD Sidoarjo 108 sampel dan Asrama Haji 190 sampel.

Selanjutnya pada Jumat (29/5), dilakukan pemeriksaan swab di RSUD Tulungagung 200 sampel serta RSUD Soegiri Lamongan sebanyak 100 sampel.

Editor : Nurul Adriyana Salbian

Reporter : Antara



Kisruh Penggunaan Mobil PCR, Gugus Tugas Jatim Sebut Ada Miskomunikasi



Ilustrasi Mobil PCR yang melakukan Swab Test di sejumlah kota di Jawa Timur (Antara)

JawaPos.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur memberi penjelasan terkait batalnya penggunaan mobil laboratorium polimerase chain reaction (PCR) yang terjadi di Surabaya. Kedua mobil yang sedianya akan melakukan pemeriksaan di Surabaya dialihkan ke kota lain.

“Ada miskomunikasi, dan sekarang kami sudah berkoordinasi,” ujar Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat malam.

Ia menjelaskan, sejak hari pertama (Rabu, 27/5), kedatangan mobil tersebut sengaja langsung ditempatkan di RS Universitas Airlangga sekaligus membantu permasalahan yang terjadi di “Institute of Tropical Disease” (ITD) Unair.

Kemudian, Direktur Utama RSUD dr Soetomo tersebut berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita yang

kemudian diarahkan ke Asrama Haji Surabaya untuk dilakukan tes di sana.

Berikutnya, pada Kamis (28/5), mobil PCR ditempatkan di RSUD Sidoarjo serta RS Lapangan di Jalan Indrapura Surabaya.

Sesuai jadwal, hari ketiga atau Jumat (29/5), dilakukan pemeriksaan di RSUD Tulungagung serta RSUD Soegiri Lamongan.

“Miskomunikasi terjadi saat Bu Feni (sapaan Kadinkes Surabaya, Red) menugaskan stafnya, kalau tidak salah namanya Bu Deni. Tapi, tidak menyampaikan hari ini acaranya di Surabaya apa, sehingga mobil dikirim ke Lamongan dan Tulungagung yang memang juga sangat membutuhkan,” ujarnya lagi.

Namun, kata dia, saat mobil PCR di tengah perjalanan, ia mendapat informasi bahwa Surabaya meminta, padahal di Tulungagung dan Lamongan sudah siap dilakukan pemeriksaan.

“Saya sudah bilang, karena sudah janji dengan Tulungagung dan Lamongan, sehingga besok pagi (Sabtu) dijadwalkan pagi. Akhirnya kami koordinasi dengan Bu Deni dan Pak Kabags Ops,” kata dr Joni lagi.

Dijadwalkan pada Sabtu, 30 Mei 2020, dua mobil PCR akan ditempatkan di RSUD Soewandhie (100 sampel) dan RS Husada Utama (100 sampel), kemudian ke kampung tangguh serta RS Lapangan.

Dia juga menyampaikan bahwa satu mobil PCR kapasitasnya bisa memeriksa 600 sampel.

Namun, ia mengingatkan bahwa tugas tenaga medis di mobil tersebut sangat berat dan tidak boleh dipaksakan karena memang sangat melelahkan.

“Setiap tiga jam bisa 25 sampel diketahui hasilnya. Tapi, kita juga harus melihat kemampuan petugasnya. Kasihan kalau dipaksakan. Sekali lagi, mari kita sama-sama menjalankan secara baik tugas ini. Semoga pasien yang belum terkonfirmasi bisa segera diketahui hasilnya,” kata dia pula.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Antara

Ridwan Kamil Sebut Pernyataan Mahfud MD Salah Satu Pemicu Kerumunan

16 Desember 2020, 13:20:28 WIB



Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)

JawaPos.com—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Habib Rizieq Shihab.

Menurut dia, setelah diperiksa di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (16/12), kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD.

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya *statement* dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Habib Rizieq. Baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan.

"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai, boleh. Maka terjadi

kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” kata Ridwan Kamil yang mantan Wali Kota Bandung itu.

Sehingga, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa kepolisian hanyalah para kepala daerahnya. Dalam hal ini dia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut Ridwan, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan.

“Jadi semua yang punya peran perlu diklarifikasi. Berikutnya kalau Gubernur Jabar diperiksa, Gubernur DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa, kan harusnya ini bupati tempat bandara yang banyak (massa) itu, gubernurnya juga mengalami perlakuan hukum yang sama,” terang Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil diperiksa sekitar dua jam oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dia hadir pada pukul 09.11 WIB dan keluar sekitar pukul 11.00 WIB.

Selama pemeriksaan dia mengaku hanya melengkapi dua hingga tiga pertanyaan setelah dirinya juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus kerumunan kegiatan Habib Rizieq Shihab pada Jumat (13/11) lalu di Megamendung, Bogor.

Editor : Latu Ratri Mubiyarsan

Reporter : Antara



Diminta Tanggung Jawab Kerumunan Rizieq, Mahfud MD: Siap Kang RK

16 Desember 2020, 21:37:41 WIB



Menkopolkum Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

JawaPos.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut bertanggung jawab atas kerumunan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Ridwan menilai pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan Rizieq di Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai pemicu terjadinya kerumunan.

Terkait itu, Mahfud tak menampik jika dirinya pernah membuat pernyataan membolehkan penjemputan Rizieq. Namun, dalam pernyataan tersebut sudah jelas jika penjemput Rizieq harus mentaati protokol kesehatan.

“Siap Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pula,” kata Mahfud melalui akun twitter resminya @mohmahfudmd, Rabu (26/12).

“Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran Rizieq dari bandara sampai ke rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Selepas itu, dianggap sudah di luar dari diskresi yang diberikan.

“Acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, setelah diperiksa di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (16/12), kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD.

”Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan,” kata Ridwan Kamil.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Habib Rizieq. Baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan.

Baca juga: [Ridwan Kamil Sebut Pernyataan Mahfud MD Salah Satu Pemicu Kerumunan](#)

”Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai, boleh. Maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” kata Ridwan Kamil yang mantan Wali Kota Bandung itu.

Sehingga, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa kepolisian hanyalah para kepala daerahnya. Dalam hal ini dia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut Ridwan, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan.

”Jadi semua yang punya peran perlu diklarifikasi. Berikutnya kalau Gubernur Jabar diperiksa, Gubernur DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa, kan harusnya ini bupati tempat bandara yang banyak (massa) itu, gubernurnya juga mengalami perlakuan hukum yang sama,” terang Ridwan Kamil.

Editor : Kuswandi

Reporter : Sabik Aji Taufan

Ridwan Kamil Minta Mahfud Tanggung Jawab, Nasir Djamil: Jangan Cengeng

17 Desember 2020, 15:18 WIB



Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil (Hendra Eka)

JawaPos.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk bertanggung jawab terkait kerumunan yang diciptakan oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil mengeluhkan pernyataan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Karena terlihat Ridwan Kamil tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang kepala daerah.

“Jangan cengeng. Masing-masing sudah punya tanggung jawab sesuai perundang-undangan. Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam soal kerumunan menunjukkan Ridwan Kamil belum siap memikul tanggung jawab,” ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (17/12).

Nasir menuturkan terlihat tidak adanya koordinasi antara pusat dengan daerah terkait kerumunan Rizieq Shihab. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi.

“Jadi melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam sama saja memperlihatkan bahwa tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah,” katanya.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab.

Menurut dia, penyebab kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena Mahfud mengizinkan masyarakat melakukan penjemputan Rizieq Shihab saat kembali ke tanah air dari Arab Saudi.

Baca juga: [Ridwan Kamil Sebut Pernyataan Mahfud MD Salah Satu Pemicu Kerumunan](#)

“Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan,” kata Ridwan Kamil.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq. Baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan.

“Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai, boleh. Maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” katanya.

Sehingga, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa kepolisian hanyalah para kepala daerahnya. Dalam hal ini dia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut Ridwan, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Soal Kerumunan Massa Rizieq, RK: Saya Bertanggung Jawab Secara Moril

17 Desember 2020, 11:06:22 WIB



Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil tiba di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Ridwan Kamil diminta klarifikasi oleh Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yakni adanya pengumpulan massa pada acara Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku ikut serta bertanggung jawab terhadap terjadinya kerumunan massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun, tanggung jawab yang dipikulnya hanya sebatas moril, tidak secara teknis.

“Secara moril apapun yang terjadi di wilayah Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai Gubernur. Jadi saya menyatakan rasa tanggung jawab moril saya,” kata Ridwan, Kamis (17/12).

Ridwan menjelaskan, wilayah Jawa Barat merupakan daerah otonom. Di mana bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Maka dari itu, setiap bupati atau wali kota bertanggung jawab atas kegiatan lokal di wilayahnya.

“Acara di Megamendung itu dalam opini saya adalah acara lokal. Jadi tanggung jawab lokalnya menjadi milik Kabupaten Bogor dan Satgasnya,” imbuhnya.

Atas dasar itu, Gubernur tidak bisa memberikan sanksi maupun pencopotan bupati dan wali kota. Proses tersebut harus melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki kekhususan. Yakni wali kota atau bupati dipilih langsung oleh Gubernur. Sehingga Gubernur bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka.

"Kalau Jawa Barat dan provinsi di luar Jakarta, bupati, wali kota dipilih rakyat. Tidak bisa disanksi dan diberhentikan oleh gubernur. Dengan sistem otonomi ini maka itu acara lokal tanggung jawab pemerintah lokal," jelas Ridwan.

Acara lokal akan menjadi tanggung jawab provinsi jika memenuhi pertama, pemerintah lokal tidak mampu menangani acara tersebut. Kedua jika acara diselenggarakan di perbatasan antar kota atau antar kabupaten. Sedangkan Ridwan Kamil berpandangan kegiatan di Megamendung tidak memenuhi dua kriteria tersebut.

Editor : Nurul Adnyana Salbiah

Reporter : Sabik Aji Taufan

